PMII

PK PMII SUNAN AMPEL KEDIRI

Modul
PELATIHAN KADER DASAR

PK.PMII Sunan Ampel Kediri
Tahun 2022

Tema :
Konstruksi Gerakan sebagai Manifestasi Kader Intelektual dalam Fungsi Sosial.

IAIN KEDIRI

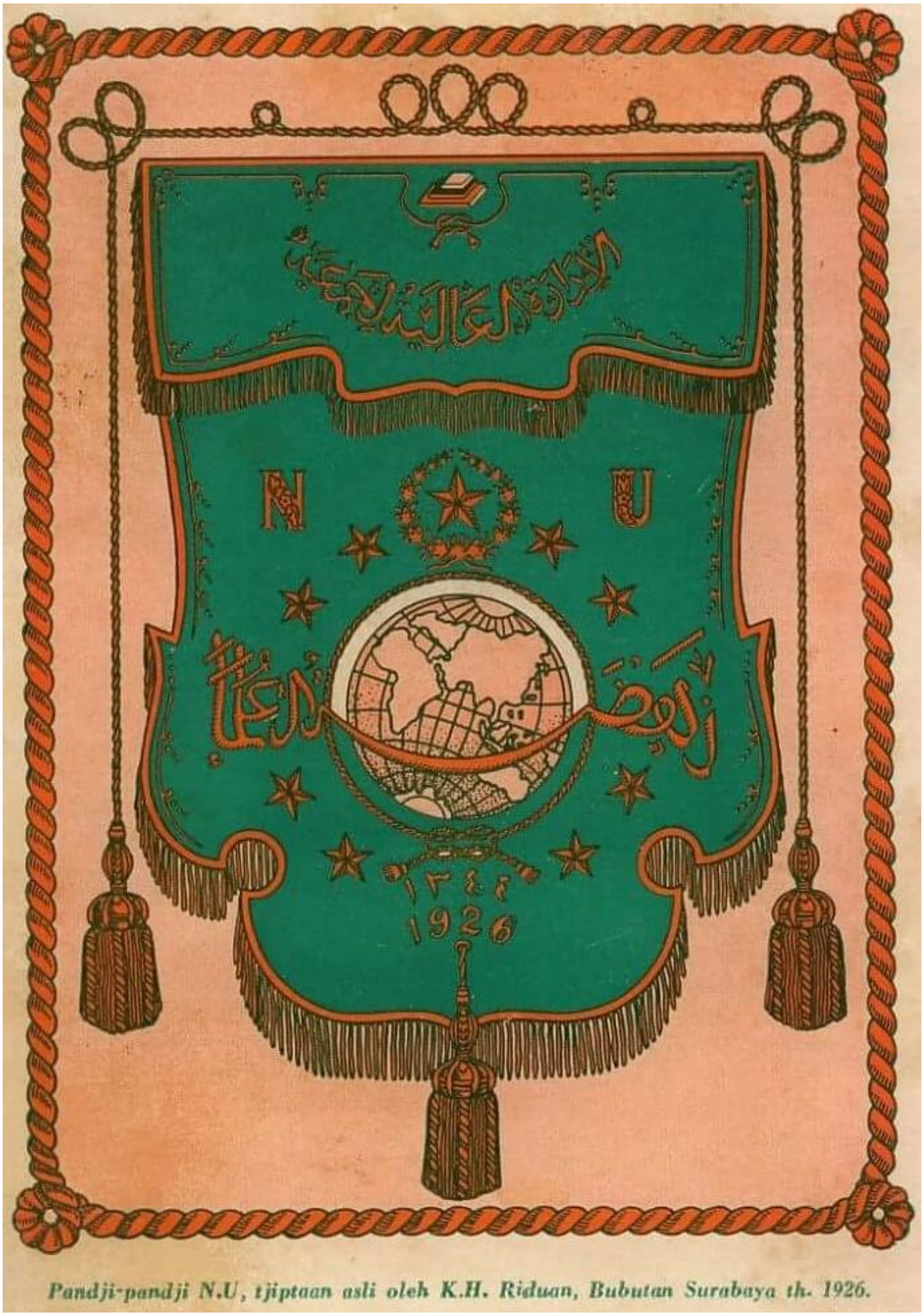

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

PK PMII SUNAN AMPEL KEDIRI

Modul

PELATIHAN KADER DASAR

PK.PMII Sunan Ampel Kediri
Tahun 2022

Tema :
Konstruksi Gerakan sebagai Manifestasi Kader Intelektual dalam Fungsi Sosial.

Daftar Isi

ASWAJA II 2

Peta Gerakan Islam 10

Strategi Pengembangan PMII 17

Analisis Wacana dan Framing 23

Nahdhatun Nisa' 27

Format Politik Dan Ekonomi Indonesia 38

Teologi Pembebasan 59

Managemen Aksi 82

Analisis Sosial II 87

Paradigma 101

Advokasi dan Pendampingan Masyarakat 104

MATERI ASWAJA II

A. Pengertian

Istilah Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA), merupakan gabungan dari tiga kata, yakni Ahl, Assunnah, dan Aljamâ'ah.Secara etimologis, kata ahl (أهل (berarti golongan, kelompok atau komunitas. Etimologi kata assunah (السن (memiliki arti yang cukup variatif, yakni: wajah bagian atas, kening, karakter, hukum, perjalanan, jalan yang ditempuh, dll). Sedangkan kata aljamâ'ah (الجماعة (berarti perkumpulan sesuatu tiga ke atas.) Adapun terminologi Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan merujuk kepada pengertian bahasa (lughawi) ataupun agama (syar'i), melainkan merujuk pada pengertian yang berlaku dalam kelompok tertentu . Yaitu, ASWAJA adalah kelompok yang konsisten menjalankan sunnah Nabi saw. dan mentauladani para sahabat Nabi dalam akidah (tauhîd), amaliah badâniyah (syarîah) dan akhlaq qalbiyah (tasawuf). Terminologi istilah Ahlussunnah wal Jama'ah ini didasarkan pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa hanya kelompok inilah yang selamat dari 73 perpecahan kelompok umat nabi Muhammad SAW: Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam genggamanNya, umatku akan bercerai-berai ke dalam 73 Golongan. Yang satu masuk surga dan yang 72 masuk neraka". Ditanyakan: "Siapakah mereka (golongan yang masuk surga) itu, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Mereka adalah Ahlussunnah wal Jama'ah". (HR. Thabrani). Hadits yang lain menjelaskan: Umat ini nantinya juga akan terpecah menjadi 73 sekte, satu yang selamat, yang lainnya dalam kerusakan. Shahabat bertanya, "Siapa yang selamat?" Nabi menjawab: "Ahlussunah wal Jama'ah". Mereka bertanya kembali: "Siapa Ahlussunah wal Jama'ah?" Jawab Nabi: "Adalah apa yang aku dan sahabatku praktekkan hari ini".

Dengan pengertian terminologis demikian, ASWAJA secara riil di tengah-tengah umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok.Pertama, Ahl Alhadits dengan sumber kajian utamanya adalah dalil sam'iyah, yakni Alqur'an, Assunnah Ijma dan Qiyas.Kedua, para ahl alkalâm atau ahl annadhar (teologi) yang mengintegrasikan intelegensi (asshinâ'ah alfikriyyah).Mereka adalah Asyâ'irah dengan pimpinan Abu Hasan Al'asy'ari dan Maturidiyah dipimpin oleh Abu Manshur Almaturidi.Sumber penalaran mereka adalah akal dengan tetap meletakkan dalil sam'iyyah dalam porsinya. Ketiga, Ahl Alwijdân wa Alkasyf (kaum shufiyah). Sumber inspirasi mereka adalah penalaran Ahl Alhadits dan Ahl Annadhar sebagai media penghantar yang kemudian dilanjutkan melalui pola kasyf dan ilham. Ketiga kelompok inilah yang paling layak disebut ASWAJA secara hakiki.

Di Indonesia, Nahdlatul Ulama merumuskan ASWAJA dengan dua pengertian. **Pertama**, ASWAJA sudah ada sejak zaman Nabi, sahabat nabi, tâbi'în dan tâbi'înattâbi'în yang umumnya disebut dengan assalaf ashshalih. Pendapat ini didasarkan pada pengertian bahwa ASWAJA berarti golongan yang setia pada Assunah dan Aljamâ'ah, yaitu Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. bersama para sahabatnya pada zaman Nabi masih hidup dan apa yang dipraktekkan para sahabat sepeninggal beliau, terutama Khulafa' Arrasyidin. Dari pengertian ini, ASWAJA dirumuskan sebagai: kelompok yang senantiasa konsisten dan setia mengikuti sunnah Nabi saw. dan thariqah atau jalan para sahabatnya dalam akidah, fiqh dan tasawuf. Kelompok ini terdiri dari para teolog (mutakallimîn), ahli fiqh (fuqahâ'), ahli hadits (muhaditsîn), dan ulama tasawuf (mutashawwifîn).

Kedua, ASWAJA adalah paham keagamaan yang muncul (dimurnikan) setelah Imam Abu Alhasan Al'asy'ari dan Imam Abu Manshur Almaturidi memformulasikan akidah Islam yang sesuai dengan Alqur'an dan Assunnah.Itu sebabnya, kelompok ASWAJA juga disebut sebagai penganut paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Syaikh Murtadla Azzubaidi dalam kitab Al'ittihâf Assâdah Almuttaqîn, Syarah kitab Ihyâ' Ulûmiddîn karya Imam Alghazali

menyatakan: Ketika diucapkan secara mutlak istilah Ahlussunnah wal Jama'ah, maka yang dikehendaki mereka ialah kelompok penganut paham Al'asy'ari dan Almaturidi.

KH. Hasyim Asy'ari pada sambutan pembukaan deklarasi berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama menandaskan: "Ciri Ahlussunah wal Jama'ah, adalah mereka yang di bidang tauhid mengikuti Imam Abu Alhasan Al'asy'ari atau Abu Mansur Almaturidi; di bidang fiqh mengikuti madzhab empat: Imam Abi Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i bin Idris atau Ahmad bin Hambal; dan di bidang tasawuf mengikuti ajaran Syaikh Junaid Albaghdadi dan Imam Alghazali."

Dari terminologi ASWAJA seperti di atas, dapat dimengerti bahwa Ahlussunah wal Jama'ah merupakan istilah yang terbangun melalui nalar 'urfi, untuk mencirikan umat Muslim sebagai representasi dari sawâd al'a'dham (kelompok mayoritas) ketika kondisi perpecahan paham merajalela dan dirasa perlu merapatkan barisan dan menyepakati sebuah identititas, sebagai upaya membedakan antara yang haq dan bathil, antara mereka yang teguh mengikuti sunnah dan yang menyimpang dengan berbagai macam bid'ah, sebagaimana yang ditekankan Rasulullah saw. dalam sabdanya: Rasulullah saw. bersabda, Allah tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan selamanya. Kekuatan (pertolongan) Allah berada pada kelompok, maka ikutilah kelompok terbesar, karena sesungguhnya seseorang yang mimisahkan diri, ia memisahkan diri ke dalam neraka.

B. Sejarah

Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Qur'an apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara Sifat-Sifat Allah antara ulama Salafiyyun dengan golongan Mu'tazilah, dan seterusnya. Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja sebenarnya dimulai sejak zaman Al-Khulafa' Ar-Rasyidun, yakni dimulai sejak terjadi Perang Shiffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dengan Muawiyah. Bersama kekalahan Khalifah ke-empat tersebut, setelah melalui taktik arbitrase (tahkim) oleh kubu Muawiyah, ummat Islam makin terpecah kedalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syi'ah yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan Khawarij yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan tahkim, dan ada pula kelompok Jabariyah yang melegitimasi kepemimpinan Muawiyah.

Selain tiga golongan tersebut masih ada Murjiah dan Qadariah, faham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur (af'al al-ibad min al-ibad) – berlawanan dengan faham Jabariyah. Di antara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan ibn Hasan Yasar al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan al-Bashri, yang cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural (tsaqafiyah), ilmiah dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai faksi politik (firqah) yang berkembang ketika itu. Sebaliknya mereka mengembangkan sistem keberagamaan dan pemikiran yang sejuk, moderat dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagamaan semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan

golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu. Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi Ulama setelah beliau, di antaranya Imam Abu Hanifah Al-Nu'man (w. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), Ibn Kullab (w. 204 H), Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H), hingg tiba pada generasi Abu Hasan Al-Asy'ari (w 324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H). Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan; meskipun bila ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya.

Asy`ariyah adalah sebuah paham aqidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy`ariy. Beliau lahir di Bashrah tahun 260 Hijriyah bertepatan dengan tahun 935 Masehi. Beliau wafat di Bashrah pada tahun 324 H/975-976 M . Awalnya Al-Asy`ari pernah belajar kepada Al-Jubba`i, seorang tokoh dan guru dari kalangan Mu`tazilah. Sehingga untuk sementara waktu, Al-Asy`ariy menjadi penganut Mu`tazilah, sampai tahun 300 H. Namun setelah beliau mendalami paham Mu`tazilah hingga berusia 40 tahun, terjadilah debat panjang antara dia dan gurunya, Al-Jubba`i dalam berbagai masalah terutama masalah Kalam. Debat itu membuatnya tidak puas dengan konsep Mu`tazilah dan dia pun keluar dari paham itu kembali ke pemahanan Ahli Sunnah Wal Jamaah . Al-Asy`ariyah membuat sistem hujjah yang dibangun berdasarkan perpaduan antara dalil nash (naql) dan dalil logika (`aql). Dengan itu belaiu berhasil memukul telak hujjah para pendukung Mu`tazilah yang selama ini mengacak-acak eksistensi Ahlus Sunnah. Bisa dikatakan, sejak berdirinya aliran Asy`ariyah inilah Mu`tazilah berhasil dilemahkan dan dijauhkan dari kekuasaan. Secara umum dan singkat bisa dipahami dengan melihat dalam tabel berikut:

No	**Periode**	**Momen Sejarah**
1.	Abu Bakar	Embrio pepecahan umat islam dimulai Pasca rasulullah wafat, terbukti banyak umat islam yang keluar dari agama islam, untungnya hal ini mampu di selesaikan oleh Abu Bakar sehingga persatuan umat islam tetap terjaga Beliau juga mampu Menumpas Gerakan Nabi Palsu Dan Kaum Murtad. Dalam Hubungan Luar Negeri, Penyerangan Terhadap Basis-Basis Penting Romawi Dan Persia Dimulai.
2	Umar Bin Khattab	Setelah Abu Bakar, benih perpecahan semakin menjadi terutama dari mereka bani Umayah yang tidak senang terhadap pemimpin baru mereka yaitu Umar Ibnu Khattab mereka mulai menghembuskan fitnah-fitnah terhadap Umar sampai kemudian mampu membuat rekayasa social, yang akhirnya terbunuhlah Umar oleh seorang majusi yaitu Abu lu'lu Al-Majusi– sebelum beliau wafat Romawi berhasil diusir Dari Tanah ArabTerjadi Pengkotakan Antara Arab Dan Non-Arab – Wilayah Islam mencapai Cina dan Afrika Utara.
3	Utsman Bin	Al-qur'an dikondifikasi dalam mushaf Utsmani –oerpecahan mencapai puncaknya– pemerintah labil karena gejolak politik dan

	Affan	isu KKN – Armada maritim dibangun.
4	Ali bin Abi Thalib	Perang Jamal – pemberontakan Mua'wiyah – arbitrase Shiffin memecah belah umat menjadi tiga kelompok besar : Syi'ah, Khawarij, Murjiah – Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar mengkonsolidir gerakan awal Aswaja yang tidak memihak kepada pihak manapun dan lebih memusatkan perhatian pada penyelamat Al-qur'an dan sunnah – Akhir dari sistem Syura.
5	Bani Umayah	Kembalinya negara Klan atau dinasti Islam mencapai Andalusia dan Asia tengah – madzhab-madzhab teologis bermunculan; terutama Qodariyah, Jabariyah, Murjiah moderat dan Mu'tazilah – Aswaja belum terkonsep secara baku (Abu Hanifah)
6	Bani Abbasiyah	Mu'tazilah menjadi ideology Negara Mihnah dilancarkan terhadap beberapa Imam Aswaja, termasuk Ahmad bin Hambal – Fiqih dan Ushul Fiqih Aswaja disistematisasi 26 oleh al-Syafi'ie, teologi oleh al-Asy'ari dan al-Maturidi, Sufi oleh al Junaid dan AlGhazali – terjadi pertarungan antara doktrin aswaja dengan kalangan filosof dan tasawuf falsafi – Kemajuan ilmu pengetahuan sebagai wujud dari dialektika pemikiran – Perang Salib dimulai – Kehancuran Baghdad oleh Mongol menjadi awal penyebarannya umat beraliran Aswaja sampai ke wilayah Nusantara.
7	Umayah Andalusia	Aswaja menjadi madzhab dominan – kemajuan ilmu pengetahuan menjadi awal kebangkitan Eropa – Aswaja berdialektika dengan fisafat dalam pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu 'Arabi
8	Turki Utsman	Aswaja menjadi ideology negara dan sudah dianggap mapan – kesinambungan pemikiran hanya terbatas pada syarah dan hasyiyah – Romawi berhasil diruntuhkan – perang salib berakhir dengan kemenangan umat Islam – kekuatan Syi'ah (safawi) berhasil dilumpuhkan – Mughal berdiri kokoh di India.
9	Kolonialisme	Masuknya paham sekularisme – pusat peradaban mulai berpindah ke Eropa – Aswaja menjadi basis perlawanan terhadap imperialisme – kekuatan kekuatan umat Islam kembali terkonosolidir.
10	Akhir Turki Utsmani	Lahirnya turki muda yang membawea misi restrukturissi dan reinterpretasi Aswaja – gerakan Wahabi lahir di Arabia-kekuatan Syi'ah terkonsolidir di Afrika urata – Gagasan pan-Islamisme dicetuskan oleh al-Afghani – Abduh memperkenalkan neo-Mu'tazilah – al-Ikhwan al-Muslimun muncul di Mesir sebagai perlawanan terhadap Barat – Berakhirnya sistem kekhalifahan dan digantikan oleh nasionalisme (nation-state) – Aswaja tidak lagi menjadi ideologi Negara
11	Pasca PD II	Aswaja sebagai madzhab keislaman paling dominant – diikuti usaha-usaha kontekstualisasi aswaja di negara-negara Muslim-lahirnya negara Muslim Pakistan yang berhaluan aswaja – kekuatan Syi'ah menguasai Iran – lahirnya OKI namun hanya bersifat

		simbolik belaka.

Adapun mengenai sejarah Perjalanan ASWAJA Dalam Sejarah Nusantara (Ke-Indonesia-an) bisa dilacak pada awal mula masuknya islam ke nusantara. Memang banyak perdebatan tentang awal kedatangan Islam di Indonesia, ada yang berpendapat abad ke-8, ke-11, dan ke-13 M. Namun yang pasti tonggak kehadiran Islam di Indonesia sangat tergantung kepada dua hal: pertama, Kesultanan Pasai di Aceh yang berdiri sekitar abad ke-13, dan kedua, Wali Sanga di Jawa yang mulai hadir pada akhir abad ke15 bersamaan dengan runtuhnya Majapahit.

Namun, dalam perkembangan Islam selanjutnya, yang lebih berpengaruh adalah Wali Sanga yang dakwah Islamnya tidak hanya terbatas di wilayah Jawa saja, tetapi menggurita ke seluruh pelosok nusantara. Yang penting untuk dicatat pula, semua sejarawan sepakat bahwa Wali Sanga-lah yang dengan cukup brilian mengkontekskan Aswaja dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga lahirlah Aswaja yang khas Indonesia, yang sampai saat ini menjadi basis bagi golongan tradisionalis, NU dan PMII. Secara singkat bisa dipahami dalam tabel berikut:

NO.	**Periode**	**Momen Sejarah**
1	Islam Pra Wali Songo	Masyarakat muslim bercorak maritim-pedagang berbasis di wilayah pesisir – mendapat hak istimewa dari kerajaan-kerajaan Hindu yang pengaruhnya semakin kecil – fleksibilitas politik – dakwh dilancarkan kepada para elit penguasa setempat.
2	Wali Songo	Konsolidasi kekuatan pedagan muslim membentuk konsorsium bersama membidani berdirinya kerajaan Demak dengan egalitarianisme Aswaja sebagai dasar Negara – sistem kasta secara bertahap dihapus – Islamisasi dengan media kebudayaan – Tercipta asimilasi dan pembauran Islam dengan budaya lokal bercorak Hindu-Budah – Usaha mengusir Portugis gagal.
3	Pasca Wali Songo – Kolonialisme Eropa	Penyatuan jawa oleh Trenggana menyebabkan dikuasainya jalur laut Nusantara oleh Portugis – kekuatan Islam masuk ke padalaman – kerajaan Mataram melahirkan corak baru Islam Nusantara yang bersifat agraris-sinkretik – Mulai terbentuknya struktur masyarakat feodal yang berkelindan dengan struktur kolonial mengembalikan struktur kasta dengan gaya baru – kekuatan tradisionalis terpecah belah, banyak pesanten yang menjadi miniatur kerajaan feudal – kekuatan orisinil aswaja hadir dalam bentuk perlawanana agama rakyat dan perjuangan menentang penjajahan – Arus Pembaruan Islam muncul di minangkabau melalui kaum Padri – Politik etis melahirkan kalangan terpelajar pribumi – Ide nasionalisme mengemuka – kekuatan islam mulai terkonsolidir dalam Sarekat Islam (SI). Muhammadiyah berdiri sebagai basis muslim modernis.

4	Kelahiran NU	Komite Hijaz sebagai embrio, kekuatan modernis dengan paham wahabinya sebagai motivasi, SI tidak lagi punya pengaruh besar, jaringan ulama' tradisional dikonsolidir dengan semangat meluruskan tuduhan tahayyul, bid'ah, dan khurafat, Qanu Asasi disusun sebagai landasan organisasi NU, aswaja (tradisi) sebagai basis perlawanan terhadap kolonialisme, fatwa jihad mewarnai revolusi kemerdekaan.
5	NU Pasca Kemerdekaan	NU menjadi partai politik, masuk dalam aliansi Nasakom – PMII lahir sebagai underbow di wilayah mahasiswa – Berada di barisan terdepan pemberantasan PKI – Ikut membidani berdirinya orde baru – Ditelikung GOLKAR dan TNI pada pemilu 1971 –27 Deklarasi Munarjati menandai independennya PMII – NU bergabung dengan PPP pada pemilu 1977 – kekecewaan akan politik menumbuhkan kesadaran akan penyimpangan terhadap Qanun Asasi dan perlunya Khittah.
6	NU Pasca Khittah	Nu Kembali menjadi organisasi kemasyaratan – menerima Pancasila sebagai asas tunggal – Menjadi kekuatan utama civil society di Indonesia – posisi vis a vis Negara – Bergabung dalam aliansi nasional memulai reformasi menjatuhkan rezim orde baru
7	NU Pasca Reformasi	Berdirinya PKB sebagai wadah politik nahdliyyin – Naiknya Gus Dur sebagai presiden – NU mengalami kegamangan orientasi – kekuatan civil society mulai goyah – PMII memulai tahap baru interdependensi – (pasca Gus Dur sampai saat ini, kekuatan tradisionalis menjadi terkotak-kotak oleh kepentingan politis).

Mengingat Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi'i, dan sebagian terbesarnya tergabung – baik tergabung secara sadar maupun tidak – dalam jam'iyyah Nahdlatul 'Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah wal-Jama'ah. Dimana lahirnya Nahdatul Ulama (konservatif-tradisiolis) di indonesia pada 31 Januari 1926 /16 Rajab 1344 H yang ditetapkan di surabaya merupakan bentuk respon atas aliran wahabi yang terpusat di arab saudi yang menamakan diri sebagai aliran pembaharu islam (modernis-reformis).

C. Implementasi Aswaja Dalam Nilai-Nilai Gerakan

Implementasi Aswaja Dalam Nilai-nilai Gerakan bisa kita tarik dari nilai-nilai perubahan yang diusung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika merevolusi masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang tercerahkan oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Ada dua hal pokok yang menjadi landasan perubahan itu: **Basis Nilai**, yaitu nilai kebenaran qurani dan sunnah nabi yang diimplementasikan secara konsekwen dan penuh komitmen. **Basis Realitas**, yaitu keberpihakan kepada kaum tertindas dan masyarakat Akar rumput.

Dua basis ini terus menjadi nafas perubahan yang diusung oleh umat Islam yang konsisten dengan aswaja, termasuk di dalamnya NU dan PMII. Konsistensi di sini hadir dalam bentuk élan dinamis gerakan yang selalu terbuka untuk dikritik dan dikonstruk ulang,

sesuai dengan dinamika zaman dan lokalitas. Dia hadir tidak dengan klaim kebenaran tunggal, tetapi selalu berdialektika dengan realitas, jauh dari sikap eksklusif dan fanatic.

Maka empat nilai yang dikandung oleh aswaja, untuk konteks sekarang harus kita tafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan teori-teori sosial dan ideology-ideologi dunia.

Pertama Tawassuth sebagai pola pikir, harus kita maknai sebagai tidak mengikuti nalar kapitalisme-liberal di satu sisi dan nalar Komunisme-sosialis di sisi lain. Kita harus memiliki cara pandang yang otentik tentang realitas yang selalu berinteraksi dalam tradisi. Pemaknaannya ada dalam paradigma yang dipakai oleh PMII yaitu paradigma kritis transformatif. (Berfikir)

Kedua Tasamuh sebagai pola sikap harus kita maknai sebagai bersikap toleran dan terbuka terhadap semua golongan selama mereka bisa menjadi saudara bagi sesama. Sudah bukan waktunya lagi untuk terkotak-kotak dalam kebekuan golongan, apalagi agama. Seluruh gerakan dalam satu nafas pro-demokrasi harus bahu membahu membentuk aliansi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik, bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. PMII harus bersikap inklusif terhadap sesama pencari kebenaran dan membuang semua bentuk primordialisme dan fanatisme keagamaan. (Sosial dan Budaya)

Ketiga Tawazun sebagai pola relasi dimaknai sebagai usaha mewujudkan egalitarianisme dalam ranah sosial, tidak ada lagi kesenjangan berlebihan antar sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan bawah.Di wilayah ekonomi PMII harus melahirkan model gerakan yang mampu menyeimbangkan posisi Negara, pasar dan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang memusatkan orientasi ekonomi di tangan pasar sehingga fungsi negara hanya sebagai obligator belaka dan masyarakat ibarat robot yang harus selalu menuruti kehendak pasar; atau sosialisme yang menjadikan Negara sebagai kekuatan tertinggi yang mengontrol semua kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada kebebasan bagi pasar dan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya. Di wilayah politik, isu yang diusung adalah mengembalikan posisi seimbang antara rakyat dan negara. PMII tidak menolak kehadiraan negara, karena Negara melalui pemerintahannya merupakan implementasi dari kehendak rakyat. Maka yang perlu dikembalikan adalah fungsi negara sebagai pelayan dan pelaksana setiap kehendak dan kepentingan rakyat. Di bidang ekologi, PMII harus menolak setiap bentuk eksploitasi alam hanya semata-mata demi memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan. Maka, kita harus menolak nalar positivistik yang diusung oleh neo-liberalisme yang menghalalkan eksploitasi berlebihan terhadap alam demi memenuhi kebutuhan bahan mentah, juga setiap bentuk pencemaran lingkungan yang justru dianggap sebagai indikasi kemajuan teknologi dan percepatan produksi. (Politik dan Ekonomi)

Keempat Ta'adul sebagai pola integral mengandaikan usaha PMII bersama seluruh komponen masyarakat, baik nasional maupun global, untuk mencapai keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan dalam berpikir, bersikap, dan relasi. Keadilan dalam ranah ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh ranah kehidupan. Dan perjuangan menuju keadilan universal itu harus dilaksanakan melalui usaha sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu anugerah dan pemberian turun dari langit.(Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Kemaslahatan)

D. Otoritas & Kontekstualisasi Aswaja di PMII

Secara singkat posisi Aswaja di PMII dapat dilihat sebagai berikut. Dalam upaya memahami, menghayati, dan mengamalkan Islam, PMII menjadikan ahlussunnah wal jama'ah sebagai manhaj al-fikr sekaligus manhaj al-taghayyur alijtima'i (perubahan sosial) untuk mendekonstruksikan sekaligus merekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama yang toleran, humanis, anti-kekerasan, dan kritis-transformatif (dalam NDP dan PKT PMII).

Bagi PMII, Aswaja merupakan basis dasar nilai organisasi. Hal ini berarti kehidupan dan gerakan PMII senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai tersebut sehingga secara langsung

membentuk identitas komunitas. Lebih dari itu, Aswaja merupakan inspirasi gerakan dan sekaligus alat bergerak yang membimbing para aktivisnya dalam memperjuangkan cita-cita kebangsaan dan kemanusiaan. Ini sudah dibuktikan misalnya komitmen gerakan yang tidak melenceng dari cita-cita kebangsaan itu, sementara di sisi lain tetap berkomitmen dengan cita-cita Islam yang humanis, pluralis, demokratis, egaliter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Di atas landasan ini pula organisasi PMII bergerak membangun jati diri komunitasnya dan arah gerakannya. Berikut ini beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam Aswaja PMII Yakni ada dalam Maqosidu Al-Syari'ah (Tujuan Syariah Islam) berupa : 1) Hifdzunnafs (menjaga jiwa); 2) Hifdzuddin (menjaga agama); 3) Hfdzul `aqli (menjaga aqal); 4) Hifdzulmaal (menjaga harta); 5) Hifdzul nasab (menjaga nasab).

Kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Maqosidu Al-Syari'ah : 1) Hifzunnafs pemaknaannya Menjaga hak hidup (hak azazi manusia); 2) Hifdzuddin pemaknannya pluralisme (kebebasan berkeyakinan); 3) Hifdzul `aqli (kebebasan berfikir); 4) Hifdzulmaal (kebebasan mencari penghidupan); 5) hifdzul nasab (kearifan local).

Karakteristik ulama ahlussunnah waljama`ah dalam berfikir dan bertindak: 1) Tasamuh (toleran); 2) Tawazun (menimbang-nimbang); 3) Ta'adul (berkeadilan untuk semua); 4) Adamu ijabi birra`yi (tidak merasa paling benar); 5) Adamuttasyau` (tidak terpecah belah); 6) Adamulkhuruj (tidak keluar dari golongan); 7) Alwasatu (selalu berada ditengah-tengah); 8) Luzumuljamaah (selalu berjamaah); 9) Adamu itba'ilhawa (tidak mengikuti hawa nafsu); 10) Puncak dari semuanya adalah Ta'awun (saling tolong menolong).

PETA GERAKAN ISLAM

Gesekan pemikiran baik yang muncul di kalangan umat Islam maupun yang diimpor dari Barat, tentunya membawa pada wajah gerakan pemikiran Islam menjadi sangat variatif. paham keislaman yang amat beragam, tentunya memiliki latar belakang kemunculannya , batasan dan ciri-ciri dari masing-masing gerakan pemikiran Islam yang muncul di Indonesia. Masing-masing mempunyai corak dan wajah yang cukup beragam. Berikut ini dikemukakan diantara corak pemikiran gerakan Islam yaitu:

1. Tradisionalis

Kelompok Tradisionalis adalah kelompok yang ditujukan kepada mereka yang berpegang pada Al-Qur'an dan as-Sunah, maupun yang berpegang pada produkproduk pemikiran para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam keilmuan fiqh, tafsir, teologi, tasawuf, lughah, ushul fiqh dan lainnya. Gerakan dari kelompok tradisionalis ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi yang ada pada masyarakat, mereka melakukan islamisasi terhadap nilai-nilai budaya.

Salah satu faktor agama Islam mudah diterima oleh masyarakat, yaitu karena Islam di Indonesia mengandung konsep mistik dan telah menyesuaikan diri dengan tradisi lokal yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat. Islam menampakkan watak akomodatif terhadap nilai-nilai tradisi setempat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam.

Pada abad ke-13, sebagian masyarakat Indonesia adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan, yang mana tidak memungkinkan Islam dapat berkembang secara lebih rasional dan modern. Terlebih pada saat itu, masih kentalnya dengan ajaran Hindu-Budha yang bersifat spiritual mistik. Oleh karena itu, paham Syafi'iyah lah yang berkembang di Indonesia, yang mana lebih menekankan aspek loyalitas terhadap pemuka agama (ulama', Kyai, dan semisalnya) dari pada substansi ajaran Islam yang bersifat rasional.

Sejalan dengan itu, sikap taqlid berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan sikap taat dan patuh terhadap para ulama' dengan tanpa syarat. Ajaranajaran yang disampaikan para ulama lebih banyak pada bidang ritual dan disesuaikan dengan tradisi masyarakat Indonesia saat itu. Semua ini dapat berjalan lancar mengingat paham Ahl Sunnah Wal Jama'ah mempunyai sikap-sikap lebih toleran dari pada paham-paham kelompok Islam lainnya. Oleh karena itu, pada kelompok ini mempertahankan tradisi sangat penting dalam kehidupan keagamaan mereka. Bahkan pikiran-pikiran tradisional yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, bukan merupakan suatu persoalan.

Kelompok yang mewakili Islam tradisionalis di Indonesia ini adalah Nahdatul ulama yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Ciri-ciri dari kelompok tradisionalis adalah: 1) Mempertahankan apa yang dipandang baik sejak dulu, 2) Memiliki prinsip " Al-muhafadhotu

‘ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah, yakni ‘Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik’. 3) dasar pemikirannya yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma' dan qiyas.

2. Modernis

Kelompok Modernis adalah kelompok yang berusaha beradaptasi dengan perkembangan zaman, mereka ingin memajukan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Barat, gerakan Islam modernis ini muncul dalam rangka menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Munculnya gerakan ini juga merupakan respon terhadap berbagai keterbelakangan yang dialami umat Islam dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, politik dan lainnya. Keadaan yang demikian ini dirasa tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam, yang digambarkan bahwa Islam itu mendorong ke arah kemajuan, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, yang muaranya membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Namun faktanya justru umat Islam mengalami masa keterbelakangan dan kemunduran. Inilah yang memunculkan kegelisahan batin bagi para pemikir gerakan modern ini, untuk berusaha memahami ajaran Islam secara kontekstual, agar ajaran Islam itu bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Pada mulanya, Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kelompok modernis di Indonesia, muncul akibat pengaruh Gerakan pemurnian Muhammad Ibn Abdul Wahhab di Jazirah Arab, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir.

Semangat dan isi pembaharuan pemikiran Islam itu pertama kali mendapatkan perhatian dari umat Islam didaerah perkotaan. Secara geografis dan kultural masyarakat kota lebih cepat berhadapan dengan pengaruh luar dari pada masyarakat desa, terlebih lagi, masyarakat kota juga tidak terlalu terikat dengan tradisi-tradisi dan budaya yang ada. Dengan mengikuti ajaran pembaharuan yang sedang berkembang di awal abad ke-19 itu, mereka menempatkan diri sebagai kelompok modernis Islam.

Munculnya berbagai kelompok modernis Islam seperti Al-Irsyad, Jami’atul Khair, Muhammadiyah, dan Serikat Dagang Islam, dan berbagai Lembaga Pendidikan modern lainnya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pembaharuan atau modernisasi pemikiran Islam yang dipelopori oleh para pembaharu. Ciri-ciri kelompok modernis yaitu:

a) Menghilangkan praktek-praktek taqlid, ajaran islam diterjemahkan secara rasional, agar mampu membangun dan bersaing dengan peradaban modern. Berbagai organisasi dan institusi dikelola secara modern sehingga dapat memenuhi kebutuhan pada zamannya.

b) Kalangan modernis pun melakukan upaya purifikasi keagamaan Islam dari elemen-elemen tradisi paganisme yang dapat menimbulkan bid'ah dan khurafat.

c) Kelompok modernis mengadakan pembaharuan berkisar pada aspek

Pendidikan, kesehatan, sosial, dan politik.

d) Hanya al-Qur'an dan Sunnah saja sebagai sumber dari pemikiran meraka, ini tidak berarti menyalahkan atau menolak para pendiri madzhab dan imam, tetapi berpendapat bahwa fatwa dan pendapat para imam ini sebagaimana pendapat siapapun juga harus diteliti terus. Berlakunya suatu fatwa pemikiran atau perbuatan hendaklah dimulai dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah.

e) Mereka mensosialisasikan gagasannya tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui media cetak.

f) Menggunakan pendekatan rasionalistik dalam melawan praktek bid'ah dan khurafat.

g) Cenderung menganut paham Qodariyah.

h) Mencontoh cara berorganisasi dari sistem Pendidikan serta pemikiran barat termasuk yang berasal dari misionaris Kristen, selama hal ini tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam.

Kelompok modernis tidak berseberangan dengan tradisionalis atau Nahdhatul ulama, kelompok ini hanya berfokuskan pada perkembangan zaman baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun politik.

3. Liberalis

Kelompok Islam liberal adalah kelompok yang berusaha memisahkan agama dan negara, yang mengakibatkan negara itu tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam liberal adalah kelompok yang menjunjung tinggi nilai kebebasan. Prinsip yang dianut oleh Jaringan Islam Liberal yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. "Liberal" di sini bermakna dua: kebebasan dan pembebasan.

Wacana pemikiran islam liberal di Indonesia pertama kali oleh Greg Barton dalam bukunya yang berjudul Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran neoModernisme Nurcholish Majdid, Ahmad Wahid, Djohan Efendi, dan Abdurahman Wahid) pada 1999. Semenjak itu, wacana pemikiran islam liberal menjadi popular, yang kemudian diteruskan oleh Charles Kurzman dalam bukunya Liberal Islam oleh Ulil Abshar Abdalla yang tergabung dalam organisasi (Jaringan Islam Liberal).

Sebagian tokoh liberal rata-rata mulai berkembang pada 1970-an, karena pada waktu itu, kaum intelektual islam yang mendapatkan pengaruh pemikiran dari Timur Tengah dan Barat mulai muncul seperti Harun Nasution dan Abdurrahman Wahid. Dalam konteks ini keduanya mendapatkan banyak pengaruh dari pemikir liberal Mesir, seperti Ali Abdul Raziq, Rifaat Al-Tahtawi, dan Thaha Husein.

Harun Nasution dan Abdurrahman Wahid memiliki pengaruh paling mendalam dalam penyebaran pemahaman Islam liberal di Indonesia, Harun Nasution sangat berperan dalam penyebaran Islam liberal di IAIN, sedangkan Abdurrahman Wahid memiliki pengaruh yang besar di Nahdhatul Ulama (NU).

Pemikiran Islam liberal pada umumnya selalu dikaitkan dengan Nurchalis Madjid. Peristiwa pertama yang mengaitkan Islam liberal dengan Nurchalis Madjid yang digadang sebagai pencetus Islam liberal adalah pidatonya pada acara silaturahmi Idul Fithri pada tanggal 3 Januari 1970,dan diikuti oleh berbagai macam ormas-ormas Islam. Dalam pidatonya Madjid menyampaikan tentang keadaan umat Islam yang jumud (mendek) akibat terus menerus mengulang keinginan memperjuangkan berdirinya kembali negara Islam melalui partai-partai. Madjid mengusulkan satu jargon yang kontrovesrsial “Islam Yes, Partai Islam No!” ia juga mengatakan umat Islam perlu melakukan “sekularisasi” pemikiran, berpikir bebas dan terbuka. Untuk itu pula diperlukan kelompok pembaharuan yang “liberal”.

Ada banyak sekali faktor yang mendukung semakin berkembangnya pemikiran Islam liberal ini diantarnya: terlibat intelektual-intelektual Islam liberal ini di berbagai lembaga kaderisasi intelektual seperti organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi, juga berbagai ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Selain itu, faktor dukungan dari pemerintah yang memfasilitasi berkembangnya model pemikiran ini juga turut memperkuat tersebarnya pemikiran Islam liberal. Juga tersebarnya ide-ide yang menjadikan pemikiran ini tersebar sehingga memungkinkan pemikiran Islam liberal ini menjadi salah satu pemikiran yang dapat di apresiasi dari berbagai kalangan, gagasan dan ide yang di sampaiukan Nurchalis Madjid sangatlah banyak yang dia berikan kepada kaderisasi HMI, disamping itu juga Abdurraman Wahid sangat berperan dalam memberikan ide-idenya seperti, mengajak kepada Pluralisme Agama, pribumisasi Islam, kesetaraan gender dll.

Charles Khuzman dan tokoh-tokoh islam liberal Indonesia membuat 6 paradigma islam liberal di Indonesia, antara lain meliputi: 1) Kebebasan berpikir, 2) Gagasan kemajuan, 3) Penolakan terhadap teokrasi, 4) Mendorong demokrasi, 5) Pluralisme dan dialog dengan non-muslim, dan 6) Menjamin hak-hak perempuan.

4. Revivalis

Kelompok Islam revivalis adalah kelompok yang hanya berpegang pada AlQur'an dan hadis saja, mereka tidak menggunakan sumber lain dan tidak memerlukan madzhab. Gerakan revivalis ini merupakan awal mula dari kelompok fundamentalis

Pemikiran revivalis ini muncul diakibatkan adanya rasa keprihatinan yang dalam mengenai keterpurukan kaum muslimin. Sehingga hadirlah suatu gerakan pembaharuan yang mencoba mengangkat kembali derajat kaum muslimin. Gerakan mereka terutama berusaha menghindarkan umat Islam dari praktek tahayul dan khurofat dengan cara kembali kepada ajaran sumber utama Islam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai pembeda pemikiran kaum revivalis dengan pemikiran modernis, mereka tidak mendasarkan pembaharuannya kepada konsep-konsep Barat. Tokoh sentral gerakan ini menurut Rahman adalah Ibn Abdul Wahab yang pada tahap selanjutnya menjelma menjadi kekuatan pemikiran besar yang disebut Wahabi.

Awal mula masuknya gerakan revivalis di Indonesia adalah banyak pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di timur tengah. Gerakan revivalis Muhammad bin Abd al-Ahab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan sebagainya yang pemikirannya telah mempengaruhi para pelajar Indonesia yang belajar disana dan kemudian menyebarkannya di Indonesia. Pada masa itu, semangat baca para mahasiswa diorientasikan pada pemikiran-pemikiran pemimpin Ikhwanul Muslimin, seperti Sayyid Quthb dan Abu A'la Al-Maududi, pemikir kenamaan asal Pakistan, ada juga karya-karya pemikir generasi sesudahnya seperti Muhammad Al-

Bahi, Fahmi Huwaydi, Husein Mu'nis, dan Ahmad Salabi. Gerakan revivalisme islam ini memiliki slogan seperti: Is the Best Solution, Islam is Way of Life, Islam Huwa Din Wa Dawlah. Kalimat-kalimat semacam inilah yang kerap dijadikan sebagai motivasi oleh Gerakan revivalisme islam, termasuk di Indonesia.

Kemudian euphoria revivalisme islam semakin membuncah tatkala reformasi bergulir (1998). Hal ini terlihat dari geliat aktivis Gerakan mereka, baik dalam ranah politik maupun sosial kemasyarakatan, yang mulai terang-terangngan menunjukkan wajah aslinya, militan dan radikal. Meski dengan model yang beragam dan warnawarni aksesoris. Menurut Imdadun Rahmat, Gerakan ini hampir hampir diseluruh belahan dunia, mempunyai kesamaan kerangka ideologis. Yaitu secara keseluruhan menganut paham salafisme radikal, yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf. Maksud dari menciptakan masyarakat yang salaf adalah bagaimana menciptakan kembali generasi Nabi Muhammad dan para Shahabat di era

kontemporer ini. Bagi mereka, islam pada masa kaum salaf inilah yang merupakan islam paling sempurna, masih murni dan bersih dari berbagai tambahan atau campuran (bid'ah)

yang dipandang mengotori islam. Menurut kelompok revivalis, islam yang diacu adalah islam yang pernah jaya dalam sjarah peradaban umat manusia, yakni islam klasik zaman Rasul sampai Daulah Abbasiyah. Padahal jika dilihat tentu akan sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial pada waktu itu dan sekarang. Hal inilah yang nantinya menjadi hambatan yang cukup besar bagi gerakan revivalisme islam ini dalam mewujudkan cita-citanya. Karena bukanlah islam harus dimaknai sesuai konteks ruang dan waktunya. Maka dengan demikian, islam yang Shalih Li Kulli Zaman dan maka akan terwujud.

5. Fundamentalis

Fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan umat Muslim konservatif yang berniat mengembalikan nilai fundamental agama dan hidup mirip seperti gaya hidup nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Kaum fundamentalis Islam menggunakan tafsiran harfiah dan orisinalis terhadap sumber-sumber primer Islam (Al-Quran dan Sunnah). Istilah fundamentalisme ini diidentikkan dengan radikalisme, keras, galak, dan lain sebagainya.10

Menurut Shireen T Hunter Secara terminologi, dapat diidentifikasi landasan ideologis yang dijumpai dalam Gerakan-gerakan islam fundamentalis baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain, yaitu: pertama, kansep ad-Din wa al-daulah (agama dan negara). Dalam konsep ini, islam dipahami sebagai sistem hidup total, yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, waktu dan tempat. Pemisahan antara agama (ad-din), dan negara (ad-daulah) tidak dapat diterima oleh kelompok fundamentalis, sehingga agama dan negara dipahami secara integralistik. Kedua, kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam konsepsi ini, umat islam diperintahkan untuk kembali kepada akar-akar islamawal dan praktik Nabi Muhammad SAW. yang puritan dalam mencari keaslian (otentisitas) dan pembaruan secara skriptual dan totalistik. Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Nilai-nilai dan budaya barat diambil sebagiannya, dan yang lainnya ditolak jika tidak sesuai dengan ajaran islam. Oleh karena itu, media massa diupayakan untuk menyebarkan nilai-nilai dan praktik islam yang otentik ketimbang menyebarkan pengaruh-pengaruh budaya asing yang sekuler. Pemahaman ini menyaratkan adanya penegakan keadialan sosial ekonomisehingga doktrin tentang zakat sangat ditekankan. Karena dalam hubungannya dengan kebijakan negara, maka dapat dianggap dapat memajukan kesejahteraan sosial dan mampu memperbaiki kesenjangan kelas dikalangan umat.

Berdasarkan karakteristik-karakteristik yang menjadi platform Gerakan fundamentalis di Indonesia, terdapat beberapa kelompok yang diasumsikan sebagai kelompok islam fundamentalis yang ingin mempengaruhi pemerintahan di Indonesia dan mendorong terbentuknya negara Khilafah. Diantaranya adalah Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal

Jamaah (FKAWJ), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Laskar Jihad, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Wahdah Islamiyah.

6. Transformatif

Kelompok Islam transformatif adalah kelompok yang berusaha menyinergikan pemikiran Islam dengan gerakan sosial, mereka berusaha untuk memanifestasikan nilai-nilai Islam dengan kemanusiaan, nilai-nilai Islam dengan sosial, nilai Islam dengan hak asasi manusia, dll.

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan perubahan sosial (social of change) kea rah yang lebih baik. Rasulullah SAW. dalam sirah kenabian menggambarkan betapa agama islam melakukan transformasi sosial secara besar-besaran kepada masyarakat Makkah yang jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Umat islam senantiasa harus melakukan perubahan dan menjadi pionir untuk melakukan perubahan itu (agent of social). Perubahan dalam masyarakat sering disebut sebagai transformasi sosial. Transformasi memang jalan yang paling manusiawi untuk mengubah sejarah kehidupan umat manusia, sebab dalam proses ini yang berlaku adalah pendampingan dan bukan pengarahan apalagi pemaksaan. Transformasi pada dasarnya juga adalah Gerakan kultural yang didasarkan pada liberalisasi, humanisasi, dan transendensi yang bersifat profetik. Yakni pengubahan sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih partisitif, terbuka, dan emansipatoris.

Sebenarnya jika diruntut dalam cacatan sejarah munculnya tokoh-tokoh yang melakukan transformasi sosial dalam bentuk membangun tradisi intelektual, sekaligus melakukan pembaharuan pemikiran. Baik organisasi kemasyrakatan maupun perorarangan. Organisasi yang dimasud adalah Sarekat Islam (SI yang kemudian menjadi SDI pada tahun 1901) yang didirikan oleh Samanhudi, kemudian Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan (tahun 1912) serta Nahdlatul Ulama' oleh KH. Hasyim Asy'ari (tahun 1926). Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi-organisasi inilah dengan tidak menafikan organisasi yang lain yang kemudian memicu dan membawa angin perubahan terhadap kondisi umat islam di Indonesia.

Materi Strategi Pengembangan PMII

A. Latar belakang

Dinamika

- Orde lama

PMII sebagai organisasi mahasiswa yang juga berdimensi kepemudaan, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan disamping di dunia kemahasiswaan juga dunia kepemudaan. Aktivitas pmii yang patut dicatat disini adalah antara kurun waktu 1965-1968, hal ini penting karena berkaitan dengan lahirnya angkatan baru dalam dunia kepemudaan di indonesia, yang akhirnya angkatan ini dikenal dengan istilah "Angkatan 66".[1]

Keadaan era 1960–an memang sangat kondusif bagi organisasi mahasiswa untuk bersikap politis bahkan partai minded. Meningkatnya jumlah ormas-ormas mahasiswa disertai oleh meningkatnya peran mereka secara kualitas dan terbukanya kesempatan untuk mobilitas sosial di bidang politik.[2] *Pertama*, Ketika terjadi kekacauan dan ketimpangan sosial yang terjadi akibat peristiwa G.30.S/PKI sayap muda NU yang tergabung dalam PMII dan GP Anshor mengutuk dan mengecam tindakan PKI. Sejumlah tokoh muda NU yang cukup berpengaruh kala itu, seperti subchan ZE, Zamroni dan Yusuf Hasyim merupakan tokoh yang aktif terlibat dalam memimpin serangkaian demonstrasi dan rapat akbar yang mendesak agar soekarno membubarkan PKI pada 4 oktober 1965.[3] Disaat yang sama, para tokoh muda dari berbagai ormas berkumpul di rumah subchan ZE di jalan banyumas jakarta. Mereka bertukar pikiran dan mencari formula yang tepat untuk menyikapi peristiwa G.30 S/PKI dan menghasilkan ide yang dimotori oleh subchan ZE dan seorang tokoh muda katolik Harry Tjan Silalahi mendirikan Komando Aksi Pengganyangan Gerakan September 30 (KAP GESTAPU) dengan sasaran bidik PKI.

Selanjutnya aksi masa KAP GESTAPU berlangsung pada 8 oktober 1965 di taman suropati jakarta. Aksi terbuka ini mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Sementara organisasi mahasiswa dibawah naungan PPMI belum juga mengambil sikap yang jelas dan tegas, meskipun sudah didesak oleh ormas-ormas kemahasiswaan yang anti PKI untuk segera mengambil sikap. Sikap diam dan menunggu yang ditunjukkan oleh presidium PMII karena secara keanggotaan didominasi kelompok mahasiswa yang pro PKI yang terimplementasi dalam CGMI dan GMNI ali surachmat[4] memicu kemarahan anggotanya yang pada akhirnya pada 29 desember 1965, PPMI melaksanakan kongres luar biasa dengan agenda tunggal pembubaran PPMI. Pada 25 oktober Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Brigjen Syarief Thayeb mengumpulkan Tokoh-Tokoh berbagai Organisasi Kemahasiswaan untuk membentuk sebuah Organisasi Kemahasiswaan baru pengganti PPMI yang sudah lama vakum. Organisasi itu disepakati bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI dibentuk oleh organisasi mahasiswa yang hadir ketika itu, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Mapancas (Mahasiswa Pancasila), Somal (Sentral Organisasi Mahasiswa Lokal), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Semmi (Serikat

---

[1] Fauzan Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*, (jakarta : Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 1994)

[2] Burhan D, Magenda, *Gerakan Mahasiswa Indonesia dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan*, Majalah Prisma Nomor. 12 Desember 1977

[3] Hasanudin, m shaleh, *HMI dan Rekayasa Azas Tunggal Pancasila* , (yogyakarta : Kelompok Studi Lingkaran 1966) hal 48-49

[4] Cristian bibisono, Aksi Tritura : *Kisah Sebuah Partnership 10 Januari – 11 Maret 1966*.(jakarta : Departemen Pertahanan Keanabab, Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata 1970) hal 1-3

Mahasiswa Muslimin Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), PELMASI (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia), Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), dan Gemsos (Gerakan Mahasiswa Sosialis).[5]

Kedua, pada Penghujung Tahun 1965- awal tahun 1966 merupakan masa terberat bagi perekonomian pemerintahan soekarno. Sejak 23 november 1965 menteri koordinator pembangunan/wakil perdana menteri (waperdam) III Chairul Shaleh mengumumkan kenaikkan harga bahan bakar dari Rp.4 menjadi Rp. 250/liter. Pada 13 desember 1965 menteri itu juga mengumumkan perubahan nilai mata uang (sanering) uang Rp.1.000 menjadi Rp.1 nilai baru.[6] Namun kebijakan itu tidak berpengaruh pada tingginya inflasi yang terus melambung. Tingkat laju inflasi tidak dapat dibendung hingga mencapai 650 persen. Sebagai akibatnya harga barang, termasuk kebutuhan pokok melambung tinggi dan tidak dapat dikendalikan.[7]

Pertemuan KAMI tanggal 9 Januari sepakat untuk mengajukan beberapa tuntutan kepada Presiden Soekarno. Tiga orang wakil KAMl Pusat yaitu, lsmid Hadad (Ikatan Pers Mahasiswa), Saverinus Suwardi (PMKRI) dan Nazaruddin Nasution (HMI) diberi kepercayaan untuk merumuskan tuntutan tersebut. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat sebagai slogan yang terkenal di kemudian hari, disusun oleh tiga konseptor itu. Tiga tuntutan dimaksud, adalah : pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora dan penuruan harga. Rapat akhirnya memutuskan bahwa demonstrasi secara besar-besaran akan dilaksanakan pada I0 Januari 1966.

Aksi-aksi mahasiswa dan pemuda yang dilakukan secara intens selama kurang lebih 60 hari, terbukti melahirkan pemerintahan baru dengan dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966 (SUPERSEMAR).

- Orde baru

  Secara *de facto*, suharto menjadi presiden pasca lahirnya surat perintah yang penuh kontroversial. Setelah surat perintah 11 maret 1966 keluar, Soeharto mengambil kesempatan dengan membubarkan PKI dan penangkapan para menteri yang diindikasikan dekat dengan kelompok PKI. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto kemudian ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya menjadi Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Soeharto secara *de jure* akhirnya resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia setelah sidang umum V MPRS pada 27 Maret 1968 di Gedung Istora, Senayan.

  Perjalanan PMII berikutnya menuntut pada kondisi sosial yang sangat dinamis[8]. Program awal pemerintah orde baru adalah prioritas pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Kedua kebijakan ini sangat terkait, karena untuk kelancaran pembangunan ekonomi dibutuhkan stabilitas politik. Untuk mencapai stabilitas politik, pemerintah orde baru mengambil kebijakan restrukturalisasi partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan orde baru.[9]

  Pada tahun 1970 an pemerintah melalui penanaman modal asing dan pemeliharaan stabilitas politik merasa telah sukses memperbaiki kondisi perekonomian yang porak poranda. Seperti yang dikutip dari arbi sanit dalam pelita I, *Gross National Product* indonesia naik 42% dengan rata-rata 7,5% per tahun. Pendapatan pemerintah tahun 1970 meningkat sebesar 80% dari tahun 1968, sehingga menjadi Rp.334,7 milyar. Ekspor juga meningkat pesat

[5] Dr. Isak purba dkk, *Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan : Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998*, (jakarta: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala Direktorat Nilai Sejarah 2011) hal 9
[6] Fauzan alfas, OP.Cit hal 36
[7] Dr. Isak purba dkk, Op.Cit hal 10
[8] Hifni, Ahmad, *Menjadi Kader PMII*, (tangerang: moderate muslim society 2016) hal 22
[9] Alfas, fauzan, Op.Cit hal 83

yaitu dari USD 864 juta (1968) menjadi USD 1.001 (1970). Pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan meningkatnya penanaman modal asing, pada tahun 1970 diperkirakan sebanyak USD 1,1 milyar yang dilakukan oleh 200 perusahaan asing. Pertumbuhan itu juga semakin menambah keyakinan rezim penguasa bahwa mereka sudah menapaki jalan yang benar. Akan tetapi dilain pihak, mahasiswa merasa bahwa perbaikan dan pertumbuhan itu adalah semu belaka, terutama bersaaam dengan itu korupsi merajalela, dan kesenjangan sosial semakin dalam.

Orde baru juga melakukan penyederhanaan partai. Penyederhanaan dilakukan dengan cara pengelompokkan (*regrouping*) dari sepuluh kontestan pemilu menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok nasionalis yang diwakili oleh partai demokrasi indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari (PNI, murba, Parkindo, dan partai katolik). Kelompok kedua adalah kelompok keagamaan yang diwakili oleh partai persatuan pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari (NU, parmusi, PSII dan perti). Dan kelompok ketiga adalah kelompok karya yang diwakili oleh partai golongan karya (GOLKAR). Dari ketiga partai tersebut, golkar identik dengan partai penguasa, lewat golkarlah upaya politik soeharto mempertahankan kekuasaannya.[10]

Kebijakan pemerintah orde baru tersebut membuat sebuah kekuasaan yang tidak bisa dijamah apalagi dikritisi oleh masyarakat. Bentuk hegemoni pemerintah ini mengakibatkan masyarakat umum dan mahasiswa memiliki ruang gerak yang sempit untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah.[11] Paradigma pembangunan yang paradoksal menjadi karakter orde baru. Partisipasi rakyat dalam ruang publik yang otonom sebagai apresiasi kehendak rakyat dalam proses berbangsa dan bernegara dipangkas habis.[12] Hal itu ditandai dengan praktik pembungkaman sistemik orde baru dilakukan melalui instrumen-instrumen negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) sebagai alat pengawasan.[13] Sistem perundang-undangan dibuat sebagai legitimasi pengawasan negara terhadap warganya. Oleh sebab itu hukum tidak bebas nilai disebabkan karena terbangun oleh kekuasaan politik.

Sentralisasi pengawasan yang dilegitimasikan kepada perundang-undangan berdasar kepentingan yang diinginkan oleh kekuasaan soeharto merepresentasikan proses rezim personal soeharto berjalan dengan mulus. Tindaan represif dengan mengedepankan kekerasan yang berbentuk teror, pembantaian, perlakuan tidak manusiawi dan pengasingan aktivis pro demokrasi menjadi bagian integral dari mekanisme kontrol kekuasaan.

Kesenjangan, ketidakadilan, penderitaan rakyat, korupsi dan manipulasi semacam itu menjadikan konflik antara mahasiswa dan militer tak terbendung. Mulai tahun 1970 an sampai dengan awal tahun 1980 an ditandai dengan peristiwa malari 1974, gerakan anti soeharto tahun 1978 dan penolakan asas tunggal pancasila (awal 1980 an). Peristiwa malari 1974 adalah pelajran yang berharga bagi rezim penguasa bahwa gerakan mahasiswa memiliki implikasi yang signifikan bagi pergeseran peta politik di tanah air. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengebiri gerakan mahasiswa ialah dengan diterbitkannya surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nugroho notosusanto No.028/V/1974 yang memberi peluang birokrat kampus (rektor dan dekan) untuk membina kegiatan non kulikuler mahasiswa.[14] Walaupun dengan terbitya SK tersebut berhasil menggoyahkan keberadaan organisasi

[10] Hifni, ahmad, Op.Cit hal 23
[11] Ibid, 23
[12] Alfas, fauzan, Op.Cit hal 261
[13] Ibid, hal 262
[14] Usman, Sunyoto, arah gerakan mahasiswa : gerakan politik ataukah gerakan moral?, jurnal ilmu sosial dan politik universitas gadjah mada Vol 3, No 2, november 1999 hal 153-154

mahasiswa, namun SK tersebut tidak mampu menggoyahkan pikiran-pikiran kritis mahasiswa.

Tanggal 21 januari 1978, Kopkamtib membekukan dewan mahasiswa semua universitas, dengan merujuk pada pendapat Presiden Soeharto bahwa berbagai bentuk kritik yang disampaikan oleh mahasiswa haruslah dilandasi dengan data yang benar, kemudian tindakan represif selanjutnya dengan surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan daoed yusuf nomor 0156/U/1978 tentang normalisasi kehidupan kampus (NKK). Setahun kemudian menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan lagi surat keputusan No.037/U/1979 yang mengatur bentuk dan susunan organisasi kemahasiswaan[15] yang bertujuan mengontrol kegiatan mahasiswa dari kegiatan politik dan menyatukan keorganisasian mahasiswa dengan kampus melalui rektor dan dekan, sehingga mahasiswa tidak lagi bebas berdiskusi dan mengeluarkan kebebasan berfikirnya, karena rektor dan dekan telah mengontrol organisasi mahasiswa terjun dalam pengalaman politik nasional. Kondisi inilah yang menjadikan organisasi mahasiswa mengalami pendomestikan politik.

Represi pemerintah tersebut kemudian melahirkan format baru gerakan mahasiswa di era 1980-1990 an yaitu munculnya kelompok-kelompok diskusi diluar kampus. Gerakan mahasiswa yang lebih banyak berada diluar kampus ini pula telah menciptakan perubahan pendekatan yang oleh arie sujito dicatat sebagai pergeseran dari elitisme ke populisme, dengan lebih beraliansi mahasiswa-rakyat dari pada mahasiswa-militer atau mahasiswa-birokrat[16]. Benih-benih pikiran kritis yang ditebar melalui kelompok-kelompok diskusi secara perlahan tetapi pasti, ternyata membuahkan hasil yang sangat menakjubkan. Sejak awal tahun 1990 an mereka sudah berani dengan lantang menyuarakan berbagai bentuk penindasan yang terjadi[17]. Dilain sisi memasuki era 1990-an terjadi perubahan konstelasi politik dunia akibat keruntuhan uni soviet yang pada akhirnya mengakhiri perang dingin dan mulai dicetuskan keterbukaan. Konidisi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan politik di indonesia.[18]

Pada sidang umum MPR 1 maret 1998, majelis permusyawaratan rakyat (MPR) secara aklamasi kembali memiliki soeharto sebagai presiden indonesia dengan BJ habibie sebagai wakil presidennya. Sidang umum juga pada 14 maret 1998 mengumumkan kabinet pembangunan VII. Dalam perjalanan selanjutnya, formasi kabinet itu dinilai tidak pro dan tidak mengarah pada perbaikan penanganan krisis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut herakan mahasiswa mulai bermunculan. Aksi mahasiswa terjadi sepanjang bulan mei 1998 yang pada puncaknya pada tanggal 12 mei 1998. Selanjutnya setiba presiden soeharto dari mesir ke tanah air pada 15 mei 1998, soeharto menyatakan mengundurkan diri daro jabatannya.

B. Strategi pengembangan PMII di kampus

PMII merupakan organisasi mahasiswa berbasis kaderisasi yang terdapat di berbagai kampus di indonesia. Sebuah strategi dan langkah pengembangan organisasi merupakan keniscayaan sebagai jalan pilihan yang tidak boleh tidak harus terus dijalankan supaya ruh organisasi tetap hidup. Setiap masa memiliki berbagai problem organisasi yang sangat kompleks dan harus dipecahkan secara akurat dan benar. Tak ada pilihan lain kecuali mendinamisasikan organisasi dengan peningkatan yang prestisius, yakni kaderisasi yang terus menerus berkembang. Pengembangan itu harus progresif dan maju, tidak normatif dan statis.

---

[15] Ibid, hal 155
[16] Sujito, arie, *dari elitisme menuju polulisme: pilihan strategis gerakan mahasiswa era 90-98 (pergerakan melawan kekuasaan)* 1999 hal 178
[17] Usman, sunyoto, Op.Cit hal 156-157
[18] Dr. Isak purba dkk, Op.Cit hal 15

Dalam memahami arah strategi pengembangan PMII, maka harus tetap mengacu pada perkembangan dunia kemahasiswaan dan perguruan tinggi. Oleh karena basis masa PMII berada di dalam lingkungan kampus, maka PMII dan kampus tidak boleh berseberangan.[19] Dalam hal ini beberapa yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. setiap warga PMII harus mendapatkan indeks prestasi (IP) tinggi. Memang pada realitasnya memang tidak semua mahasiswa yang memperoleh IP tinggi lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki IP rendah. Namun kecederungan IP tinggi merupakan cerminan dari sebuah ketekunan, kegigihan dan prestasi mahasiswa pada studi perkuliahannya. Ruang lingkup kampus ialah persaingan intelektual, maka kewajiban peningkatan intelektual mahasiswa menjadi suatu keharusan.
2. Setiap warga PMII harus berprestasi dalam potensi individu masing-masing. Skill dan potensi personal yang dimiliki harus dikembangkan sehingga akan menjadi modal dasar mahasiswa untuk membangun relasi prestasi dengan mahasiswa yang lain. Di era teknologi ini, banyak yang bisa dimanipulasi, termasuk IP, tetapi skill personal yang akan membeberkan semua. Tidak dipungkiri, seorang mahasiswa akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain jika dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.
3. Setiap warga PMII harus merebut simpati mahasiswa dengan menampilkan perangai yang baik da akhlak karimah. Prilaku sangat penting di dalam proses pembelajaran di kampus. Banyak kalangan mahasiswa yang memiliki kemampuan intelektual bagus tetapi memiliki sikap yang tidak baik. Misalnya, tidak baik dalam tata berpakaian, berbicara dan bersikap. Sejatinya warga PMII memiliki prilaku yang mematuhi norma dan etika dalam kampus.
4. Setiap warga PMII harus merebut jabatan-jabatan strategis di lembaga-lembaga kemahasiswaan. PMII mutlak harus memiliki dan menempatkan para kadernya menjadi pemimpin mahasiswa di lembaga-lembaga kemahasiswaan kampus. Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan kader PMII guna mencetak dan memberi sumbangsih terhadap kebijakan sistem kampus. Posisi ini merupakan tempat yang vital dan strategis untuk menjalankan roda kaderisasi PMII. Disamping itu, posisi ini merupakan langkah konkrit PMII untuk memberi andil terhadap kepemimpinan mahasiswa.
5. Setiap warga PMII mutlak harus bisa menulis. Menulis adalah menumpahkan pikiran dan gagasan dari apa yang mereka baca, lihat dan refleksikan terhadap problem sosial. Hal ini pening, mengingat dinamika keilmuan mahasiswa di kampus tidak akan pernah lepas dari kegiatan tulis menulis. Misalkan makalah, skripsi, laporan Kuliah Kerja Nyata dan lain-lain. Apalagi jika harus mengungkap gagasan dikampus, koran harian, penelitian dan sebagainya. Oleh karena itu, menulis merupakan kebutuhan pokok mahasiswa serta jalan paling ampuh untuk menyampaikan gagasan. Di samping itu, dengan membiasakan menulis dapat mempertajam nalar kritis mahasiswa dan analisis terhadap penelitian yang akan ditempuh seperti skripsi, tesis, jurnal maupun disertasi.

C. Strategi pemberdayaan dan pengembangan kader

[19] Hifni, ahmasd Op.cit hal 140-141

Di PMII pendidikan dipraktekkan secara lebih khusus dalam pengkaderan. Melampaui pendidikan, pengkaderan bukan semata-mata hendak menjadikan orang terdidik secara intelektual, berwawasan dan terampil secara teknis. Melainkan juga membekali (tepatnya: mengingatkan) individu atas tugas-tugas *kekhalifahan* yang harus diemban manusia sebagai hamba tuhan (*„abdullah*). Selain itu pengkaderan juga bermaksud membangun keberpihakan individu terhadap masyarakat besar darimana dia berasal. Sehingga pengetahuan dan keterampilan individual apapun yang didapat oleh kader, baik dari PMII maupun dari luar PMII, setelah mengikuti pengkaderan PMII seorang kader diharapkan akan mengabdikan pengetahuan dan keterampilan tersebut bagi kolektivitas. Bukan diabdikan bagi kebesaran dan kejayaan individual. Disini terletak tugas besar pengkaderan PMII.

Bila dirinci kurang lebih ada tiga titik pandangan umum yang hendak dicapai dalam pengkaderan PMII. Pertama membangun individu yang percaya dengan kapasitas individualitasnya sekaligus memiliki keterikatan dengan kolektivitas. Yakni individu yang menemukan kesadaran subyek namun pada saat yang sama tetap berkesadaran primordial (istilah dalam Pendidikan Kritis Transformatif). Sejarah Eropa menunjukkan penemuan subyek dan individualitas sangat mudah tergelincir pada individualisme.

Kedua membebaskan individu dari belenggu-belenggu yang tercipta selama berabad-abad sepanjang sejarah nusantara, tanpa memangkas individu dari sejarah itu sendiri. Kita mengidealkan lahirnya kader yang tidak mudah menyerah oleh tekanan sejarah sekaligus mampu memahami bandul gerak sejarah serta mampu bergerak di dalamnya.

Ketiga, pengkaderan PMII hendak membangun Keimanan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus. Pengetahuan bukan semata-mata olah intelek, melainkan juga pemahaman kenyataan atau medan gerak. Di dalamnya termasuk tatapan kritis atas (sebagai misal) HAM yang telah kita perjuangkan dengan sepenuh hati ternyata bagi Eropa atau Amerika, HAM menjadi semacam alat negosiasi ekonomi. Keimanan penting bukan semata-mata PMII adalah Islam, melainkan dari situlah *élan vitale* dan keyakinan kader terhadap jalan gerakan semakin diperkuat.

Dengan tiga titik tekan di atas dapat dipastikan bahwa PMII tidak dapat mengambil salah satu dari dua model pendekatan pendidikan yang dikenal yakni andragogi atau pedagogi. Bagi intern PMII sendiri, dua pendekatan tersebut dapat digunakan secara bergantian menurut format dan tujuan kegiatan pengkaderan.[20]

Pengembangan PMII

Sistem pengembangan PMII adalah totalitas upaya pembelajaran yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, melatih sikap, memperkuat karakter, mempertinggi harkat dan martabat, memperluas wawasan, dan meningkatkan kecakapan insan-insan pergerakan agar menjadi manusia yang *muttaqin*, beradab, berani, santun, cerdik-cendekia, berkarakter, terampil, loyal, peka, mampu dan gigih menjalankan roda organisasi dalam segala upaya pencapaian cita-cita dan tujuan perjuangannya.

Sistem Pengkaderan PMII mengenal tiga bentuk pengkaderan yang berkait satu dengan yang lain yaitu Pengkaderan Formal (MAPABA, PKD, PKL), Pengkaderan Informal dan Pengkaderan Non-Formal (pelatihan-pelatihan).Secara bersama-sama, ketiganya terpadu dengan suasana dan kebiasaan sehari-hari di lingkungan PMII yang memiliki andil menentukan dalam proses pengkaderan.

Karena diorientasikan untuk membentuk serta mengembangkan karakter, sikap, etika, produktivitas dan kreatifitas para kader, maka pengkaderan bisa dikategorikan sebagai aktivitas asasi dan sekaligus profetik. Terutama dalam upayanya mewujudkan

[20] Abdul aziz, husni, multy level strategi PMII

misi, peran dan fungsi dalam kehidupan pribadi dan organisasi serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Analisis Wacana dan Anaisis Framing

A. ANALISIS WACANA

a. Pengertian Analisis Wacana

Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Dalam studi linguistic, wacana menunjuk suatu kesatuan bahasa yang lengkap, yang umumnya lebih besar dari kalimat, baik disampaikan secara lisan atau tertulis. Wacana adalah rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan proporsi satu dan yang lain, kalimat satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan. Kesatuan bahasa itu bisa panjang, bisa pendek. Sebagaai sebuah teks, wacana bukan urutan kalimat yang tidak memmpunyai ikatan sesamanya, bukan kaliamat yang dideretkan begitu saja

Analisis wacana menurut Paltridge (2012) adalah sebuah kajian yang memfokuskan pada pengetahuan (*knowledge)* tentang kata, klausa, frase, dan kalimat yang dibutuhkan agar komunikasi berjalan secara efektif. Dalam perkembangan selanjutnya Van Dijik (1993) menilai bahwa analisis wacana sebagai suatu metode melihat bagaimana setruktur-struktur dalam teks memiliki kekuatan untuk mewacanakan suatu representasi maupun ideologi dibalik teks.[21]

Menurut Hikam (dalam Eriyanto, 2006:4) yang dikutip Ciptaningsih menyatakan bahwa setidaknya ada tiga pandangan yang berkaitan dengan analisis wacana, yakni pandangan yang diwakili oleh kaum positivisme-empirisme dan pandangan Konstrukstivisme, dalam melihat paradigma analisis wacana.

1. Paradigma Analisis Wacana Formal

Bagi kaum positivisme-empiris, Bahasa dilihat sebagai jembatan yang ada antara manusia dengan hal yang ada diluar diri manusia. Pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan Bahasa tanpa ada hambatan yang dinyatakan secara logis, benar secara sintaksis, dan memiliki hubungan dengan empiris.

Dalam kaitanya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai-nilai yang mendasari sebuah pernyataan sebab yang penting adalah kebenaran pernyataan tersebut. Dengan kata lain, menurut pandangan ini, analisis wacana dilakukan untuk mengetahui kebenaran pernyataan tersebut, baik benar secara semantik maupun sintaksis.

Semantik merupakan cabang linguistic yang mempelajari makna/arti yang terkandung dalam Bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantic adalah studi tentang makna. Sintaksis berarti hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kata-kata disatukan Bersama untuk membentuk frasa-frasa, dan kemudian disatukan untuk klausa atau frasa yang lebih Panjang, klausa lalu dibentuk untuk membuat kalimat. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama.

Tampaknya, pandangan kaum positivisme-empiris tersebut sejalan dengan paradigma analisis wacana bagi kaum formalis yang menghasilkan paradigma analisis wacana formal. Menurut kaum formalis, wacana dipandang sebagai satuan bahasa diatas kalimat. Dengan cara pandang tersebut, wacana dipahami sebagai organisasi

[21] Daniel Susilo, Analisis Wacana Kritis Van Dijk, Unitomo Press, Surabaya 2019 Hal 56

bahasa yang terbentuk dari unsur-unsur yang secara hierarkis lebih kecil tatarannya, yakni berupa klausa dan kalimat. Dengan demikian, mengkaji suatu wacana pada prinsipnya adalah mengkaji hubungan potensial antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam kaitannya dengan sintaksis dan semantik.

2. Paradigma Analisis Wacana Fungsional

Wacana dipandang sebagai bahasa dalam penggunaan. Dengan cara pandang tersebut, wacana dipahami sebagai peristiwa komunikasi, yakni perwujudan dari individu yang sedang berkomunikasi. Jadi, bahasa yang digunakan oleh pembicara dipandang sebagai wujud dari tindakan pembicaranya. Pandangan kedua yang disampaikan oleh Hikam adalah konstruktivisme. Dalam pandangan ini, bahasa tidak lagi dipandang sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan oleh subjek sebagai penyampai pernyataan.

Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Oleh karena itu, analisis wacana diupayakan sebagai suatuan alisis untuk membongkar maksud dan makna tertentu dibalik wacana tersebut. Analisis wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan dengan cara menempatkan diri pada posisi pembicara dengan penafsiran yang mengikuti struktur makna sang pembicara. Perbandingan mengenai analisis wacana dan analisis social adalah anwac lebih menekankan kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan sedangkan ansos lebih kepada mendapatkan gambaran dari situasi social yang terjadi dalam masyarakat, situasi sosial yang dimaksud adalah hasil dari konstruksi social dan interaksi antar individu.

b. Jenis-Jenis Wacana

Jenis wacana dibedakan sesuai dengan sudut pandang wacana tersebut itu dilihat. Jika dilihat dari tujuannya, wacana dibedakan menjadi wacana lisan dan wacana tulis. Dilihat dari penggunaan bahasanya, wacana dibedakan menjadi wacana prosan dan wacana puisi. Sedangkan dilihat dari penyampaian isinya, wacana dibedakan menjadi:

1. Narasi, bersifat mencerminkan suatu topik atau hal.
2. Eksposisi, bersifat memaparkan topik atau fakta.
3. Persuasi, bersifat mengajak, menganjurkan, atau melarang.
4. Argumentasi, bersifat memberi argument atau alasan terhadap suatu hal.

B. Analisis wacana kritis

Analisis wacana kritis bisa disebut sebagai upaya yang menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial Jenis wacana dibedakan sesuai dengan sudut pandang wacana tersebut itu dilihat. Jika dilihat dari tujuannya, wacana dibedakan menjadi wacana lisan dan wacana tulis. Dilihat dari penggunaan bahasanya, wacana dibedakan

menjadi wacana prosan dan wacana puisi. Analisis wacana tidak hanya memandang wacana sebagai Bahasa yang digunakan, tetapi juga Bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi tatanan masyarakat. Singkatanya, pragmatik hanya memandang wacana sebagai tindakan berbahasa, sementara analisis wacana krisis memandang wacana kritis memandang wacana sebagai tindakan sosial.

Hal-hal yang mencirikan sebuah analisis kritis.

a) Tindakan

Karakter penting pertama dalam analisis wacana kritis adalah Tindakan. Wacana tidak dididukn seperti dalam ruangan tertutup dan hanya berlaku secara internal. Dalam karakteristik Tindakan, analisis wacana kritis memandang bahwa wacana memiliki beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang memiliki tujuan apakah untuk mempengaruhi orang lain mendebat, membujuk, menyanggah, memotivasi, bereaksi, melarang dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang diluar kendali atau diekspresikan.

b) Konteks

Guy Cook mengatakan bahwa wacana meliputi teks dan konteks. Teks merupakan semua bentuk Bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, music, gambar, efek suara, citra dn sebagainya. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan memepengaruhi pengakuan Bahasa, seperti partisipasi dalam Bahasa, situsi dimana teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan dan lain sebagainya.

Eriyanto menyebutkan beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Secara umum, konteks tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, jenis kelamin, umur, Pendidikan, kelas sosial, etnik, agama dan banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, settingan tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar.

c) Konteks Sosial yaitu relasi sosial dan latar belakang setting yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar

- Historis

Aspek Historis menjadi salah satu penuntun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Eriyanto menyebut bahawa salah satu aspek yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dengan menepatkan wacana tersebut dalam konteks historis tertentu.

- Kekuasaan

Setiap wacana yang muncul dalam entuk teks, percakapan atau apa pun tidak dipandang sebagai suatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana mengenai seksisme, kekuasaan kaum kulit putih atas kulit hitam atau kekuasaan perusahaan yang berbentuk dominasi pengusaha kelas atas dan bawah. Dalam hal ini, Bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca namun juga bagian dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok professional, agama, komunitas atau masyrakat tertentu.

- Ideologi

Analisis wacana krisis menganalisis ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan Bahasa dan teks lisan dan tulisan. Ideologi merupakan kajian

sentral dalam analisis wacana kritis. Karena teks, percakapan, dan lainya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Wacana dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium oleh kelompok yang dominan untuk mempengaruhi dan mengkomunikasikan kepada khalayak kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga kekuasaan dan dominasi tersebut tampak sah dan benar.

C. ANALISIS FRAMING

Analisis Framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media.[22] Pembingkaian tentu saja melalui proses kontruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan dikontruksi dengan makna tertentu . Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang tentu.

Dalam analisis Framing yang kita lakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Jadi, dalam penelitian Framing yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas/peristiwa dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu. Sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitahukan negative atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang di kembangkan oleh media.

Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai karakteristik yaitu yang menjadi pusat perhatian adalah pembentuk an pesan teks framing, terutama melihat bagaimnaa pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengkontruksi peristiwa dan menyajikanya kepada khalayak. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan memebesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Disini media menyeleksi, menghubungkan dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.[23]

Ada dua aspek dalam Framing, ***Pertama,*** memilih fakta/realitas. Prosess memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dan kemungkinan: apa yang dipilih (*included)* dan apa yang dibuang *(exluded)*. Bagian mana yang ditekankan dalam realitas?, bagian mana yang diberitakan, realitas yang diberitakan, penekanan memilih fakta tertentu, memberitakan aspek tertentu. Intinya, eristiwa dilihat dari aspek tertentu. Akibatnya pemahaman dan kontruksi atas suatu peristiwa tertentu bisa berbeda ntara satu media dengan media lainnya.

Kedua, menuliskan Fakta**.** Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu Ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakanasosiasi terhadap symbol, budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya.[24]

[22] Eriyanto, Analisis Framing konstuksi, ideologi, dan politik media, LKiS Yokyakarta 2002, Hal 7
[23] Eriyanto, Analisis Framing konstuksi, ideologi, dan politik media, LKiS Yokyakarta 2002, Hal 77
[24] Eriyanto, Analisis Framing konstuksi, ideologi, dan politik media, LKiS Yokyakarta 2002, Hal 80-81

MATERI NAHDHATUN NISA'

A. PENGERTIAN NAHDLATUN NISA'

Nahdhatun Nisa berakar dari kata *"Nahdlah"* yang artinya "bangkit" dan *"Nisa'"* yang artinya perempuan. Secara etimmologi Nahdhatun Nisa bermakna kebangkitan perempuan dari masa ke masa yang kemudian gerakannya menjadi pembaharu tanpaa membongkar tradisi yang telah ada di lingkungan tersebut.

Kebangkitan perempuan terlahir ketika pada abad ke 18 ketika mereka menyoroti hak – hak mereka yang diberlakukan secara diskriminatif, dimana posisinya selalu dibawah laki – laki, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan bahkan ekonomi politik. Sehingga pada abad ke – 18 gerakan perempuan itu mulai tergugah untuk menyuarakan hak – nya.

Misi kebangkitan perempuan ini bertujuan untuk memberantas ketidakadilan, kekerasan, subordinasi dan streothype yang selalu menempel pada perempuan. Dalam Sejarahnya sendiri, perempuan Indonesia yang selalu berada dibawah laki – laki dalam mendapatkan hak berpendidikan, kesehatan dan ekonomi politik, yang membuat perempuan Indonesia tergugah untuk menyuarakan hak – nya. Dalam perihal ini, perempuan sebagai madrasatul ula dan harus berbakti kepada suami, tidak boleh melupakan kodratnya.[25]

B. LANDASAN THEOLOGIS DAN HISTORIS NAHDLATUN NISA'

1. Landasan Theologis

Ketidaksamaan perempuan dan laki – laki sekaligus kesetaraan keduanya, didasarkan pada takdir penciptaan mereka yang dibedakan dan disetarakan oleh Sang Pencipta. Realitas ini memungkinkan lahirnya sebuah kehidupan yang sehat dan harmoni, dimana kedua jenis ini bersinergi dalam mengaktualisasikan yang terbaik peran dan fungsi hidup mereka. Hal ini antara lain dimonumentalisasikan dalam Lembaga pernikahan yang menegaskan ikatan suami dan isteri yang disebut dengan *Tazwij* (berpasangan). Sinergi ini dianalogikan dengan penggalan ayat al – Qur'an dalam QS. Al – Baqarah 2: 187 yang berbunyi:[26]

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...[27]

"Mereka (isteri) itu adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamu (suami) pun adalah pakaian bagi mereka (isteri)"[28]

---

[25] Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Hang Out Discussion Materi Kaderisasi* PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jaringan Inti Ideologis. hal. 186.

[26] Asep Dudi S., *Hak – Hak Dasar Perempuan dalam Perspektif Gender Islam (Sebuah Perspektif bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)*, Jurnal Mimbar, Vol XIX, No. 3, Juli – September 2003, Hal. 287.

[27] *Al – Qur'anul Kariim*

[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah,* (Jakarta: Letera Hati, 2002), *hal*. 410.

Pandangan Islam mengenai kedudukan dan peran perempuan diantaranya meliputi berbagai aspek, antara lain:

a. Dimensi Spiritual

Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki – laki itu sama dihadapan Allah, tidak ada di antara mereka yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lainnya. yang dibuktikan dengan ayat al – Qur'an bahwa:

1. Tidak ada salah satu dari mereka yang membawa dosa atau bibit kejahatan seperti doktrin agama tertentu, [29]seperti apa yang ada dalam QS. An – Nisa' Ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (1)[30]

"Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya ; Allah mengembangbiakkan dari keduannya laki – laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama – Nya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturahim. Sesungguhnya [31]Allah Maha Mengawasi kamu".

jika dipahami dari pernyataan وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاء dan tentunya ini baru sesuai jika kata مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ dipahami dalam arti manusia keseluruhan baik laki – laki maupun perempuan.[32]

2. Islam memberikan hak yang sama untuk menentukan keyakinan agamannya. [33]
3. Mereka diciptakan dari satu jiwa.[34]
4. Mempunyai tugas yang sama.[35]
5. Mempunyai tanggungjawab yang sama.[36]
6. Adam dan Hawa secara bersama – sama memikul kesalahan ketika melanggar larangan di surga.[37]

---

[29] Asep Dudi S., *Hak – Hak Dasar Perempuan dalam Perspektif Gender Islam (Sebuah Perspektif bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)*, Jurnal Mimbar, Vol XIX, No. 3, Juli – September 2003, Hal. 288.
[30] *Al – Qur'anul Kariim*
[31] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah,* (Jakarta: Letera Hati, 2002), *hal*. 329.
[32] *Ibid,* hal 331.
[33] QS. Al – Baqarah ayat 256
[34] QS. As – Sajdah ayat 9
[35] QS. Al – Baqarah ayat 30
[36] QS. An – Nisa ayat 124
[37] QS. Al – A'raf ayat 19 – 27

7. Kelebihan di antara mereka bukan karena jenis kelamin, akan tetapi karena prestasi iman, amal dan taqwanya.[38]

b. Dimensi Ekonomi

Langit dan bumi beserta isinya pada hakikanya adalah milik Allah.[39] Maka Allah – lah yang berhak menetapkan peraturan – Nya. Seorang perempuan memiliki hak pemilikan dan penggunakan atas harta yang diperolehnya baik sebelum maupun sesudah mereka menikah. Sesuai dengan ketentuan syara' seorang perempuan yang berhak memperoleh warisan dari orang tuanya, suaminya atau saudaranya.[40]

Bahkan ia berhak atas hadiah atau hibah yang diberikan kepadanya, sedangkan harta hasil usahannya merupakan hak – nya dalam hal pemilikan dan pemanfaatannya, bila diperlukan dengan seizin ahlinya seorang perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumahnya.

c. Dimensi Sosial

Dalam dimensi sosial, adapun hak – hak perempuan yang diperhatikan oleh al – Qur'an dibagi ke beberpa aspek, diantaranya:

1. Sebagai Anak

   Islam melarang untuk melakukan pembunuhan anak perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum pagan Arab pra – Islam.[41] Orang tua tidak boleh membedakan sikap dalam menghadapi kelahiran anak – anaknya baik ia laki – laki atau perempuan.[42] Islam juga menghendaki agar para orang tua mendukung dan menunjukkan sikap yang baik dan adil dalam memperlakukan anak – anak merekaa termasuk anak perempuan. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan orang tua berkewajiban bertanggungjawab atas pendidikan anak – anaknya.

2. Sebagai Isteri

   Dasar pernikahan dalam Islam adalah sakinah, mawaddah dan kasih sayang, bukan dorongan naluri birahi.[43] Seorang perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran pernikahan, mereka berhak atas pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan.[44] Seorang suami bertanggungjawab atas pemeliharaan, perlindungan dan kepemimpinan atas keluarganya (Qiwamah).[45] Apabila persoalan rumah tangga mengarah kepada perceraian sebagai solusi terbaik, maka suami dan isteri sama –

[38] QS. Al – Hujurat ayat 13
[39] QS. Al – Baqarah ayat 284
[40] QS. An – Nisa ayat 7
[41] QS. At – Takwir ayat 8 – 9
[42] QS. An – Nahl ayat 58 – 59
[43] QS. Ar – Rum ayat 21
[44] QS. Al – Baqarah ayat 187
[45] QS. Al – Baqarah ayat 233 dan QS. An – Nisa ayat 19

sama memiliki hak inisiatif untuk mengajukannya. Hak pemeliharaan anak terutama sampai tujuh tahun ada pada ibunya, si anak kemudian dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Islam mengizinkan poligami dengan ketentuan yang ketar serta dengan tidak mengesampingkan hak isteri untuk membuat perjanjian dengan suaminya agar melakukan monogamy.[46]

3. Sebagai Ibu

   Khidmat dan bakti kepada orang tuaa merupakan kewajiban utama setelah penghambaan diri kepada Allah.[47] Ibu dipandang memiliki keutamaan tersendiri dibanding seorang ayah, disebabkan kesukaran mereka dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara anaknya.

4. Sebagai Saudara dalam Iman

   Kaum perempuan dipandang sebgai saudara kembarnya kaum laki – laki sehingga keduanya setara dan saling melengkapi. Secara umum kaum perempuan harus dipergauli dengan baik dan di hormati martabatnya.[48]

d. Dimensi Politik dan Hukum

1. Kesaksian, kesaksian secara umum berlaku sama bagi laki – laki maupun perempuan.[49] dalam konteks tertentu (khash: transaksi finansial) kesaksian dua orang perempuan setara dengan laki – laki.[50] Perbedaan kesaksian antara laki – laki dan perempuan tidak menunjukkan tingkat supperios atau kualitas kesaksian.

2. Partisipasi Sosial dan Politik

   Aturan umum kehidupan sosial politik pada dasarnya melibatkan kaum laki – laki dan perempuan[51]. Seorang perempuan mempunyai hak bicara dan hak suara dalam berbagai urusan, sosial politik, ekonomi atau keagamaan.[52] Sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan terlibat dalam berbagai persoalan masyarakat, seperti pemilihan pemimpin, pembuatan aturan, administrative, lembaga keagamaan dan pendidikan bahkan dalam medan pertempuran.

3. Kepemimpinan

[46] QS. An – Nisa' Ayat 3
[47] QS. Al – Isra' ayat 23 dan QS. Luqman ayat 14.
[48] Asep Dudi S., *Hak – Hak Dasar Perempuan dalam Perspektif Gender Islam (Sebuah Perspektif bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)*, Jurnal Mimbar, Vol XIX, No. 3, Juli – September 2003, Hal. 290.
[49] QS. An – Nuur ayat 6 – 9
[50] QS. Al – Baqarah ayat 82
[51] QS. At – Taubah ayat 7
[52] QS. al – Mumtahanah 60 : 12

Dalam hal kepemimpinan sosial tidak ada pernyataan eksplisit bahwa kaum perempuan dilarang memegang jabatan kepemimpinan; kepemimpinan laki-laki dalam hal peribadatan (shalat) merupakan ketentuan khusus yang tidak bisa dijadikan dasar ketentuan pasti terlarangnya perempuan dalam jabatan kepemimpinan; dalam kepemimpinan negara, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi kepala negara/pemerintahan.

2. Historis Nahdlatun Nisa'

Tahun	Kejadian
1879 – 1904	Dipelopori oleh R.A Kartini Gerakan perempuan masa pra-kemerdekaan Pada masa penjajahan, Perlakuan ketidakadilan yang dialami perempuan Indonesia, khususnya dalam lingkup keluarga, ditulis pada surat-surat kartini dari tahun 1878 sampai 1904 yang dibukukan pada permulaan abad ke-20. Surat-surat kartini banyak berbicara tentang nilai-nilai tradisi (khususnya Jawa) yang cendrung membelenggu perempuan, tergantung pada laki-laki sehingga perempuan menjadi kaum yang tidak berdaya. Kartini menetapkan permasalahan penindasan perempuan pada permasalahan sistem budaya masyarakat. Dan mengecam sistem kolonialisme yang progresif. Strategi perjuangan yang dilakukan oleh kartini untuk mengatasi permasalahan yang dialami kaumnya adalah dengan melalui pendekatan pendidikan. Satu pendekatan yang cukup brilian dalam konteks pada masa itu.
1912	Didirikannya organisasi perempuan tahun 1912 yaitu Poetri Mardika atas bantuan Budi Utomo. Langkah-langkah perjuangan Kartini tersebut ternyata menjadi stimulus bagi perjuangan perempuan di masa-masa berikutnya. Sehingga memunculkan organisasi perempuan yang modern. Tidak hanya Kartini, Dewi Sartika yang kemudian meneruskan citacita mulia Kartini pun ikut mendirikan sekolah khusus perempuan "Kaoetamaan Istri" yang memiliki sembilan cabang di tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi "Sakola Raden Dewi"
1915 – 1920	Sartika juga dijuluki sebagai pahlawan pendidikan Indonesia Gerakan perempuan Poetri Mardika dikatakan sebagai pionir dan diikuti oleh organisasi perempuan yang lain seperti Jong Java Meisjeskring (Kelompok Pemudi Jawa Muda) tahun 1915, dan Aisyiyah (Pemudi Muhamadiyah) yang dibentuk oleh Siti Walidah pada tanggal 19 Mei 1917. Awal kegiatannya mendorong perempuan untuk berani tampil di muka umum. Perhatian khusus diberikan kepada lembaga perkawinan. Setelah itu mulailah bermunculan organisasi-organisasi perempuan seperti Pawijitan Wanita di Magelang (1915), Aisyiyah di Yogyakarta (1917), Wanita Susilo di Pemalang (1918), dan lainlain. Semua organisasi perempuan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk tali persaudaraan demi memajukan harkat martabat perempuan, memberi kesempatan lebih banyak bagi perempuan memperoleh pendidikan, dan mendorong penghapusan ketidakadilan bagi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
1928 – 1946	Pada 1928 dikatakan sebagai titik balik perjuangan perempuan, tepatnya saat diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama di Dalem Djojodipuran , Yogyakarta. Kongres itu diprakarsai oleh tiga tokoh perempuan yang progresif, yaitu Ibu Soekonto

	(Wanita Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Wanita Taman Siswa), dan Ibu Soejatim (Puteri Indonesia). Salah satu keputusan penting adalah terbentuknya federasi Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) Yang pada 1929 mengganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Dan akhirnya berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) pada 1946.
1950 – 1960	Gerakan Perempuan Pasca Proklamasi Peran perempuan di era pasca proklamasi tidak hanya berkutat pada patriarki dan pendidikan saja, namun ke ranah politik juga, sehingga peran perempuan rawan menjadi korban politik. Sorotan pada masa ini adalah Gerwani, organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada tahun 1946, didirikanlah salah satu organisasi perempuan berbasis NU dimana Nyai Djuasih adalah ketuanya pada periode 1950-1952. Meski menjadi sosok perintis Muslimat NU, Nyai Djuaesih tak begitu menonjol sebagai organisator dalam kepengurusan Muslimat. Dia lebih populer sebagai mubalighat dalam kepengurusan Muslimat NU Jawa Barat. "Di dalam Islam bukan saja kaum laki-laki yang harus dididik mengenai pengetahuan agama dan pengetahuan lain. Kaum wanita pun wajib mendapatkan didikan yang selaras dengan kehendak dan tuntutan agama. Karena itu, kami wanita yang tergabung dalam NU mesti bangkit," pidatonya di atas mimbar mantap. Sontak, pidatonya membuat para hadirin terpesona. Dia akhirnya dikenal sebagai sosok perempuan NU yang pertama kali naik mimbar dalam forum resmi organisasi. Isi pidatonya terkait tanggung jawab yang sama dalam organisasi menjadi rintisan pandangan dan cikal bakal lahirnya Muslimat NU.
Orde Baru	Orde Baru Pemerintahan Orba diidentikkan dengan peraturan yang otoriter. Orba menginstruksikan sebuah ideologi gender yang bersifat ibuisme, sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai ibu dan pertisipasi politik sebagai tak layak. Politik gender ini termanfestasi dalam dokumen-dokumen negara seperti GBHN, UU Perkawinan no. 1/1974 dan Panca Dharma Wanita. Pada era ini juga terbentuk organisasi perempuan Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK.
2002	Pundi Perempuan, didirikan di jakarta pada tahun 2002. Organisasi ini bertujuan untuk menggalang dana dan mengelolanya bagi organisasi anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini berkonsentrasi pada permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengembangan sumber daya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
2017	Sejarah Islam juga mencatat bahwa Ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap peradaban ilmu pengetahuan. Ulama perempuan, sama seperti Ulama laki – laki, yang mengemban misi para Nabi untuk berpihak dan membela kaum dhu'afa dan mustadh'afin (lemah dan dilemahkan). Keberadaan dan kehadiran para Ulama sering dijuluki sebagai pewaris para Nabi (*Waratsat al 0 Anbiya*) adalah untuk menebarkan kebaikan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil – 'alamien*) sehingga terciptanya kehidupan yang damai, berkeadilan dan kesetaraan. sebagai menjalankan misi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya penguatan pengetahuan dan keahlian, jejaring antar Ulama perempuan, afirmasi dan apresiasi kerja – kerja mereka, serta pengokohan eksistensi secara kultural, yang mana upaya besar tersebut, sebuah kongres Ulama perempuan

	Indonesia (KUPI) yang diadakan pertama kali di pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon. Organisasi ini berhasil mengeluarkan fatwa atas tiga isu besar, yaitu kekerasan seksual, pernikahan anak dan kerusakan alam.

Adapun perjuangan kamu perempuan yang terjadi di Zaman Rasulullah, yakni antara lain :

1. Khadijah binti Khuwailid

   Khadijah adalah perempuan mandiri, berilmu dan dermawan. Ia merupakan istri pertama sekaligus umat Nabi Muhammad SAW yang setia. Lahir pada 555 Masehi dari keluarga pedagang sukses di suku Quraisy Mekah. Ia banyak belajar ilmu bisnis dari ayahnya Khuwailid bin Asad. Setelah ayahnya meninggal , segera ia mengambil alih tanggung jawab bisnis tersebut. Yang saat itu didominasi oleh pria. Mewarisi ilmu ayahnya Khadijah menjadi salah satu pedagang paling sukses dan dikenal di Mekkah karena kejujuran dan kebajikannya. Dia dikenal sering memberi makan dan memberi pakaian kepada orang miskin serta membantu kerabatnya yang membutuhkan. Sebelum mnikah dengan Nabi Muhammad. Khadijah telah menjanda dua kali karena kedua suaminya meninggal saat suami keduanya meninggal, ia berpikir tidak akan menikah lagi. Namun, ia telah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad. Ia sangat terkesan dengan kejujuran Nabi Muhammad, saat membawa dagangnya ke Suriah. Mereka menikah dengan usia terpaut jauh. Saat itu, Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dalam perjalanan suka duka Nabi Muhammad menjalankan perintah Yang Maha Kuasa, Khadijah dengan setia mendukungnya secara moral dan finansial hingga ia wafat diusia 64 tahun 6 bulan. Kematian Khadijah dikenal sebagai Amul Huzni.

2. Nusaibah Binti Kaab

   Nusaibah Binti Kaab adalah anggota dari suku Banu Najjar di Madinah, yang terkenal karena keberaniannya di medan perang. Namanya sebagai pejuang dikaitkan dengan banyak pertempuran seperti Bait-ul-Aqabah II, perang uhud, dia adalah salah satu tokoh perang yang mengawal dan melindungi Nabi Muhammad. Diceritakan bawa kearah manapun Nabi berada. Nabi dapat melihat wanita tangguh itu mengawal dan melindunginya dari lawan seperti perisai. Dia menderita 12 luka dalam perang Uhud, sebelum ia pingsan ketika ia sadar, hal pertama yang ditanyakannya adalah keselamatan Nabi. Dia juga terlibat pertempuran melawan Musailamah Al-Khadzab, di mana dia kehilangan putranya dan dirinya sendiri menderita banyak luka.

3. Aisyah binti Abu Bakar

   Aisyah dikenal sebagai istri termuda Nbi Muhammad SAW dan salah satu yang paling dicintai. Namun selain itu, aisyah sebenarnya memiliki peran utama dalam politik pada masanya. Dia diketahui telah meriwayatkan 2210 hadits dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi sumber ilmu lain bagi umat islam. Selain Al-Quran apa yang dituliskan oleh Aisyah adalah perkataan dan tindakan religious Nabi Muhammad sehari-hari meliputi berbagai topik termasuk tentang warisan dan ziarah. Setelah Nabi wafat peran Aisyah dalam komunitas Islam meningkat. Dia yang berperan menentang kontruksi Patriarki yang berkembang dengan menyampaikan pidato publik. Setelah kematian Utsman bin Affan sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga, Aisyah memimpin Perang Basra atau dikenal sebagai Perang unta pada 656 Masehi

C. PROBLEM PEREMPUAN DI INDONESIA DAN TUNTUTAN YANG HARUS DIPERJUANGKKAN

Kasus kekerasan dan diskriminasi perempuan di Indonesia masih menjadi hal problematik yang marak diperbincangkan. Seharusnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, namun hal yang terjadi sampai saat ini budaya patriarki masih sering terjadi di Indonesia dan perempuan sering mengalami sexual abuse in women.”Dilihat pada kondisi saat ini kekerasan seksual terhadap perempuan masih dominan terjadi di Indonesia, baik di ranah domestik maupun diluar ranah domestic. Sexual Abuse adalah keadaan dimana pasanganmu memaksamu untuk melakukan sesuatu secara sexual untuk kepuasan dirinya. Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang memayungi setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

KBG (Kekerasan Berbasis Gender) disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dari konstruksi gender yang tidak setara. Maka itu, gender pelaku dan penyintas mempengaruhi motivasi kekerasan dan bagaimana masyarakat merespons atau mengecam kekerasan tersebut. Siapapun bisa menjadi korban KBG, termasuk laki-laki atau kelompok minoritas seksual. Walaupun begitu, dalam konteks KBG, kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi. Secara global, satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual sepanjang hidupnya. KBG bisa terjadi dalam berbagai bentuk:

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Aspek penting

dalam kekerasan seksual: 1) aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. 2) korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).

2. **Kekerasan Fisik**

   Kekerasan fisik adalah tindakan yang (dapat) melukai tubuh, termasuk pembatasan gerak fisik, dan tidak bersifat seksual. Ini bisa dalam bentuk kekerasan seperti memukul, mencekik, atau menggunakan senjata/alat berbahaya, atau lewat tindakan pengabaian yang mengakibatkan sakit atau luka fisik.

3. **Kekerasan Psikis**

   Kekerasan ini dapat berupa tindakan verbal maupun nonverbal yang menyerang secara mental atau emosional, misalnya intimidasi, pengrusakan barang, dan pelecehan seksual secara verbal.

4. **Kekerasan Sosial dan Ekonomi**

   Kekerasan ini dapat berakibat pada penelantaran ekonomi atau pemiskinan dari korban. Kekerasan sosial atau ekonomi terjadi ketika perempuan atau kelompok rentan lainnya terkondisi memiliki akses yang terbatas atau tidak mendapatkan akses pada pendapatan, layanan, keuangan, aset, dan kesempatan untuk memperbaiki tingkat sosial dan ekonomi mereka. Beberapa contohnya adalah diskriminasi, terhalangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang digaji, atau peniadaan kepemilikan, termasuk penelantaran. Kekerasan jenis ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga, komunitas, masyarakat, organisasi, atau bahkan institusi pemerintah.

5. **Kekerasan Berbasis Gender Online**

   KBG yang membludak pada saat pandemi Covid – ’19 belum berakhir sampai detik ini, karena masyarakat masih kesulitan dalam memulihkan kehidupannya, terkhusus dalam aspek ekonomi. Dimana pasca pandemi covid – ’19 masih maraknya kejadian KBG di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di satu sisi peningkatan pelaku KBG yang semakin besar pada masa pandemi covid – ’19 kemungkinan disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), berkurangnya pendapatan, serta berbagai situasi stres lainnya di dalam rumah. Sebagai tambahan, kesulitan dan keengganan kita (terutama laki – laki) untuk mencari pertolongan kesehatan mental di tengah kesedihan dan frustasi selama pandemi, meningkatkan potensi untuk menjadi pelaku KBG. Banyak yang melampiaskan permasalahannya dengan kekerasan online seperti halnya meminta foto/video yang tidak semestinya. Namun karena sudah ada perlindungan secara online, maka dari itu tidak perlu ragu untuk mencari bantuan kesehatan mental jika kita memerlukannya. Namun di sisi lain, perempuan masih marak dijadikan objek KBG, bahkan tanpa melihat umur dan siapa yang dijadikan objek tersebut.

Mempertimbangkan problematika tersebut, banyak tuntutan – tuntutan yang harus diperjuangkan saat ini, yaitu menciptakan ruang aman bagi perempuan. Kasus tersebut kita dapat belajar untuk peduli dan tidak menutup mata pada korban kekerasan seksual apapun alasannya, terdapatbanyak cara untuk membantu menciptakaan ruang aman salah satunya dengan menjaga privasi informasi, perempuan yang menjadi korban kekerasan sangat rentan terhadap ekspos media, tidak jarang korban mengalami ancaman atau pelecehan privasi secara daring, sejak masa pandemi kasus KBG daring/online meningkat drastis.

Kita dapat memulai membantu membuat ruang aman untuk perempuan dan korban kekerasan khususnya dalam ranah mahsiswa yaitu dengan :

1. Menyebarkan konten/tanggapan yang positif pada kasus KBG, mengingat trauma yang dialami oleh korban kita bisa membantu dengan memberi dukungan.
2. Respon positif kita untuk menciptakan ruang aman untuk korban dengan saling mendukung (*girls support girls*).
3. Mengedukasi diri atau pengguna lain, bisa dilakukan dengan membuat seminar pengetahuan tentang Gender sehingga tidak ada respon klise seperti menyalahkan korban (*Victim Blaming*) atau pemikiran bahwa topik tersebut adalah hal yang tabu. Pandangan tersebutlah yang menjadi faktor penghambat isu kesetaraan gender, dimana budaya/paradigma beberapa masyarakat masih menetapkan pandangan bahwa perempuan atau anak – anak dianggap rentan / lemah sehingga menambah tantangan bagi perempuan, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukum/keraguan pada hukum, diskriminasi, dll.

D. ASWAJA SEBAGAI SPIRIT GERAKAN PEREMPUAN

Berdasarkan kurikulum Pengurus Besar Kopri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terdapat tiga pilar yang harus diperjuangkan oleh kader putri. *Pertama*, ***Al – Khuriyah*** **atau Pembebasan (Kemerdekaan)**, kader puteri harus mempunyai dasar dan mental yang kuat untuk membebaskan dirinya sendiri terlebih dahulu, bebas dari kebodohan, kejumudan, dan *Taqlid* terhadap teks – teks yang mengurung untuk berdzikir, berfikir, dan beramal shaleh lebih luas lagi. Setelah itu, kader puteri harus memberikan dampak positif untuk menyumbangkan pikiran dan jiwanya lebih luas lagi, yaitu dengan mengamalkan ilmu dan pengetahuannya untuk terbentuknya tatanan sosial yang adil dan makmur. *Kedua*, ***Al – Adalah*** **atau Keadilan**, adil sejak dalam pikiran maupun perbuatan. Itulah respresentasi dari ASWAJA yang tidak hanya dimaknai sebagai *Manhaj al – Fikr*, namun juga *Al – Harakah* maupun *As – Siyasah*. *Ketiga*, ***Al – Musawwamah*** **atau Kesetaraan**, yang dimaksud disini adalah kesetaraan kesamaan hak untuk mendapatkan ruang dan akses pu0blik untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan seluas – luasnya.

ASWAJA KOPRI hadir bukan hanya hadir berdimensi spiritual, akan tetapi harus mampu tampil sebagai narasi yang bisa memberikan solusi untuk bangsa. Seperti, penyanddaran budaya patriarki, kapitalisme pasar, imperialisme atau penjajahan gaya baru, dan fasisme religious atau pemasungan hak – hak perempuan dengan dalil agama, sehingga muncul tafsir misogenis. Tidak kalah penting untuk terwujudnya misi Nahdhatun Nisa', kader KOPRI juga harus melek dan cakap dalam dunia literasi sebab kita tidak dapat membendung perubahan monopoli zaman yang kerap disalahgunakan. Kader KOPRI harus turut mengambil peran membendung isu – isu yang menggelembungkan ketidak harmonisan islam dan Indonesia karena asas dari kopri adalah Pancasila, serta kontribusi untuk menyampaikan pesan dan gagasan perubahan dengan matang melalui media massa maupun media sosial. Oleh karena itu cakap dalam orasi, literasi dan aksi adalah rumus untuk mewujudkan Nahdlatun Nisa' dapat lahir dari Rahim KOPRI.

FORMAT POLITIK & EKONOMI INDONESIA

A. Pendahuluan

Hubungan antara ekonomi dan politik ibarat dua sisi uang logam yang saling berpengaruh. Untuk mengetahui hubungan pengaruhnya diperlukan kajian dari dua sisi yang berbeda, sisi ekonomi dan juga sisi politik. lmu politik dan ilmu ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai (koalisi). Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada dia dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Hubungan antara ekonomi dan politik adalah, ekonomi berkaitan dengan pengalokasian sumber daya di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan politik berkaitan dengan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dlam suatu negara. Sehingga kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja yang mana pengalokasian sumber daya di dalam masyarakat dipegang oleh kekuasaan pemerintah (politik).

Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara/wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam (hutan, tanah, air dll), SDM, dan modal. Beberapa literatur memasukan teknologi dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan sebagai sumber daya.

Definisi Sistem Politik

Sistem berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "*systema*" berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan *(a whole).* Dalam perkembangannya, istilah itu mengalami pembiasan sehingga memiliki banyak arti, bergantung pada objek dan cakupan pembicaraannya. Akan tetapi, setiap definisi mewujudkan gagasan dari sekelompok objek atau unsur yang berada dalam hubungan struktural dan karakteristiknya masing-masing yang satu dan lainnya berinteraksi pada dasar karakteristik tertentu.

Sistem dapat pula diartikan lebih tinggi daripada cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten, serta sering bersifat otomatis *(servo-mechanism).*

Beberapa ahli yang mengemukakan definisi sistem, antara lain sebagai berikut.

1. Menurut *Campbell* (1979: 3), sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.

2. *Awad* (1979: 4), sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu.
3. *Konontz* dan *O. Donnell* (1976: 14), sistem bukan wujud fisik, melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin, dan lainnya.

Dengan demikian, sistem harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi komponen, seperti relevansi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi, dan tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau negara.

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang artinya negara-kota. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (*kebaikan*, menurut *Aristoteles*) dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik.

Menurut *Delian Noer* (1983: 6) "politik adalah … segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat".

Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu dari macam-macam definisi mengenai politik itu mengandung konotasi kebijakan, kekuasaan, negara, konflik, pembagian, dan keadilan. Sedang pendefinisian dilihat dari aspek hakikinya: metode pembahasannya, aspek kemungkinan yang ada dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal diatas, *Dr. Kartini Kartono* (1989: 5) melihat definisi politik dari dua aspek yaitu: dari struktur dan kelembagaan, politik dapat diartikan sebagai berikut: (1) segala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan pemerintah, undang-undang, hukum, kebijakan (*policy), beleid* (:aturan) dan lain-lain); (2) pengaturan dan penguasaan oleh negara; (3) cara memerintah suatu toritorium tertentu; (4) organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintah untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal.

Kemudian aspek kedua pengertian yang lebih dinamis dan fungsional operasional mengenai politik adalah sebagai berikut:

1. Semua keputusan dan penetapan mengenai susunan masyarakat bagi masa mendatang (*Bram Peper* dan *Willem Walters)*;
2. *The common decision of men and women about their own tate (*Deutsch);
3. Aktivitas dan proses dinamis dari tingkah laku manusia dengan menekankan aspek-aspek politik dari masalah sosial;
4. Aktivitas untuk menegakkan atau mengubah kondisi sosial yang sudah ada dengan menggunakan kekuasaan;
5. Semua usaha dan perjuangan individu serta kelompok dengan menggunakan macam-macamalat, cara dan alternatif tingkah laku untuk mencapai satu tujuan terbatas sesuai dengan ide individua tau ide kelompok dalam satu sistem kewibawaan yang integral (*Kartini Kartono: 5)*.

Dalam pengertian terakhir ini, politik bukan lagi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan negara saja, sebab konflik-konflik, ketentuan, ketetapan, gejala, dan masalah-masalah sosial tertentu bisa juga bersifat politis atau dapat dijadikan masa politik.

Dalam hal ini *Deutsch* (dalam *Kartini Kartono*, 1989: 6) mengatakan bahwa :"*Politization is making things political* (politisasi adalah membuat segala sesuatu menjadi politik)". Tidak dapat dihindari di kehidupan masyarakat suatu masalah akan berubah menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkan persoalan sosial, disebut sebagai aktivitas politik, dan pula sebaliknya menggagalkan usaha pemerintah ikut campur dalam memecahkan satu masalah sosial disebut juga aktivitas politik.

Definisi Ilmu Ekonomi

Istilah 'ekonomi' berasal dari bahasa Yunani *oikosnamos* atau *oikonomia* yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khusunya penyediaan dan administrasi pendapatan (Rahardja & Mandala, 2008). Secara singkat, ekonomi dapat diartikan peraturan rumah tangga. Maksud rumah tangga disini adalah meliputi perseorangan (keluarga), badan usaha atau perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan sebagainya.[53]

Sedangkan ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat untuk menentukan pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan masa akan

[53] Bonaraja Purba, Eko Sudarmanto, Ahmad Syafii, Nur Arif Nugraha, Nur Zaman, Madya Ahdiyat, Ariyanto Umarama, *Ekonomi Politik : Teori dan Pemikiran,* Yayasan Kita Menulis, 2020, hal. 15.

datang pada berbagai individu dan masyarakat (Sukirno, 1994). Samuelson & Nordhaus (1990) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam melakukan pemilihan bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas serta mempunyai berbagai alternatif penggunaan, untuk menghasilkan berbagai komoditas produk dan menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, ilmu ekonomi dapat juga disebut sebagai ilmu pilihan, karena ilmu ekonomi mempelajari cara orang melakukan pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi berbagai komoditas yang diperlukan oleh masyarakat.[54] Jadi pada hakikatnya ilmu ekonomi merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dalam rangka mencapai kemakmuran, dengan cara memilih beberapa sumber daya produksi yang sifatnya langka.

Dari sudut pandang fundamental dan historis, menurut Samuelson & Nordhaus (1990) ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi positif terbatas membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang ada dan terjadi dalam ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi *normative* membahas tentang pertimbangan nilai dan etika, misalnya dalam sistem perpajakan sebenarnya adalah suatu dorongan yang mengarah pada suatu kaidah mengambil dari yang kaya untuk menolong dan membantu yang miskin dan tidak mampu.

Teori Ekonomi Mengenai Kepolitikan

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas maka ekonomi politik dapat didefinisikan bahwa, ekonomi politik merupakan suatu ilmu yang menkaji tentang berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara dan penyelesaiannya dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*driven force)* untuk memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi.[55] Hubungan antara ekonomi dan politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat keterkaitan kedua disiplin ilmu tersebut). Artinya sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (*cross fertilization)* yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi atau disiplin politik saja (Deliarnov, 2006).

[54] *Ibid.*
[55] *Ibid.,* 21.

Pengambilan keputusan dalam ekonomi cenderung berdasarkan efisiensi, sedangkan pengambilan keputusan politik lebih menekankan kesamaan antar pelaku politik dalam mengambil keputusan. Di satu pihak, pelaku politik terdiri dari para politisi, partai politk, dan pemerintah, sedangkan di pihak lainnya rakyat sebagai konstituen. Dalam hal ini para politisi dan partai politik akan menawarkan berbagai program kepada rakyat, selanjutnya rakyat yang menginginkan suatu perubahan sesuai program tersebut menyalurkan aspirasinya kepada para politisi dan partai politik.[56]

B. Sistem Pemerintahan Negara dan Bentuk Negara

Sistem Demokrasi

Demokrasi, seperti halnya konsep-konsep politik terapan lainnya seperti kekuasaan, negara dan birokrasi, merupakan sebuah istilah yang paling dekat dengan pemahaman masyarakat umum, tetapi sebenarnya mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu.[57] Keterbatasan pertama, karena sifat keumumannya, demokrasi yang merupakan konsep politik Barat sudah dianggap pasti (*taken for granted)* sebagai cara terbaik dalam membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini.

Kecenderungan menerima begitu saja proses demokratisasi, yang disertai dengan slogan-slogan yang akrab di telinga masyarakat umum seperti reformasi, keterbukaan, dan semacamnya, mengabaikan kita dari bersikap kritis. Pengalaman tertekan selama empat dekade di bawah pemerintahan otoriter-Orde Lama dan Orde Baru[58]-tampaknya mendorong bangsa Indonesia untuk dengan tangan terbuka menyambut era demokratisasi.

Sebaliknya, demokrasi yang bersumber dari pemikiran politik Barat ini perlu juga direnungkan dan dikaji secara ilmiah. Sebab, sebagai satu paham, demokrasi bersumber pada prinsip kebebasan individu (*individualisme)* yang tumbuh dan hidup subur di negara-negara Barat sejak abad ke-17[59] yang lalu, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, antara lain sebagaimana yang dicatat Carol C. Gould. Ini berarti, demokrasi belum tentu efektif apabila diterapkan untuk bangsa-bangsa non-Barat seperti Indonesia yang pada umumnya masih berdasarkan pada prinsip kekeluargaan atau kebersamaan.

Gagasan tentang demokrasi bermula dari negara-negara Barat, khususnya Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Istilah itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer

---

[56] *Ibid.*

[57] Zulfikri Suleman, "*Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta", PT Kompas Media Kompas, 2010, hal. 01.*

[58] Zulfikri Suleman, *op. cit.,* hal. 02.

[59] Carol C. Gould mencatat dua kelemahan individualisme. Pertama, individualisme menempatkan manusia sebagai makhluk yang asosial dan egoistis, yang motivasi utamanya dalam bertindak hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Kedua, dengan mengutamakan penumpukan kepemilikan pribadi, dan dijamin oleh Negara, individualisme membenarkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat; lihat Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali,* terj. (Yogyakarta: Penerbitan PT. Tiara Wacana), 1993, hal. 4.

bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau kekuasaan pemerintah oleh rakyat, menunjuk pada praktik demokrasi langsung di negara kota Athena, 26 abad yang lalu. Meskipun Thomas Meyer mengemukakan, praktik demokrasi juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat-masyarakat tradisional di Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara, demokrasi-dalam arti demokrasi modern-lahir sebagai hasil pergulatan pemikiran para pemikir Barat sejak masa Renaissance di abad ke-15, berkembang lebih lanjut selama masa Pencerahan (*Enlightenment)* di abad ke-17, yang diikuti dengan penerapannya di abad-abad selanjutnya pasca-Revolusi Amerika tahun 1776 dan pasca-Revolusi Perancis tahun 1789. Gagasan tentang demokrasi ini kemudian menyebar ke bagian dunia yang lain, negeri-negeri terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sebagai hasil perkembangan sejarah negara-negara Barat sebagai kekuatan kolonial imperialistis di masa-masa selanjutnya.

1. Demokrasi Indonesia

Masyarakat asli Indonesia adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung di pulau-pulau di nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan-satuan kehidupan kecil. Masyarakat asli ini memiliki seperangkat nilai mental dan moral yang bersifat homogen, struktural dan kolektif. Begitu juga, masing-masing satuan kehidupan terkecil ini memiliki sistem nilai budaya sendiri. Yang terpenting dalam konteks ini adalah kehidupan masyarakat di satuan terkecil ini berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi secara langsung sebagaimana terdapat di negara-negara kota Yunani Kuno 25 abad yang lalu[60].

Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivisme (*collectivism)* yang hidup dalam sanubari setiap anggota maasyarakat asli ini, di mana kehidupan seseorang dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, kolektivisme ini mewujud dalam sikap saling tolong-menolong di antara sesama anggota masyarakat desa dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, seperti saat mengerjakan sawah, membuat rumah atau mengurus orang meninggal. Sartono Kartodirdjo menyebut tolong-menolong ini sebagai bentuk "solidaritas khas masyarakat agraris tradisional"[61].

Dalam semangat kehidupan berdasarkan tolong-menolong dan gotong-royong ini, tumbuh dan berkembang sikap saling menghargai di antara sesama anggota masyarakat, yang selanjutnya adalah kebiasaan berkumpul bersama atau berapat untuk memusyawarahkan sesuatu yang menyangkaut kepentingan bersama. Hasil dari

[60] Zulfikri Suleman, *op. cit.,* hal. 184.

[61] Sartono Kartodirdjo, *"Gotong-Royong: Saling Menolong dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia",* dalam Nat J. Colletta dan Umar Kayam (peny.), *Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan terhadap Antropologi Terapan di Indonesia* (Jakarta; Yayasan Obor), 1987, hal. 254.

musyawarah ini adalah mufakat atau kesepakatan tentang jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah. Dengan demikian, kolektivisme dalam masyarakat asli Indonesia berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini jelas berbeda dengan kebiasaan yang berlaku dalam sistem demokrasi Barat yang individualistik, dimana pengambilan keputusan didasarkan pada pemungutan suara yang mengandung prinsip kalah-menang, bukan semangat kebersamaan.

Kolektivisme dalam masyarakat asli Indonesia melahirkan tiga ciri : rapat/musyawarah, mufakat dan tolong-menolong. Dua ciri pertama berhubungan dengan cara-cara mengambil keputusan mengenai kepentingan bersama, sedangkan ciri ketiga berhubungan dengan cara mengatasi masalah bersama. Ketiga ciri ini dilandasi oleh semangat kebersamaan di mana eksistensi dan martabat setiap warga diakui sepenuhnya. Cara ini berbeda misalnya dengan cara pengambilan keputusan dalam masyarakat yang otokratis atau feodal, di mana eksistensi dan martabat rakyat kecil diingkari oleh penguasa atau dalam pengambilan keputusan demokrasi Barat yang berdasarkan pemungutan suara yang bersifat menang-kalah *(zero sum game).*

Disamping tiga ciri di atas, dua lagi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat asli Indonesia. Pertama adalah kebiasaan melakukan protes bersama terhadap peraturan penguasa yang dianggap tidak adil atau memberatkan atau penguasa justru bersikap tidak peduli terhadap kepentingan rakyat. Kedua adalah kebiasaan menyingkir dari daerah kekuasaan penguasa,-suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tradisional di Minangkabau dan Bugis. Dengan demikian, masyarakat asli Indonesia di berbagai bagian nusantara di masa lalu memiliki lima ciri kehidupan yang sudah mentradisi secara turun temurun. Kelima ciri tersebut mencerminkan kebersamaan dan nilai-nilai demokrasi di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi dan sosial[62].

Konsep demokrasi ini, menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme, karena dalam perkembangannya di kemudian hari, kaum pemodalah yang menguasai dan memanfaatkan demokrasi seperti ini. Hak politik harus berada di tangan rakyat. Supaya rakyat bisa mengembangkan hak demokrasinya, secara sadar juga perlu ditumbuhkan kekuatan pengimbang guna mencegah dominasi kaum kapitalis dan feodal. Dalam kaitan inilah perlu adanya, *pertama*, kebebasan berserikat dan berorganisasi. Tumbuhnya organisasi perlu sebagai kekuatan pengimbang bagi kelompok pemodal, kelompok bersenjata, dan kelompok yang mendominasi masyarakat politik. Dominasi kelompok cenderung bergeser ke jurusan

[62]Zulfikri Suleman, *op.cit*., hal. 187-189.

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Untuk mencegah ini harus ada kekuatan pengimbang dan untuk inilah perlu dijamin kebebasan berorganisasi[63].

Kedua, kebebasan menyatakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Pemaksaan pendapat harus dicegah agar masyarakat tidak tetipu oleh informasi yang cenderung bersifat indoktrinisasi. Ketiga, hak sanggah secara masal yang memang sudah dikenal masyarakat desa di jawa, dilakukan tanpa kekerasan. Keempat, pembangkitan semangat gotong royong, rasa bersama, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu. Kelima, pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat dan bahwa, dengan membuka aksesibilitas rakyat kecil pada pengelolaan sumber daya alam, juga membuka aksesibilitas rakyat kecil pada sumber pembiayaan berupa modal dan kredit perbankan, serta membuka aksesibilitas pada fasilitas pendidikan, kesehatan, pengembangan kapasitas teknologi, pemasaran dan modal buatan manusia.

Dengan adanya kelima pokok tersebut, demokrasi politik akan tumbuh berimbang dengan demokrasi ekonomi yang terjalin dalam demokrasi ini. Medan kerja yang dihadapi rakyat yaitu, adil dan berimbang dengan adanya dorongan kebijakan pembangunan yang memberi pengutamaan, informasi, dan perlindungan bagi mereka yang lemah dan miskin. Tetapi rakyat harus mengingat bahwa demokrasi adalah bagian dari kedaulatan rakyat, demokrasi tidak bisa berjalan apabila tidak didukung oleh rasa tanggung jawab dari rakyat dan sifat toleransi. Sehingga akan terbentuk sebuah demokrasi yang sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan, demokrasi yang utuh, yaitu demokrasi di bidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung paham individualisme.

2. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah sebuah konsep mengenai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, konsep ini diterjemahkan pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Pada Pasal 33 yang mengatur perekonomian, tetapi juga mejamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan keadilan sosial. Jadi ciri-ciri ekonomi kerakyatan mempunyai akar sejarah yang dalam dan kuat. Ekonomi kerakyatan ini mengandung tiga unsur, yaitu populis,[64] berkeadilan sosial, dan demokratis. Dengan adanya demokrasi ekonomi, bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu sebagai mana yang dibolehkan dalam sitem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, demokrasi ekonomi identik dengan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu. Dapat dikatakan, demokrasi ekonomi sama dengan tidak adanya kesenjangan ekonomi atau terwujudnya keadilan

[63] Mohammad Hatta, *Mendayung Di Antara Dua Karang*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia, 1948, hlm. 50.

[64] *Populis* artinya perhatian yang dominan diarahkan untuk membrantas kemiskinan rakyat banyak. Sarbini Sumawintata*, Sejarah Ekonomi Kita Sejarah Tanpa Perubahan*. Prisma No.8 Th XII, hal. 52.

ekonomi dalam masyarakat. Sarana untuk menghapuskan kesenjangan ekonomi tersebut adalah koperasi.[65]

Dalam UUD 1945 juga diungkapkan dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorang, sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang dimaksud asas kekeluargaan itu ialah koperasi.[66] Kunci untuk menjamin berfungsinya koperasi, yakni sifat kekeluargaan, sarana untuk memakmurkan masyarakat. Istilah ini digunakan untuk menunjukan pada hubungan antara anggota koperasi, yaitu hubungan persaudaraan yang dicirikan oleh rasa solidaritas yang kuat. Apalagi perasaan persaudaraan sudah tumbuh dan kuat, usaha untuk memajukan koperasi melalui semangat individualitas akan dilihat sebagai usaha bersama dan untuk kepentingan bersama. Dengan hal itu, memadukan kolektivisme dengan paham individualisme,-yang hanya memakmurkan orang-perorang.

Untuk mencapai semua tujuan demokrasi ekonomi, Pasal 33 telah mengatur pembagian pengelolaan ekonomi nasional. Pertama, negara yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai sumber daya alam, yang penguasaan itu semata-mata dimaksudkan unutk memakmurkan rakyat.[67] Kedua, koperasi menguasai sektor ekonomi kerakyatan yang dijalani oleh sebagian besar rakyat indonesia, meskipun tidak disebutkan pada Pasal 33 UUD 1945, (Moh. Hatta) menyebutkan pihak swasta sebagai pelaku ekonomi yang ketiga, yang menguasai kegiatan-kegiatan ekonomi diantara yang dikuasai oleh negara dan yang dikuasi koperasi, yang dianggap masih cukup luas[68]. Sebab itu, dalam keadaan kekuarangan kemakmuran pada rakyat sekarang, yang terpenting ialah bagaimana mengatasi kekurangan ini dalam waktu yang singkat.

Oleh sebab itu, politik kemakmuran harus dapat memisahkan politik perekonomian dalam jangka *panjang* dan politik perekonomian dalam jangka *pendek*. Antara dua cabang politk kemakmuran itu harus ada kordinasi, dan perhubungannya. Politik jangkan panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Oleh karena itu, koperasi bisa subur di atas pangkuan masyarakat yang bersemangat untuk membangun koperasi. Maka usaha untuk menghidupakan dan menumbuhkan semangat koperasi itu ialah tugas yang paling utama. Usaha ini menghendaki waktu, kesabaran dan keyakinan yang tak kunjung goncang.

---

[65] Zulfikri Suleman*, op.cit*., hal. 216.
[66] Emil Salim, *Sistem Ekonomi Pancasia*, Prisma No. 5 Th VIII, hal. 6-7.
[67] *Ibid.*
[68] Zulfikri Suleman*, op.cit*., hlm. 217.

Selain tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang, perlu adanya kemakmuran berjangka pendek, yang realisasinya bersandar kepada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan dari pada ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan mengecilkan kekurangan kemakmuran, tindakan tersebut juga harus dilakukan. Dilakukan oleh mereka yang sanggup menjalankannya. Jalan yang akan dirintis memanglah sukar dan sulit, walaupun di sebelah koperasi terdapat bangunan-bangunan perusahaan yang berpedoman pada keuntungan dan berdasarkan inisiatif-partikulir, diawasi atau tidak oleh negara.

Adapaun usaha-usaha partikular itu adalah sesuai dengan keadaan masa, berkenan dengan tujuan kemakmuran dalam jangka pendek. Selama negara dan koperasi belum lagi mempunyai alat untuk memimpin ekonomi nasional, inisiatif-partikulir itu memenuhi tugasnya dalam masyarakat untuk menghidupakan ekonomi dan membuka mata pencaharian bagi rakyatnya, yang termasuk golongan yang tidak mampu. Tetapi dalam hal tersebut pemerintah harus bisa mewaspadai adanya perusahaan-perusahaan partikular itu yang memenuhi tuntunan ekonomi, yang akan menyebabkan merosotnya perekonomian dan mengurangi kekurangan kemakmuran. Tugas pemerintah dalam masalah ini, pemerintah harus melindungi ekonomi rakyat yang lemah dari pada tindasan ekonomi asing dan memperbaiki dasar pembagian hasil, produk sosial, dengan memperbanyak bagaian yang jatuh kepada kaum petani dan buruh.[69]

Demokrasi ekonomi yang menciptakan keadilan sosial, tampaknya sangat mempengaruhi pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi yang sifatnya makro maupun mikro. Demokrasi ekonomi ini juga menjadi landasan pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional. Menurut pandangan Hatta, pembangunan ekonomi nasional terbagi menjadi dua cara yang sangat utama yaitu, pertama, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang-sedang biasanya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang berangsur-angsur, dari mulai yang kecil, sedang, menjadi besar, dari pertukangan atau kerajinan menjadi industri. Kedua, pembangunan dengan sekala besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan oleh badan-badan hukum yang tertentu dibawah penguasaan pemerintah. Segala kegiatan poltik yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat.[70]

Dari dua pembangunan nasional ini, terlihat bagaimana demokrasi ekonomi, dimana rakyat memegang peranan penting dalam masalah perekonomian. Walaupun juga mempersilahkan usaha-usaha pribadi untuk turut serta dalam mengisi

[69] Sri Edi Swasono, "*Koprasi Didalam Orde Ekonomi Indonesia*". Jakarta: UI –Press. 1983, hal. 2.
[70] Mohammad Hatta, "*Koprasi membangun dan membangun koprasi*", Jakarta: PT Koprasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971, hal. 103.

pembangunan nasional. Mengenai usaha pribadi ini, menujukan tidak hanya mementingkan kolektivisme tetapi juga menunjukan pengakuan terhadap usaha-usaha dan kepemilikan pribadi.

3. Demokrasi Ekonomi Pancasila

Sesuai dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersifat kekeluargaan. NKRI yang bersifat "kekeluargaan" yang mempengaruhi unsur pembentukan sebuah negara telah menjadi semangat dan cita-cita yang muncul dalam perdebatan-perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 28 Mei - 22 Agustus 1945. Dalam risalah dari sidang tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa tampaknya tidak mau terjebak dalam sistem pemerintahan yang bersifat Presidensial atau Parlementer. Para pendiri bangsa juga berkesimpulan bahwa Indonesia perlu mengadopsi sistem pemerintahan otentik yang berdasarkan pada corak hidup bangsa Indonesia, yaitu sistem kekeluargaan yang pada saat itu disebut juga sebagai "*Sistem Sendiri*".

Visi Negara Kekeluargaan ini sesungguhnya berakar dari cara pandang hakekat manusia Indonesia yang mendasari paham kekeluargaan sebagaimana yang diuraikan di atas. Dengan berlandaskan atas paham tersebut, maka negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan terbentuk secara organis dari individu-individu sebagaimana yang diajarkan oleh para pemikir individualis, melainkan -- menurut Prof. Notonegoro --, negara terbentuk atas dasar kodrat manusia sebagai individu dan mahluk sosial[71]. Oleh sebab itu, setelah menegara manusia Indonesia di samping mempunyai hak individu, pada dirinya juga melekat hak kemasyarakatan (kolektivitas), yaitu hak yang diberikan kepada individu berhubung dengan tugasnya dalam masyarakat. Jadi, sebagai anak bangsa, hak individu orang Indonesia melekat kepada hak warga Negara Indonesia. Oleh karena itulah maka hak-hak individu bangsa Indonesia tercantum dalam UUD 1945, Bab X, berjudul "Warga Negara".

Selanjutnya dari pemikiran lahirnya konsep "Negara Kekeluargaan" tersebut di atas, maka sebagai pokok pikiran pertama dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa "dalam Pembukaan diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan". Dalam pokok pikiran ketiga dari penjelasan Pembukaan tersebut, juga menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian secara

[71] Prof. Dr. Kaelan, M.S, "*Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*", Yogyakarta : Paradigma, 2015.

konsepsional pengertian "Negara Kekeluargaan" di sini berarti bukan keluarga "penguasa" melainkan keluarga besar bangsa Indonesia.[72]

Mohammad Hatta (Bung Hatta) mengakui bahwa judul, pasal dan ayat dalam UUD 1945 tentang ekonomi bersumber dari buah pikirannya sendiri yang beliau usulkan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta menyatakan bahwa *"..Buah pikiran yang tertanam di pasal 33 UUD 45 ini berasal dari saya sendiri yang saya majukan dahulu waktu Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan kita sedang menyusun rancangan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia. Sebab itu terimalah pernyataan saya bahwa memang koperasilah yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan itu."* (Bung Hatta, Jakarta 1975).

Kalau kita simak kembali situasi perekonomian di masa penjajahan dahulu, maka akan jelas bagi kita bahwa, perekonomian saat itu terdiri atas dua sistem, yaitu sistem perekonomian rakyat dan sistem perekonomian kapitalisme-kolonial. Namun, sistem kapitalisme–koloniallah yang menguasai perekonomian bangsa kita ketika itu, dengan pelaku utamanya perusahaan swasta asing dan timur asing. Kondisi perekonomian seperti itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini Bung Hatta berharap agar dalam alam kemerdekaan, sistem perekonomian yang demikian tadi, dapat ditransformasikan menjadi sistem perekonomian Indonesia yang didasarkan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa.[73]

Untuk memahami pemikiran dan langkah-langkah Bung Hatta, sebagai salah seorang tokoh pendiri negara, kita harus menyadari bahwa beliau adalah negarawan yang turut membidani lahirnya Indonesia Merdeka dan beliau berjuang dengan mengerahkan segala kemampuan untuk kepentingan kemerdekaan, kesejahteraan, serta pembangunan bangsanya. Dengan memiliki persepsi tentang Bung Hatta yang demikian ini, kita akan dapat lebih mudah memahami konteks pemikiran dan langkah-langkahnya di bidang ekonomi. Kita akan dapat melihat bahwa berbagai gagasan dan langkah Bung Hatta dalam bidang ekonomi bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan cita-cita beliau tentang Indonesia Merdeka dan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Dengan kata lain, keprihatinan dan gagasan-gagasan Bung Hatta atas kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat itu, haruslah selalu kita kaitkan secara menyeluruh dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu belum terwujudnya kesejahteraan sosial.

Bung Hatta melihat dengan sangat jelas segi positif dan negatif sistem perekonomian kapitalisme. Beliau juga sangat mendalami baik-buruknya sistem

[72] Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, Muhamad Karim, Lestari Agusalim, "*Sistem Ekonomi Pancasila",* Universitas Trilogi, 2016, hal. 139.
[73] *Ibid.*, 151.

perekonomian dengan perencanaan terpusat oleh pemerintah yang berkuasa (sistem perkonomian sosialisme). Bung Hatta berpandangan bahwa kedua sistem perekonomian tadi tidaklah cocok bagi bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita tersebut berangkat dari pandangan Pancasila tentang manusia yang dilandasi faham kekeluargaan. Berdasarkan pandangan tentang hakekat manusia Indonesia seperti tersebut di atas serta untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, maka interaksi dan interelasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi disusun dalam suatu sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang oleh Bung Hatta disebut sebagai sistem ekonomi koperasi. Bung Hatta menghendaki sistem ekonomi koperasi, karena menurut beliau Koperasi Indonesia[74] yang merupakan jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) harus menjadi acuan aturan main -baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi- di antara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyebut badan usaha milik negara dan swasta harus berjiwa koperasi.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. II Tahun 1998 tentang GBHN, istilah Sistem Ekonomi Indonesia lebih tepat menggunakan istilah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

Asas kekeluargaan, sebagai paham yang lahir dari sistem manusia Pancasila yaitu mahluk individu sekaligus mahluk sosial, merupakan prinsip dasar manusia Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi berupa kesadaran untuk secara kolektif bekerja dan bertanggung jawab bersama untuk mencapai suatu tujuan dengan tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri melainkan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam kaitan ini untuk lebih mendinamisasikan asas kekeluargaan, Bung Karno -sebagai penggagas Pancasila- menggunakan istilah gotong royong, yang merupakan *core value* dari Pancasila.

Dalam konsep pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan tersebut maka tujuan utamanya haruslah teruwujudnya kesejahteraaan sosial, yaitu kesejahteraan bersama seluruh rakyat bukan kesejahteraan orang-perorang. Tujuan ini jelas tercantum dalam Pembukaan dan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Untuk itu maka seluruh rakyat harus aktif berpartisipasi secara total dalam proses produksi dan dalam menikmati hasil-hasilnya. Inilah wujud dari demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), yang merupakan dasar SEP.

Selanjutnya agar proses demokrasi ekonomi tersebut dapat terselenggara dengan baik maka pengaturan ekonomi tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar semata (seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme); dan juga tidak bisa diserahkan

[74] Penyebutan istilah “Koperasi Indonesia” bukanlah koperasi dalam pengertian sistem ekonomi mikro sebagaimana dalam konsep ekonomi liberal, namun lebih dipahami sebagai konsep ekonomi makro berdasarkan dan berorientasi pada konstitusi nasional, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

sepenuhnya kepada kekuasaan pemerintah (seperti dalam sistem ekonomi sosialisme). Kedua pendekatan pengaturan ekonomi tersebut di atas terbukti tidak mampu menciptakan kebebasan dan sekaligus kesetaraan. Oleh karena itulah Bung Hatta dalam pidatonya yang sangat bersejarah pada tahun 1932 telah menawarkan suatu gagasan fundamental tentang pengaturan ekonomi yang genius, visioner dan khas Indonesia. Dalam pidatonya yang berjudul Ke arah Indonesia Merdeka beliau menegaskan: *"Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri dan* ***cara menyusun perekonomian semuanya harus diputuskan rakyat dengan cara 'mufakat'****.... Inilah arti kedaulatan rakyat"* (Hatta, Ke Arah Indonesia Merdeka, 1932).

Selanjutnya dalam salah satu pidatonya, Bung Hatta kembali dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa: "*Kita harus melakukan apa yang disebut sebagai 'ekonomi terpimpin'. Pemerintah harus banyak campur tangan dalam pelaksanaannya, dengan memberikan petunjuk dan menetapkan peraturan, tetapi bebas dari perbuatan birokrasi"* (Hatta, 1957).

Dari pandangan yang sangat mendasar dari Bung Hatta tersebut ternyata belum pernah ada pemikir-pemikir ekonomi Indonesia yang selanjutnya merumuskannya sebagai prinsip dasar pertama SEP. Sedangkan prinsip dasar SEP adalah gagasan Bung Hatta tersebut yaitu adanya pengaturan negara di bidang ekonomi yang harus diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat.[75] Inilah arti sesungguhnya dari kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, kata Bung Hatta. Sebagai representasi seluruh rakyat sebagaimana yang diuraikan di atas -sesuai ayat 2 Pasal 1 UUD 1945 versi 18 Agustus 1945- adalah MPR. Oleh karena itu, menurut Prof. Hazairin, MPR-lah yang berkewajiban menyusun struktur ekonomi itu atau pun menetapkan garis-garis besar sebagai petunjuk mengenai penyusunan itu dan selanjutnya mendelegasikan tugas pengaturan dan pelaksanaannya kepada Presiden dan DPR.

Prinsip dasar inilah yang membedakan SEP dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Para pendiri negara tampaknya telah menyadari benar bahwa apabila menggunakan mekanisme pasar bebas untuk mengatur kegiatan ekonomi maka terjadi kegagalan pasar yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sedangkan menggunakan sistem ekonomi sosialisme akan mengurangi kebebasan dan kemandirian rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Gagasan khas Indonesia tersebut melahirkan rumusan ayat 1 Pasal 33 yang menyatakan bahwa Perekonomian "disusun…". Hal ini berarti perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar tetapi secara sengaja disusun oleh

[75] Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, Muhamad Karim, Lestari Agusalim, *Op. Cit.,* 154.

negara (Sri Edi Swasono). Dengan demikian, negaralah yang menetapkan kaidah-kaidah pokok, arah dan haluan pembangunan perekonomian nasional.[76]

C. Lintas Sejarah Konstitusi dan Perekonomian Indonesia

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu ”*revolusi grondwet*” telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang- Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945 , sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no.IV/MPR/1983 tentang referendum).

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :

[76] *Ibid.*

a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

   Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

b. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

   Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

   Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang- undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang- undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

d. Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

   Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde

Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen periode pemerintahan itu dibagi menjadi tiga yakni : Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1) Orde Lama

Pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dikutip dari buku *Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi* (2018) karya *Diana Fawzia Dkk*, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau *checks* and *balances*. Sistem pemerintahan kuat sudah di depan mata, fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan. Perubahaam sistem presidensial lada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin.

a) Sistem Parlementer. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950. Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik.

b) Sistem Liberal. Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950-1959. Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR. Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

c) Sistem Demokrasi Terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia. Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, adanya peristiwa G30S/PKI dan munculnya tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga barang-barang.

Fase perekonomian di era Presiden Soekarno.

Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca-kemerdekaan, kemudian *fase memperkuat pilar ekonomi*, serta *fase krisis* yang mengakibatkan inflasi.

Demokrasi Liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 hingga 1959. Saat itu Indonesia baru merdeka. Perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat.

Pertumbuhan penduduk melejit. Namun tak ada tenaga ahli untuk membangkitkan industri. Kendala lainnya yakni Indonesia harus menghadapi pemberontakan di daerah-daerah. Kebutuhan keamanan tentu harus menambah biaya. Belum lagi kabinet yang kerap berganti, menyebabkan program ekonomi tak berjalan optimal. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun tak bisa menyelamatkan perekonomian. Sejumlah kebijakan yang moneter kala itu yakni :

1. Gunting Syafruddin
2. Gerakan Benteng
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
5. Persaingan finansial ekonomi
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

2) Orde Baru

Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi. Dilansir dari *Encyclopaedia Britannica* (2015), masa Orde Baru pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Pada era ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden.

Salah satu penyebab runtuhnya era orde baru adanya krisis moneter pada 1997. Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru masih relevan sejak tahun itu, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat. Terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi.

Fase Perekonomian

Dimulai ketika Era Soeharto menjadi Presiden menggantikan Soekarno pada 1967. Pada saat itu disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi. Sebelum peralihan tongkat kepemimpinan memang tengah terjadi gejolak perekonomian. Pemerintah Orde Lama tak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya sempat terjadi meroketnya inflasi (hiperinflasi) yang mencapai 635% pada 1966.

Dengan berbegai kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu meredam hiper inflasi itu. *Franciscus Xaverius Seda* (Menteri Keuangan 1966-1968) menjadi aktor utama dari upaya menekan inflasi menjadi 112%. Frans mengatasi permasalahan ekonomi saat itu dengan cara menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Hal itu untuk meredam imbas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang rajin mencetak uang. Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru terbilang berhasil saat itu. Ekonomi RI mulai stabil.

Pada orde baru ini Progam kerja yang sangat terkenal dan dikemukakan adalah a. Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum. b. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No XLII/MPRS/1968 (selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971). c. Mengembalikan ketertiban dan keamanan rakyat masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap perongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. d. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah.

3) Reformasi

Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Di masa ini, partai politik independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer.

Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan. Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.

Pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi, dari posisi pertumbuhan minus 13,13 persen pada 1998 menjadi 0,79 persen pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp 16.650 per dollar AS pada Juni 1998 menjadi Rp 7.000 per dollar AS pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92 persen pada 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64 persen.

Pada masa pemerintahan **Presiden Megawati (2001-2004)**, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen dari 3,64 persen pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78 persen. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4 persen pada 2001, 18,2 persen pada 2002, 17,4 persen pada 2003, dan 16,7 persen pada 2004. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelita seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi.

Meski naik-turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan **Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)** relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69 persen pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5 persen. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tepatnya 6,35 persen. Lalu, pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6 persen meski turun tipis ke angka 6,01 persen. Saat itu, impor Indonesia terbilang tinggi. Namun, angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang.

Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63 persen. Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global yang tak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga ke negara lain. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika

Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. “Saat Bank Sentral AS menarik dana dari publik, tidak injeksi lagi, harga komoditas melambat lagi. Kita mulai keteteran,” kata Lana. “Ekspor kita memang tinggi, tapi impornya lebih tinggi,” tambah dia. Meski begitu, Indonesia masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun melambat.

Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga terbaik di dunia. Pada 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22 persen. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49 persen, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6 persen pada 2012 yaitu di level 6,23 persen. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,56 persen pada 2013 dan 5,01 persen pada 2014.

Pada masa pemerintahannya, **Joko Widodo** atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus menerus melemah terhadap dollar AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88 persen.

“Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun,” kata Lana. Di era Jokowi kata Lana, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terealisasi. Ini tidak seperti repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03 persen. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17.

D. Poisi NU dan PMII dalam Ekonomi Nasional

Ada tiga pilar utama sebagai pondasi bagi tegaknya organisasi NU yaitu, Nahdlatul Wathan (Gerakan Cinta Tanahair), Tashwirul Afkar (Gerakan Intelektual dan Pemikiran) dan Nahdlatut Tujjar (Gerakan Ekonomi). Ketiga pilar ini menjadi bagian terpenting dalam perjalanan NU dalam membangun bangsa ini. Kemudian Tashwirul Afkar pada 1918 sebagai ikon dari pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan pada tahun yang sama berdiri pula Nahdlatut Tujjar sebagai perwujudan dari pengembangan ekonomi umat. Ketiga menjadi cikal bakal NU dan sekaligus sebagai pondasi fundamental NU. Nahdlatut Tujjar adalah narasi sejarah yang dilukis oleh para pendahulu-pendahulu NU. Nahdlatut Tujjar harus bisa dihadirkan kembali.

Di sini sangat jelas bahwa NU harus memperhatikan sektor-sektor penggerak ekonomi. Orientasi politik yang sangat kuat dari sebagian besar kaum Nahdliyyin harus dibarengi orientasi pengembangan ekonomi umat yang bermuara pada kesejahteraan warga. Inilah politik kemaslahatan NU yang perlu dirancang dan diimplementasikan segera, apalagi pasar dan Negara kian terbuka dengan model pendekatan NU yang terbuka. Kita memiliki gambaran bahwa 10-20 tahun ke depan adalah medan dari sebuah pilot projek yang amat strategis, bagaimana mengetengahkan politik ekonomi warga lebih dekat dengan bandul politik kemaslahatan NU[77].

[77] Fathan Subchu, *NU, Ekonomi, dan Politik Kemaslahatan*, https://www.nu.or.id/opini/nu-ekonomi-dan-politik-kemaslahatan-WMUyo, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

TEOLOGI PEMBEBASAN

SEJARAH TEOLOGI PEMBEBASAN AMERIKA LATIN & PEMIKIRAN TEOLOGI PEMBEBASAN ISLAM

A. Terminologi Teologi Pembebasan

Pada mulanya istilah teologi pembebasan atau liberation theology diperkenalkan oleh para teolog Katolik di Amerika Latin pada pertengahan abad lalu. Para teolog ini mau membedakan antara metode teologi pembebasan dengan teologi tradisional. Teologi tradisional adalah teologi yang membahas tentang Tuhan semata-mata, sementara teologi pembebasan adalah cara berteologi yang berasal dari refleksi iman di tengah realitas konkrit yang menyejarah. Yakni teologi yang memprihatini nasib dan solider kepada mereka yang menderita ketidakadilan, kalah, miskin, ditindas dan menjadi korban sejarah; teologi yang mau mentransformasikan dunia.

Atau dalam ungkapan Gustavo Gutierrez: This is a theology which does not stopwith reflecting on the world, but rather tries to be part of the process through which the world is transformed. It is theology which is open in the protest against trampled human dignity, in the struggle against the plunder of the vast majority of humankind, in liberating love, and in the building of a new, just, and comradely society to the gift of the Kingdom of God. (Ini teologi pembebasan] adalah sebuah teologi yang tidak hanya merefleksikan dunia, melainkan juga mencoba melakukan proses transformasi terhadapnya. Ia [teologi pembebasan] adalah teologi yang berupaya untuk melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membebaskan cinta dan membangun suatu masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan untuk meraih rahmat dari Kerajaan Tuhan) (Alfred T. Hennelly, SJ, 1995: 16).

B. Belajar Teologi Pembebasan Amerika Latin

Teologi pembebasan di Amerika Latin merupakan sebuah entitas gerakan sekaligus juga doktrin. Gerakan ini muncul karena perpaduan dari perubahan-perubahan internal dan eksternal.Secara internal gerakan ini muncul berbarengan dengan perkembangan aliran-aliran teologis dan keterbukaan terhadap perkembangan sains sosial modern. Sementara secara eksternal ia didorong oleh dua situasi: pertama adalah keterbelakangan, ketergantungan, keterpinggiranm ketertindasan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh proses industrialisasi sejak tahun 1950-an di seluruh benua di bawah arahan modal multinasional; dan kedua meningkatnya perjuangan sosial, gerakan-gerakan gerilya, pergantian pemerintah melalui kudeta militer dan krisis keabsahan sistem politik, sejak meletusnya revolusi Kuba tahun 1959

Gerakan teologi pembebasan ini melibatkan sektor-sektor penting gereja (para romo, pengamal tarekat atau ordo-ordo, para uskup), gerakan keagamaan orang awam, keterlibatan pastoral yang merakyat serta kelompok-kelompok basis masyarakat gereja yang menghimpun diri menentang sebab-sebab penghisapan dan penindasan, atas dasar nalar moral dan kerohanian yang diilhami oleh budaya keagamaan mereka. Dorongan moral dan keagamaan inilah yang merupakan faktor hakiki yang menggerakkan semangat ribuan aktifis dalam serikat-serikat buruh, kerukunan-kerukunan tetangga, dan front-front kerakyatan untuk melawan penindasan dan kemiskinan.

Adapun doktrin atau ajaran-ajaran penting yang menggerakkan mereka di antaranya adalah: pertama, gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan pada kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil dan tidak beradab, sebagai suatu bentuk dosa struktural. Kedua, penggunaan alat analisis Marxisme dalam rangka memahami sebab musabab kemiskinan, pertentangan-pertentangan dalam tubuh kapitalisme dan bentuk-bentuk perjuangan kelas. Ketiga, pilihan khusus bagi kaum miskin dan kesetiakawanan terhadap perjuangan mereka menuntut kebebasan. Keempat, pengembangan basis kelompok-kelompok masyarakat agama di kalangan orang-orang miskin sebagai suatu bentuk baru keagamaan dan alternatif terhadap cara hidup individualis yang dipaksakan oleh sistem kapitalis. Kelima, suatu penafsiran baru Kitab Suci yang memberikan perhatian penting padabagian-bagian yang mengusung paradigma perjuangan pembebasan rakyat yang diperbudak. Keenam, perlawanan terhadap permberhalaan sebagai musuh utama agama, yakni berhala-berhala baru: uang, kekayaan, kekuasaan, keamanan nasional, negara, militerisme, peradaban Barat. Ketujuh, sejarah pembebasan manusia adalah antisipasi akhir dari Keselamatan. Dan kedelapan, kecaman terhadap teologi tradisional yang bercorak platonik yang memisahkan antara sejarah kemanusiaan dan ketuhanan (Michel Lowy, 1999: 25-30).

Dari susunan doktrin teologi pembebasan di atas nampak jelas sekali bahwa gerakan tersebut tidak semata-mata diilhami oleh spirit moral dan keagamaan, melainkan juga oleh keterbukaan para pemrakarsa dan aktivisnya terhadap pemikiran-pemikiran filsafat dan ilmuilmu sosial modern, khususnya Marxisme. Rupanya karena itulah dalam perjalanannya model teologi pembebasan ini juga banyak menerima kritik bahkan cemoohan dan tentangan dari berbagai kalangan. Di antara para pengkritik sendiri adalah para agamawan konservatif yang masih mempertahankan ortodoksi.

Mereka pada umumnya berada, berlindung dan mengambil untung dari kekuasaan yang ada yang justru lalai dan menindas, dan untuk itu mereka

menggunakan dalil-dalil keagamaan untuk mempertahankan status quo. Para pengkritik lain menganggap teologi pembebasan cenderung menggunakan jalan kekerasan sebagai alat perlawanan. Hal ini dipandang berkebalikan dengan nilai agama yang membawa pesan cinta kasih dan perdamaian. Teologi pembebasan tentu sangat berbeda dengan pandangan teologis kaum konservatif di atas yang menggunakan agama sebagai instrumen status quo. Kaum konservatif telah memperlakukan agama sebagai candu untuk mencapai kenikmatan sesaat, seraya mengabaikan panggilan profetik kenabian yang bersolidaritas terhadap kaum miskin dan tertindas. Di tangan kaum konservatif ini pulalah energi agama yang sesungguhnya menjadi kekuatan untuk melawan kezaliman, ketidakadilan dan penindasan menjadi susut dan akhirnya musnah. Konservatisme biasanya juga selalu berkarakter sempit dalam cara berpikir dan tertutup dalam wawasan.

Mereka menolak keterbukaan karena dianggap mengurangi kadar keimanannya. Sehingga dalam beberapa kesempatan mereka menolak teologi pembebasan yang telah memakai analisis kelas yang dikembangkan Marxisme. Bagi mereka konflik kelas dalam Marxisme telah menyebabkan agama telah kehilangan watak spiritualitasnya sekaligus menjadi sekadar gerakan sosial yang kerap diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan. Oleh pandanganpandangan yang sempit inilah, lalu dalam setiap wacana dan gerakannya teologi pembebasan banyak disalahpahami dan dicibir. Bukannya menjadi sarana belajar dan refleksi kritis atas praksis untuk memperkaya pemahaman keagamaan yang sudah usang.

Ada beberapa tokoh atau teolog di Amerika Latin yang mulai membangun dan merumuskan teologi pembebasan. Di antara mereka yang berpengaruh dan sedikit disinggung di sini adalah Gustavo Gutierrez dan Joan Luis Segundo. Gutierrez dalam bukunya berjudul A Theology of Liberation menyatakan: If faith is a comitment to Godand to human beings, it is not possible to believe in today world without a comitment to the process of liberation. (Bila iman adalah suatu komitmen kepada Allah dan umat manusia, maka mustahil keberimanan kita pada hari ini mengabaikan komitmen kepada proses pembebasan umat manusia (dari segala kemiskinan dan penindasan) (Alfred T. Hannelly, 1995: 11).

Di sini jelas bagi Gutierrez bahwa pembelaan terhadap kaum miskin dan perlawanan terhadap para penindas sesungguhnya adalah konsekuensi dari iman seseorang kepada Allah. Iman seseorang tidak bermakna apapun tanpa keterlibatan dirinya dalam praksis sosial dan sejarah. Karena bagi Gutieres, makna teologi itu sendiri sebenarnya adalah suatu refleksi kritis terhadap praksis dalam terang Kitab Suci. Oleh karena itu pula makna spiritualitas selalu terkait langsung dengan tindakan.

Gutierrez menunjukkan tiga karakteristik teologi pembebasan (Alfred T. Hannelly, 1995: 12).Pertama, teologi pembebasan adalah pemahaman yang progresif dan terus menerus atas dasar komitmen kemanusiaan dan keberimanan yang selalu hidup. Oleh karena itu teologi sesungguhnya adalah praksis pembebasan dari belenggu ekonomi, sosial, politik, dan dari sistem masyarakat yang mengingkari kemanusiaan dan dari kedosaan yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Kedua, teologi adalah sebuah refleksi yang lahir dari tindakan. Gutierrez menulis dalam sebuah paragraf yang cantik: Theology is a reflection that is, a second act, a turning back, areflecting, that comes after action. Theology is not first; the commitment is first. Theology is the understanding of commitment, and the commitment is action. The central action is charity, which involves commitment, while theology arrives later on. (Teologi adalah sebuah refleksi, yakni suatu tindakan kedua, suatu gerak balik, sebuah perefleksian yang dilakukan setelah bertindak. Jadi bukan teologi, melainkan komitmenlah yang pertama. Teologi adalah hasil pemahaman dari komitmen, dan komitmen itu adalah kesediaan untuk bertindak. Inti tindakan adalah kemurahan hati yang disertai komitmen, setelah itu baru teologi hadir).

Oleh karena itu teologi harus menjadi kritis ketika berhadapan dengan masyarakat maupun terhadap institusi keagamaan.Ia harus menjadi pembebas bagi kedua institusi sosial itu dari berbagai macam ideologi, keberhalaan dan alienasi. Sehingga teologi itu sendiri pada akhirnya akan memberikan orientasi dan inspirasi bagi aksi tindakan selanjutnya. Inilah yang disebut dengan keberimanan dalam praksis sejarah, keberimanan yang transformatif. Dan ketiga, setiap tindakan kita harus disertai dengan refleksi untuk memberi orientasi masa depan yang diyakini dan diharapkan dan koherensi agar ia tidak jatuh pada aktivisme.

Meskipun Gutierrez telah memberikan ancangan rumusan metode teologi pembebasan, baru kemudian Juan Luis Segundo yang berhasil mensistematisasi rumusan metodologi teologi pembebasan. Sistematisasi inilah yang nantinya menjadi acuan berbagai metode teologi-teologi pembebasan (liberation theologies) lainnya di dunia. Dalam salah satu tulisannya Two Theologies of Liberations, ada pernyataan menarik dari Segundo yang dikutip oleh Michel Lowy (Michel Lowy, 1999). Ia menyatakan, Jangan lupa kita hidup di tanah-tanah yang paling agamis dan di tanah-tanah yang paling tidak berprikemanusiaan. Pernyataan ini tampaknya menyembunyikan tapi sekaligus menyingkap suatu ironi. Bagaimana mungkin penindasan justeru terjadi dalam masyarakat yang mayoritas beragama yang meyakini bahwa ajaran agamanya melawan ketidakadilan dan penindasan.

Mengapa tidak ada protes atau perlawanan atas kondisi ini dari pihak kaum agamawan? Apakah kaum agamawan buta atau membutakan diri terhadap situasi yang ada? Segundo menyadari bahwa ketidakmampuan mengambil sikap yang diperlihatkan para agamawan itu disebabkan ketidakmampuannya melihat persoalan sosial dan menganalisis struktur-struktur penindasan yang ada. Bukan hanya itu, berlanjutnya penindasan karena agama mengalami impotensi karena pemahaman terhadap teologi dan kitab suci didominasi oleh tafsir yang justeru tidak sensitif terhadap persoalan masyarakat tertindas. Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan deideologisasi terhadap realitas sosial dan superstruktur serta deideologisasi terhadap interpretasi kitab suci, agar iman kita bisa merespon situasi konkrit penindasan dan ikut berjuang bersama-sama kaum tertindas melawan para penindas. Kebekuan agamawan dalam merespon situasi konkrit ini mendorong Segundo untuk menawarkan metode berteologi yang bukan hanya sebagai usaha ortodoksi tapi juga suatu ortopraksis. Yang dimaksud adalah bahwa berteologi bukan hanya untuk memperteguh dan memantapkan ajaran, tapi juga menjadikan pengalaman konkrit sebagai basis menerapkan sebuah rumusan ajaran. Segundo merumuskan hal ini dalam suatu bentuk lingkaran hermeneutik.

C. Apa yang dimaksud Lingkaran Hermeneutik ?

Hermeneutika adalah proses interpretasi untuk membuat pesan kitab suci relevan dengan zamannya, sedangkan lingkaran menunjukkan bahwa usaha interpretasi itu bertitik tolak pada realitas baru yang lalu menuntut kita menginterpretasikan ajaran kitab suci secara baru pula dalam rangka mengubah realitas sebagaimana dituntutkan, dan akhirnya kembali kepada usaha menginterpretasikan kembali firman Allah, dan seterusnya. Menurut Segundo, lingkaran hermeneutik bisa berlangsung dengan dua syarat: pertama, kesangsian-kesangsian atas situasi nyata sungguh-sungguh dalam memperkaya, dan kedua, interpretasi atas kitab suci juga bersifat sungguh-sungguh dalam dan memperkaya (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37).

Dalam lingkaran hermeneutik ini sang penafsir dituntut untuk terus menerus melakukan kritik terhadap realitas yang ada sekaligus mengkritik pula pemahaman teologis terhadap realitas tersebut, dan lalu menafsirkannya kembali demi perubahan realitas tersebut. Dengan kata lain, di belakang kritik tersebut sesungguhnya kita selalu dituntut untuk selalu mencurigai suatu tafsir. Atau mencurigai status iman seseorang kepada siapa dia mengabdikan imannya. Pengandaiannya adalah bahwa iman itu sendiri bersifat ideologis karena ia lahir dari tanggapan yang menyejarah dan subjektif terhadap wahyu Allah. Oleh karena itu praksis iman seseorang harus senantiasa diberi kritik dengan selalu membenturkannya dengan realitas konkrit. Baru dengan begitu, makna

keberimanan seseorang akan membawa transformasi bagi kehidupan ke arah yang lebih baik.

Dari model lingkaran hermeneutika tampak ada 4 langkah penafsiran yang diajukan Segundo (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37; Alfred T. Hannelly, 1999: 28). Langkah itu bisa diuraikan sebagai berikut:

Langkah pertama: cara kita mengalami â€œrealitas yang terumuskan mendorong kita pada posisi kecurigaan ideologis. Pada tahap ini, dalam pengamatan Segundo, Harvey Cox dalam bukunya The Secular City (1966) gagal memasuki kesangsian ideologis karena ia bersikap anti pragmatisme sosial. Cox terlalu sibuk pada langkah pertama yakni cara yang kaya dan mendalam mengalami realitas, dia hanya menyangsikan cara lama mengalami realitas yang bertumpu pada kaidah-kaidah nilai kemanusiaan tertinggi, dan mengajukan alternatif cara baru mengalami realitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi teknologis tanpa menelisik kepentingan ideologis di balik realitas itu.

Langkah kedua: menerapkan kecurigaan ideologispada seluruh superstruktur ideologis dan khususnya pada teologi. Dalam konteks ini, menurut Segundo, Marx sukses membongkar ideologi dalam masyarakat, tapi gagal membangun transformasi dalam agama, bahkan tidak menyentuh sedikitpun.Marx sukses pada langkah pertama mengalami realitas sejarah sebagai perjuangan kelas.Ia juga memiliki komitmen mentranformasikan dunia dalam konsepnya tentang materialisme sejarah, yakni sebuah patokan bahwa basis hubungan sosial ekonomi menentukan superstruktur ideologi, budaya dan agama. Oleh karena itu dalam rangka menghilangkan cengkeraman penguasa borjuis, hubungan sosial ekonomi itu harus diubah dari feodalisme ke kapitalisme, dari kapitalisme ke sosialisme yang akhirnya ke komunisme.Letak kesangsian ideologis Marx adalah keyakinannya bahwa ideologi yang berkuasa selalu merupakan ideologi dari kelas yang sedang berkuasa. Namun sayangnya komitmen transformasi masyarakat Marx berhenti, ia tidak melanjutkan logikanyamengubah superstruktur untuk pula mengubah agama (sebagai salah satu unsur superstruktur).

Langkah ketiga: Dari cara baru mengalami realitas teologis mendorong kita pada kecurigaan eksegesis. Kita mulai mengangsikan interpretasi Kitab Suci yang ada karena tidak mengikutsertakan data yang penting.Menurut Segundo, Max Weber dalam The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism (1904-1905) sukses melihat peranan agama.Weber secara sosiopsiko-historis berhasil mencari peranan superstruktur (agama, etika protestan) terhadap hubungan sosial ekonomi (gairah usaha untuk memperoleh untung, kerja keras, berhemat, menabung dan menumpuk harta spirit kapitalisme). Tapi sebagai seorang Calvinis ia tidak memiliki komitmen terhadap transformasi masyarakat.

Langkah keempat: kita mencapai hermeneutika baru dengan menginterpretasikan Kitab Suci secara baru, lebih kaya dan mendalam. Dengan demikian kita juga mengalami realitas secara baru pula.

Menurut Segundo, James H. Cone adalah seorang teolog asal Arkansas, negara bagian Amerika Serikat yang dengan komitmennya terhadap transformasi pembebasan manusia berhasil melalui tahap-tahap penafsiran teologi pembebasan dalam praksis sosial melalui karyanya A Black Theology of Liberation (1970). Cone merumuskan teologi pembebasan kulit hitam dalam rangka memberikan acuan teologis dan praktis untuk pembebasan warga kulit hitam yang miskin, tertindas, dan terdiskriminasi.Ia bertolak dari praksis iman yang dialaminya yakni pembebasan kelas kulit hitam di Amerika Utara, yang ditindas oleh kelas kulit putih lengkap dengan ideologi dan teologi pembenaran status quo-nya yang menindas.

Cone mepresentasikan Black Theology-nya ke dalam 4 langkah. Langkah pertama Cone mengalami realitas di Amerika Utara sebagai perjuangan pembebasankelas kulit hitam dan makna ketuhanannya dihubungkan dengan solidaritas dengan mereka yang dibelenggu penindasan.

Langkah kedua setelah melakukan analisis sosial untuk membongkar sistem-sistem dominasi, seperti rasisme, seksisme, kolonialisme, kapitalisme dan militerisme, Cone sampai pada kecurigaan ideologis terhadap pendapat kelas kulit putih bahwa warna kulit jangan dijadikan titik perbedaan demi kesatuan dan universalitas manusia.

Langkah ketiga Cone mengalami kecurigaan eksegesis terhadap cara berteologi kelas kulit putih yang berpusat pada universalitas konteks, yang menutup kemungkinan mendekati Kristus yang terikat dengan kebudayaan tertentu. Dalam hal ini Cone berupaya menafsirkan kembali pesan-pesan Kitab Suci yang sudah didistorsi dan menjadikan Allah menjadi spirit pemberdayaan masyarakat agar lebih manusiawi. Terakhir Cone menekankan cara baru yang kaya dan mendalam mengalami Kitab Suci sebagai wahyu yang relevan bagi perjuangan kelas kulit hitam untuk pembebasan zaman kita sekarang. Termasuk juga disini kebutuhan terhadap bahasa teologi baru yang hadir di dalam cerita-cerita, dongeng-dongeng, nyanyian, kotbah, dan ajaran-ajaran yang lebih bernada membebaskan. Dari uraian di atas, tampak sekali bahwa Cone benar-benar merumuskan model cara beragama sekaligus penghayatan iman secara baru. Yakni iman yang diterangi oleh Kitab Suci yang senantiasa berdialog dengan realitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa teologi pembebasan bukanlah semacam teologi yang sempit, kolot, dan tertutup yang hanya terkesima oleh warisan masa

lalu. Melainkan teologi yang selalu berdialog dengan realitas yang membuatnya selalu relevan bagi pemeluknya.

Cara berteologi yang demikian itu menyadari betul bahwa iman sendiri sesungguhnya adalah refleksi individual atau penghayatan terhadap Firman Allah dalam situasi konkrit dan menyejarah. Dengan demikian, berteologi semacam ini sungguh-sungguh akan mendorong untuk lebih bersikap dewasa dan terbuka kepada realitas dan perkembangan pengetahuan yang bisa menjadi bahan untuk memperkaya keberagamaan kita, terutama dalam mengambil sikap terhadap realitas sejarah yang selalu bergerak dinamis.

D. Teologi Pembebasan Islam, Adakah ?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama kita perlu mengetahui kenyataan bahwa gema teologi pembebasan sejak lahirnya pada tahun 50-an dan 60-an abad lalu telah menjadi inspirasi berharga bagi perkembangan teologi-teologi pembebasan lainnya. Di Amerika Utara misalnya ada teologi pembebasan feminis yang digerakkan oleh beberapa tokoh berpengaruh, misalnya: Elizabeth Schussler Fiorenza, Rosemary Radford Ruether, Elizabeth Johnson, Jacquelyn Grant, dan lain-lain; lalu teologi kulit hitam dengan tokoh-tokohnya, seperti James H. Cone, Martin Luther King, Jr, Malcolm X., dan Delores S. Williams; ada teologi pembebasan Hispanik dengan tokoh-tokohnya Allan Figueroa Deck, dan Mujesrista Theology; ada teologi pembebasan Afrika dengan tokoh-tokohnya Benezit Bujo, Mercy Amba Oduyoye; dan tak ketinggalan teologi pembebasan Asia dengan beberapa tokohnya Aloysius Pieris, Raimundo Panikkar, dan Chung Hyun Kyung.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa semangat dan prinsip teologi pembebasan bisa tumbuh di manapun dan dalam kebudayaan apapun ketika sistem dan struktur sosial dalam masyarakat berjalan timpang, diwarnai dengan kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, serta adegan penindasan kelompok satu atas kelompok lainnya.Munculnya spirit pembebasan ini didorong oleh dua kecenderungan.Pertama, dalam diri manusia sebenarnya menyimpan potensi fitrah, yakni kesadaran akan kemerdekaan diri. Potensi itu akan dirasakan dan tampak manakala manusia merealisasikan kebebasan dirinya dalam tindakan-tindakan konkrit. Ketika manusia merasakan dirinya tertekan oleh beban penindasan maka dalam dirinya muncul resistensi dan kehendak untuk membebaskan diri.Kedua, dalam sebuah komunitas tertentu kesadaran pembebasan itu sudah ada dan tumbuh (minimal secara potensial) dalam tradisi budaya atau dalam dunia simbolik yang diyakini kebenarannya secara kolektif.

Misalnya dalam dongeng, cerita sejarah, mitos, atau dalam teks-teks Kitab Suci. Fakta mengenai tumbuh suburnya ragam gerakan pembebasan di Asia dan

Afrika di atas menunjukkan sekali lagi bahwa ia tidak sekadar dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal dalam budaya itu sendiri. Oleh karena itu jika teologi pembebasan bisa tumbuh di berbagai kebudayaan, maka berdasarkan kedua hal tersebut di atas jawaban mengenai adatidaknya teologi pembebasan dalam Islam tampaknya bisa diperoleh pula. Pertama berdasarkan kesadaran internal umat Islam yang berkehendak mencari pembebasan dan melakukan transformasi sosial, dan kedua itu dilakukan melalui reinterpretasi terhadap sejarah dan kebudayaan umat Islam atau dengan melakukan rekonstruksi atas pesan-pesan normatif pembebasan dalam Islam sendiri.

Michael Amaladoss membuat penelitian yang sangat menarik mengenai berbagai bentuk teologi pembebasan, khususnya di Asia. Setelah mengkaji berbagai potensi dan watak pembebasan dalam agama-agama di Asia yang meliputi: agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristiani, Islam dan agama-agama Kosmis, Amaladoss menyimpulkan bahwa berbagai teologi tersebut menunjukkan bahwa semua agama memiliki segi-segi yang membebaskan, dan para nabi telah berusaha menyoroti unsur-unsur yang membebaskan itu dalam menafsirkan kembali tradisi agama mereka secara kreatif dan relevan (Michael Amaladoss, 2000: 270). Adapun untuk mengetahui lebih lanjut secara diskursif wacana pembebasan dalam Islam, dalam bagian berikutnya kita akan melihat sekilas beberapa sarjana muslim seperti Ali Syariati, Asghar Ali Engeneer dan tentu saja Hasan Hanafi, yang telah mengangkat elemen-elemen pembebasan dalam Islam baik melalui pendekatan tekstual maupun pendekatan rekonstruksi simbolis dalam sejarah Islam.

E. Tentang Teologi Pembebasan

Sejak lebih dari dua dekade yang lalu di kalangan umat Islam Indonesia dihadapkan pada gagasan tentang betapa perlu menghidupkan kembali "teologi rasional". Usaha menghidupkan kembali "teologi rasional" itu dianggap perlu untuk mengejar keterbelakangan umat Islam yang diakibatkan, menurut penganjur gagasan tersebut, antara lain karena mereka terbelenggu oleh "teologi tradisional" yang mereka anut. Teologi ini terutama dikaitkan dengan paham jabariah atau fatalisme, yang dianggap melahirkan sikap pasif, pasrah dan m.enyerah pada suratan takdir.

Prof. Dr. Harun Nasution adalah salah seorang penganjur utama "teologi rasional" itu. Karena itu beliau dianggap sebagai pelopor kebangkitan apa yang disebut sebagai "NeoMu'tazilah". Tentu saja kita bisa mempertanyakan validitas konstatasi tersebut dilihat dari segi faktual.Bersamaan dengan itu menyembul pula gaga san tentang keperluan usaha pembaharuan dalam pemikiran umat Islam.Salah seorang penganjur utamanya adalah Cak Nur (Dr. Nurcholish Madjid)

yang mencanangkan ide "liberalisasi" dan 'sekularisasi".Gagasan pembaharuan itu rnakin menggema dengan lontaran-Iontaran ide Gus Dur (KH Abdurrahrnan Wahid).

Ia menganggap gerakan "kultural" yang sibuk dalam tataran ide saja belum cukup, akan tetapi ia juga menentang gerakan "politik" yang cenderung mernanipulasi agarna untuk memperoleh kekuasaan. Gus Dur lebih menekankan perhatian dan pemikirannya pada gerakan "sosio-kultural yang bermuara pada transformasi sosial urnat Islam daIam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam perspektif ini terasa "teologi rasional" saja tidak memadai dan tidak menjawab tantangan nyata yang dihadapi umat Islam. Kontroversi antara "teologi rasional" versus "teologi tradisional" bagi kalangan aktivis yang concern pada berbagai fenomena ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat tidaklah relevan.

Dirasakan keperluan untuk merumuskan sejenis teologi yang lain, "teologi transforrnatif". Beberapa pemikir muslim mencoba menggali dan merumuskan "teologi transformatif" itu. Kesadaran tentang keperluan "teologi transformatif" itu rupanya tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga di negeri-negeri muslim lainnya. Kita bisa menyebut Dr. Hassan Hanafi (Mesir) yang terkenal dengan gagasan AI- Yasari 'l-Islami (Kiri Islam) dan menulis karya monumental "Mina 'l-Aqidah ila 'l-Thawrah" (Dari Teologi ke Revolusi) sebanyak 5 jilid.Juga Ziaul Haque (Pakistan, bukan Zia ul Haq yang rnantan Presiden) yang menulis tulisan yang cukup provokatif, "Revelation and Revolution in Islam" (Wahyu dan Revolusi dalam Islam).

Selain itu harus pula disebut nama Asghar Ali Engineer (India), yang terjemahan tulisannya "Islam and Its Relevance to Our Age" ada di tangan pembaea sekarang ini. Berbeda dengan kedua nama yang disebutkan di atas, Asghar Ali Engineer bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang aktifis. Kebetulan, ia merupakan pernimpin salah satu kelompok Syi'ah Isma'iliyah, Daudi Bohras (Guzare Daudi) yang berpusat di Bombay India. MeIalui wewenang keagamaan yang ia rniliki, Asghar Ali berusaha menerapkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, mempertahankan kemapanan.

Untuk memahami latar belakang keagamaan Asghar AIi, ada baiknya diketahui sepintas laIu kelompok Daudi Bohras ini. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amiru1 Mukminin. Mereka mengenal 21 orang Imam. Imam mereka yang terakhir Mawlana Abul-Qasim al-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 H. Akan tetapi mereka masih pereaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan

oleh para Da'i (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan Imam terakhir itu. Untuk diakui sebagai seorang Da'i tidaklah mudah.Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas dalam 4 kelompok: (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian.

Yang menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang Da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang meIawan kezaIiman.Asghar Ali adalah seorang Da'i.Dengan memahami posisi Asghar di atas kita tidak heran mengapa Asghar Ali Engineer sangat vokal dalam menyoroti kezaliman dan penindasan.la menganjurkan bukan sekedar merumuskan "teologi transformatif" akan tetapi lebih dari itu. Asghar Ali menghimbau generasi muda Islam untuk merekonstruksi"teologi radikal transformatif". Ketika gagasan TeoIogi Pembebasan muncuI di kalangan gereja Katolik di Amerika Latin, yang temyata tidak direstui Vatikan, ia menulis artikeI "Teologi Pembebasan daIam Islam".

Tulisan-tulisan daIam tulisan ini sarat dengan analisa filosofikal dan historikal untuk merumuskan "Teologi Pembebasan dalam konteks modem" seperti diinginkan oleh Asghar Ali Berdasarkan telaah kesejarahan terhadap dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW di masa-masa permulaan, misaInya, Asghar Ali sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang revolusioner, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan, dan beliau berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan seeara radikal dalam struktur masyarakat di zamannya. Bertolak dari situ, agaknya, lalu Asghar Ali Engineer merevisi konsep dan pengertian mukmin dan kafir, yang berbeda dengan apa yang umum dipahami oleh umat Islam sekarang.

Ia menulis: " ... orang-orang kafir dalam arah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan". Dengan demikian bagi Asghar Ali, seorang mukmin sejati bukanlah sekedar orang yang percaya kepada Allah akan tetapi juga ia harus seorang mujahid yang berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan penindasan.

Jadi, kalau ia tidak berjuang menegakkan keadilan dan meIawan kezaliman serta penindasan, apaIagi kalau ia justru mendukung sistem dan struktur masyarakat yang tidak adil, walaupun ia pereaya kepada Tuhan, orang itu, dalam pandangan Asghar, masih dianggap tergolong kafir. Pemahaman dan penafsiran konsep mukmin dan kafir ini, saya rasa, adalah kunci untuk memahami pemikiran Asghar Ali yang pasti, untuk banyak orang akan mengagetkan.

Dari situ ia menyodorkan reinterpretasi dan rekonseptualisasi tentang berbagai terma-terma keagamaan, dan menawarkan reevaluasi terhadap berbagai gerakan-gerakan umat Islam di masa lalu dalam perspektif Teologi Pembebasan yang menuntut perubahan struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Asghar bahkan memaksa kita untuk mernikirkan kembali asumsiasumsi kepercayaan, pemikiran dan sikap keberagamaan kita secara radikal. Tulisan Asghar disini membantu kita untuk melakukan pemikiran kembali itu.

F. Analisis Pemikiran Tokoh Teologi Pembebasan Islam

1. Ali Syariati dan Humanisme Islam

Ali Syariati adalah seorang sarjana muslim yang disebut-sebut sebagai seorang ideolog revolusi Islam di Iran. Ia melahap habis pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, dan secara cerdik menggunakan hazanah tersebut secara kritis untuk menganalisis kondisi sosial politik umat Islam. Usaha besar Syariati terletak pada upayanya untuk membeberkan kekhususan ideologi dan kebudayaan Islam, yang dengan demikian menunjukkan terdapat beberapa asas pokok pembebasan dalam agama Islam.

Ali Syariati menganalisis bahwa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat nilai-nilai humanisme sejati yang bersifat ilahiyah sebagai warisan budaya moral dan keagamaan.Manusia adalah makhluk yang sadar-diri, dapat membuat pilihan-pilihan dan dapat menciptakan, sehingga di sepanjang sejarah umat manusia berusaha merealisasikan nilai-nilai humanisme tersebut meski yang didapatinya adalah kegetiran dan petaka saat melawan kekuasaan jahat dan penindas.Mengenai hal ini Syariati menyajikan tokoh-tokoh simbolik Kain dan Habel untuk menjelaskan dan menganalisis sejarah kekuasaan.

Menurut Qur'an Kain dan Habel mempersembahkan kurban kepada Allah.Hanyak kurban Habel yang diterima, sementara Kain, karena iri hati, membunuh Habel.Kain adalah petani dan Habel adalah gembala.Syariati melihat hal ini sebagai munculnya monopoli produksi pertanian dan hak milik pribadi yang menyebabkan munculnya ketidaksamaan ekonomis dan adanya dominasi kekuasaan. Dalam pandangan Syariati figur simbolis Kain dan Habel ini hadir di tengah sejarah kita dalam tiga bidang: uang, kekuasaan dan agama. Fir'aun adalah tokoh simbolis yang melambangkan kekuasaan, Croesus melambangkan kekayaan, dan Balaam memerankan kaum rohaniawan dan agamawan yang memonopoli agama sebagai sistem upacara ritual. Ketiganya tak henti-hentinya berkolaborasi satu sama lain dalam membangun dan melestarikan kecenderungan sejarah. Di abad Pertengahan, manusia dikurung oleh Gereja Abad Pertengahan dan sistem teokrasi yang menindas, lalu di abad Modern yang menjunjung tinggi asas liberalisme manusia dijanjikan demokrasi sebagai kunci pembebasan namun

yang didapatinya adalah teokrasi baru di tangan kapitalisme. Demikian juga komunisme yang menjanjikan persamaan dan kesetaraan ternyata menghasilkan fanatisme kekuasaan yang sama mengerikannya dengan Gereja Pertengahan. Di sisi lain kapitalisme telah menjadi imperialisme dan terus berkembang menjadi sebuah sistem yang mendominasi ekonomi dan kebudayaan negara-negara dunia ketiga.

Kapitalisme telah menciptakan kebudayaan materialis yang seragam dan dalam proses melucuti akar-akar kebudayaan dan keagamaan rakyat, melucuti jati diri dan kemanusiaan mereka sehingga menjadi objek-objek yang mudah dieksploitasi. Dan celakanya dominasi budaya Barat ini dilestarikan secara sukarela oleh para intelektual setempat tanpa memahami hakikat baru penjajahan atas negara-negara dunia ketiga ini. Dalam pandangan Ali Syariati semua ideologi dunia ini telah gagal membebaskan manusia dan sebaliknya menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru dan penindasan baru pula dalam ungkapan dan sarana yang berbeda.Karenanya untuk mengatasi problem sosial ini harus dicari jalan baru, sebuah jalan ketiga yang menurut Ali Syariati bisa diperankan oleh Islam. Dalam konteks ini Ali Syariati nampaknya memimpikan lahirnya nabi-nabi baru. Nabi-nabi baru yang diperankan oleh para pemimpin spiritual atau intelektual sebagai para pemikir bebas yang telah memperoleh pencerahan.

Menurut hemat penulis, gagasan Ali Syariati ini sangat dekat dengan gagasan Gramsci yang memberi arti penting bagi keberadaan intelektual organik. Sebagaimana Gramsci, Ali Syariati menggambarkan nabi-nabi baru atau para pemikir bebas ini sebagai pemimpin spiritual atau intelektual yang mampu berbahasa selaras dengan bahasa rakyat pada zamannya, juga mampu merumuskan pemecahan-pemecahan masalah sesuai dengan suarasuara dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Mereka membimbing dan bekerja demi keadilan, serta berjuang demi pembebasan umat manusia dari ketidakadilan, penindasan, pemiskinan dan penjajahan.Inilah makna kesyahidan menurut Ali Syariati, yang harus dijalani oleh para Nabi yang dalam tradisi Syiah pernah dihadapi oleh Imam Husayn (Michael Amaladoss, 2000: 238-240).

Ali Syariati membubuhkan spirit pembebasan Islam dalam sebuah bait doa dalam Martyrdom berikut ini: Ya Allah, Tuhan orang-orang yang terampas! Engkauhendak merahmati, Orang-orang yang terampas di dunia ini, Orang kebanyak yang bernasib tak berdaya, Dan kehilangan hidup, Orang yang diperbudak sejarah,Korban-korban penindasan, Dan penjarahan waktu, Orang-orang celaka di atas bumi ini, Menjadi pemimpin-pemimpin umat manusia, Dan pewaris-pewaris bumi, Sekarang sudah tiba waktunya, Dan orang-orang terampas di atas bumi ini, Merupakan pengharapan akan janji-Mu.

2. Asghar Ali Engineer dan Elemen Pembebasan dalam Qur'an.

Jika Ali Syariati menggali spirit pembebasan melalui pemaknaan atas tokoh-tokoh simbolis dalam hazanah kebudayaan Islam, maka Asghar Ali Engineer, seorang ahli teologi dan aktivis HAM ini, cenderung menggunakan pendekatan tekstual untuk menggali elemenelemen dan prinsip-prinsip pembebasan dalam Islam yang terangkum dalam penegasannya mengenai persamaan dan keadilan (Michael Amaladoss, 2000: 240-249). Namun demikian rupanya keduanya juga memiliki kedekatan konseptual. Sebagaimana Ali Syariati, Asghar Ali juga menganggap penting peran kenabian, terutama keberadaan Nabi Muhammad SAW dalam pembaruan sosial. Nabi Muhammad bukan sekadar guru, melainkan juga seorang pejuang dan aktivis yang diutus untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan penindasan. Ia membebaskan rakyat Mekkah dari ketidakadilan sosial dan ekonomi serta memberikan inspirasi pengikutnya untuk membebaskan dirinya dan masyarakat lain dari penindasan oleh kerajaan Romawi dan Sassanid.

Lebih jauh secara doktriner, menurut Asghar Ali, ajaran tauhid yang disampaikan Nabi tidak hanya mengandung makna teologis tentang konsep monoteisme Tuhan, tetapi juga memuat makna sosiologis sebagai kesatuan sosial. Argumentasi ini didasarkan pada firman Allah berbunyi: Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan, dan telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang termulia dari antara kamu semua di mata Allah adalah orang yang paling jujur (dan adil). Lebih lanjut kesatuan sosial yang diajukan Qur'an ini bukan hanya bermatra rasial dan etnis, tetapi juga meliputi penghapusan ketidakadilan akibat dari perbedaan ekonomis. Argumentasi ini didasarkan pada dua kata yang digunakan dalam Qur'an yang menyatakan keadilan, yakni adl dan qist. Adl bermakna.ganda, bisa berarti keadilan juga bisa berarti menyamakan atau meratakan.Lawannya adalah zulm yang berarti penindasan. Sedangkan qist bermakna distribusi yang sama, yang adil, yang wajar, atau pemerataan. Distribusi yang sama ini juga merujuk pada sumber-sumber daya jasmani, yang juga meliputi distribusi kekayaan sebagaimana dikukuhkan dalam Qur'an. Kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kamu orang-orang kaya (Qur'an, 59: 7)

Dari ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap orang tidak boleh menyimpan lebih banyak dari yang perlu, apalagi ditujukan untuk hidup berlebihan, bermewah-mewah dan berpamer ria. Karena cara hidup yang demikian itu akan mengantarkan pada kehancuran. Dan bila kami akan menghancurkan sebuah kota, kami mengirimkan perintah kepada penghuninya yang hidup bermewah-mewah,

dan kemudian mereka melakukan hal yang menjijikkan di dalamnya, dan dengan demikian dunia (terkutuk) terjadi padanya, dan kami membinasakannya sampai musnah sama sekali. (Qur'an, 17: 16). Selain teks-teks di atas, Qur'an juga secara eksplisit menunjukkan pembelaannya terhadap orang-orang miskin dan tertindas (kaum mustadh'afin). Berikut ini petikan ayat tersebut:Mengapa kamu tidak mau berjuang demi kepentingan Allah dan orang-orang lemah di tengah-tengah rakyat, dan demi kepentingan kaum perempuan dan anak-anak yang berkata: Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota yang orang-orangnya penindas ini (Qur'an, 4: 75). Juga: Dan kami ingin menunjukkan perkenan kepada orang-orang yang tertindas di atas bumi, dan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris (Qur'an, 28: 5). Demikian sentralnya konsep keadilan ini di dalam agama Islam, Qur'an berungkali menegaskan perintah dan ajakan untuk bersikap adil dalam segala urusan ketika berhubungan dengan semua orang dengan latar belakang apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman jadilah saksi-saksi teguh akan Allah dalam keadilan, dan jangan kamu biarkan kebencian akan orangorang manapun membujuk kamu sehingga kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat dengan kesalehan (Qur'an, 5: 8) Allah juga memberikan penegasan mengenai larangan berbuat royal dan boros yang menunjukkan hidup bermewah-mewahan: Perhatikan perhiasanmu di setiap tempat ibadah dan makan serta minumlah, tetapi jangan menjadi orang pemboros (peroyal) (Qur'an, 7: 31). Selain berbagai seruan untuk berbuat adil di atas, Islam juga mencontohkan bagaimana mempraktekkan tindakan yang adil itu dalam kehidupan.Melalui konsep zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam, setiap individu umat Islam diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaannya kepada kaum miskin yang tidak bisa terlibat dalam proses-proses produksi. Allah berfirman:Dan dalam kekayaan mereka orang-orang yang berkekurangan dan melarat (fakir miskin) mempunyai bagian semestinya (Qur'an, 51: 19).

Dalam bagian lain Allah berkata: Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Dialah yang menyingkirkan yatim piatu dan tidak mendesak orang-orang lain untuk memberikan makan orang-orang yang berkekuarangan. Celakalah orang-orang yang menjalankan shalat tapi tidak perduli dengan shalat mereka: yang pamer kesalehan tetapi tidak memberikan sedekah kepada orang-orang yang melarat (Qur'an, 107: 1-7). Demikianlah prinsip-prinsip dan semangat pembebasan dalam Islam yang dipantulkan melalui berbagai ayat dalam Kitab Suci Qur'an.Kenyataan itu semakin meneguhkan bahwa dalam tradisi Islam sendiri sesungguhnya memuat spirit pembebasan yang potensial menjadi suatu gerakan masif.Yakni suatu gerakan untuk melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan yang membuat rakyat miskin dan

terpinggirkan. Bahkan di bawah panji-panji keadilan dan kesamaan, teologi pembebasan dalam Islam melampaui berbagai ranah, mulai dari bersikap adil terhadap kaum perempuan sampai penghormatan dan sikap terbuka serta toleran terhadap agama-agama dan keyakinan lain yang dianut oleh umat manusia.

3. Hasan Hanafi dan Kiri Islam

Hassan Hanafi adalah seorang pemikir revolusioner, reformis tradisi intelektual Islam klasik, dan sekaligus penerus gerakan Al-Afghani.Ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Sorbonne, Paris, pada 1966, dan menjadi guru besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia menjadi terkenal setelah meluncurkan proyek pemikiran revolusionernya dalam sebuah jurnal Al-Yasar al-Islami: Kitabat fi Al-Nahdla Al-Islamiyah (Kiri Islam: Beberapa Esei tentang Kebangkitan Islam) yang terbit pada 1981 segera setelah kemenangan revolusi Islam di Iran.

Sejak saat itulah pemikiran Hassan Hanafi akrab diidentikkan dengan Kiri Islam yang merupakan manifesto ideologi pembebasan dalam Islam. Seperti apakah konsep Kiri Islam itu? Dalam sebuah artikel panjang berjudul Madza yakni al-yasar al-islami (Apakah Kiri Islam itu?) yang dimuat dalam jurnal Al-Yasar al-Islami, Hassan Hanafi menegaskan bahwa Kiri Islam adalah nama ilmiah atau istilah akademik yang menunjuk pada gagasan yang berpihak kepada orang-orang yang dikuasai, kaum tertindas, dan orang miskin. Kiri Islam adalah gerakan transformasi sosial untuk mengubah kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif dalam rangka menyuarakan mayoritas yang diam di antara umat Islam, membela kepentingan seluruh umat manusia, mengambil hak-hak kaum miskin dari tangan orang-orang kaya, memperkuat orang-orang yang lemah dan menjadikan manusia sama dan setara. Salah satu elemen revolusionernya bisa ditemukan dalam Qur'an berbunyi: Dan Aku menhendaki kemenangan orang-orang yang tertindas di bumi, dan menjadikan mereka pemimpinpemimpin dan pewaris-pewaris (Qur'an, 28: 5) (Kazuo Shimogaki, 1993: 85-90).

Sebagaimana Ali Syariati, Hassan Hanafi yang memperoleh pendidikan Barat di Paris memanfaatkan hazanah filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern untuk menganalisis kondisi sejarah dan realitas umat Islam di Arab dan di bagian dunia lain yang terpuruk dalam kemisikinan dan penjajahan. Melalui analisisnya yang tajam terhadap imperialisme Barat dan kondisi internal umat Islam inilah Hassan Hanafi akhirnya sampai pada gagasannya mengenai Kiri Islam. Hassan Hanafi memperingatkan pembacanya akan bahaya imperialisme kultural Barat yang bisa menghapus kekayaan budaya bangsa-bangsa serta menciptakan keterbelakangan. Liberalisme dan kapitalisme yang telah bermetamorfosis menjadi imperialisme budaya (pengetahuan) dan kapitalisme multinasional ternyata didikte oleh

kebudayaan Barat yang berperilaku seperti kolonial yang hanya melayani kelas-kelas elit yang menguasai aset negara.

Sementara di sisi lain mayoritas rakyat tetap tertindas, miskin dan terpinggirkan dari proses-proses sejarah yang menentukan ini. Celakanya, menurut Hassan Hanafi, pengaruh eksternal tersebut memperoleh dukungannya dari kondisi internal umat Islam sendiri.Tendensi keagamaan umat Islam telah terkooptasi kekuasaan yang hanya meletakkan Islam sebagai ritus dan kepercayaan ukhrawi. Tekstualisme dalam penafsiran Kitab Suci secara dramatis telah menjauhkan umat Islam dari kondisi eksistensi realnya, berupa keterbelakangan, kemiskinan dan ketertindasan.Alih-alih bisa membebaskan dari kondisikondisi ini, fenomena ritualisme itu telah menjadi topeng yang menyembunyikan dominasi Barat dan kapitalisme nepotis. Selain kedua hal di atas, bahaya lain juga datang dari Marxisme yang berpretensi mewujudkan keadilan dan menentang kolonialisme ternyata tidak diikuti dengan pembebasan rakyat dan pengembangan khazanah mereka (yakni khazanah agama-agama) sebagai energi untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemerdekaan nasional. Sementara nasionalisme revolusioner sendiri yang tampak berhasil membuat perubahanperubahan radikal dalam sistem politik dan ekonomi ternyata tidak berumur lama. Karena ia berhenti hanya sebatas slogan sehingga tidak mampu mempengaruhi kesadaran mayoritas rakyat (Kazuo Shimogaki, 1993: 91-92).

Akhirnya berlandaskan analisis sosial politik inilah Hassan Hanafi menganggap penting upaya untuk memperkuat jati diri umat Islam, yakni dengan memasuki medan percaturan yang paling mendasar dalam kebudayaan dan kesadaran historis masyarakat. Dan Kiri Islam ditujukan untuk kepentingan ini.Yakni membekali pribadi dan menggugah kesadaran untuk menyongsong kebangkitan rakyat melalui upaya revitalisasi pemikiran keislaman dengan memantapkan posisi rakyat dalam sejarah (Shimogaki, 1993: 140).

Proyek Kiri Islam Hassan Hanafi setidaknya meliputi dua aspek penting. Pertama, merevitalisasi dimensi revolusioner dalam khazanah intelektual Islam klasik. Kedua menantang peradaban Barat yang hegemonik. Pada aspek pertama, Kiri Islam telah menggali paradigma independen pemikiran keagamaan yang menekankan arti penting gerakan rasionalisme, naturalisme dan kebebasan manusia. Dalam hal ini Hassan Hanafi menilai mu'tazilah telah mewariskan tradisi yang berharga mengenai kebebasan dan tanggung jawab manusia atas perbuataannya, sehingga manusia menyadari perannya untuk selalu berusaha mewujudkan kebaikan melalui perbuatannya yang disertai dengan keyakinan iman. Dalam hal ini kepemimpinan umat islam harus berdasarkan pemilihan demokratis dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap muslim.

Demikian juga sesuai dengan tanggung jawabnya, manusia dituntut teguh untuk merebut hak-haknya dan mengembalikan martabatnya yang dirampas. Kiri Islam juga juga memperhitungkan semangat kaum Syi'ah yang menancapkan harga diri Islam melawan kolonialisme dan westernisme.

Dalam kehidupan sosial dan politik, Kiri Islam menggunakan pendekatan kemaslahatan serta membela kepentingan rakyat dalam penetapan hukum. Ini dianut berdasarkan paradigma fiqh dan usul-fiqh Malikiyah yang berasal dari tradisi Abdullah ibn Mas'ud yang dikembangkan dari Umar ibn Khattab yang membela kemaslahatan umat secara realistis dan mengetahuinya meskipun belum ada petunjuk wahyu hingga datang wahyu yang membenarkan pendapatnya. Oleh karena itulah dalam menafsirkan teks, Kiri Islam senantiasa menggunakan akal seoptimal mungkin sebagaimana yang dilakukan Hanafiyah dan memadukannya dengan cermin realitas sebagaimana Syafi'iyah, dengan tanpa meninggalkan komitmen pada teks itu sendiri sebagaimana dilakukan Hambaliyah. Ini karena bagi Kiri Islam, teks adalah refleksi atas realitas itu sendiri.Kiri Islam memperoleh akarnya dari filsafat rasional yang sudah dibangun oleh Al-Kindi dan Ibnu Rusyd, juga pada ilmu-ilmu rasional murni dalam khazanah klasik. Kiri Islam berpretensi untuk mengangkat kembali ilmu-ilmu klasik sepertimatematika, fisika, arsitektur, kimia, kedokteran, biologi, farmasi, dan sebagainya dalam pangkuan Islam. Kiri Islam juga berakar pada ilmu-ilmu kemanusiaan yang sudah diletakkan dasarnya oleh pendahulu kita, seperti ilmu bahasa, sastra, geografi, sejarah, psikologi dan sosiologi. Selain itu Kiri Islam juga memiliki akar pada ilmu-ilmu normatif tradisional murni (al-ulum al-naqliyah al-khalizhah), yakni ilmu yang pertama kali berkembang di sekitar wahyu seperti: ilmu-ilmu Qur'an, Hadist, Tafsir dan Fiqh.

Beberapa cabang itu bisa dikembangkan secara kontemporer. Misalnya asbab al-nuzuli dalam ilmu-ilmu Qur'an dimaksudkan untuk mengutamakan realitas, ilmu nasikh wa almansukh untuk melihat aspek gradualisme dalam penerapan syariah, dan lainnya. Semua ini bisa dikembangkan menjadi ilmu eksperimental, seperti statistik, sosiologi, historiografi, ideologi, sistem politik dan ekonomi. Kiri Islam juga mengkaji kembali ajaran tentang ibadah yang selama ini menjadi seolah-olah tujuan padahal sesungguhnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Menurut Hanafi, orang yang berhenti pada sarana tanpa pernah sampai tujuan maka ia sesungguhnya tak pernah shalat, puasa, haji dan syahadat. Syahadat tidak semata-mata mengucapkan Asyhadu an-la Ilaha Illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Melainkan sebuah persaksian yang aktif, yang dimulai dengan bentuk negatif la Ilaha yang bermakna negasi atas kekuatan penindas dan tuhan-tuhan palsu di sekitar kita, baik dalam bentuk

uang maupun kekuasan; lalu penetapan Illa Allah berarti hanya Allah yang Maha Perkasa (Kazuo Shimogaki, 1993: 95-106). Demikianlah dengan merevitalisasi seluruh khazanah intelektual klasik ini hendak ditunjukkan bahwa kebangkitan masyarakat Islam akan datang dari dalam, yakni melalui pengembangan dimensi internal umat Islam sendiri. Adapun aspek kedua dari proyek Kiri Islam adalah melawan hegemoni kebudayaan Barat.Dalam konteks ini tugas Kiri Islam adalah menghadapi ancaman imperialisme ekonomi korporasi multinasional dan imperialisme kebudayaan yang menggerogoti jati diri dan kemandirian umat. Tugas Kiri Islam adalah melokalisir Barat, yakni mengembalikan Barat kepada batasbatas alamiahnya dan menepis mitos bahwa Barat adalah pusat peradaban dunia yang berambisi menjadi paradigma kemajuan bagi bangsa-bangsa lain. Dengan penolakan ini berarti bangsa-bangsa non-Barat berusaha melawan dominasi dan hegemoni yang telah merenggut kemerdekaan dan kepribadian bangsa-bangsa lain, sehingga bisa menentukan nasib dan kesejahteraannya sendiri (Kazuo Shimogaki, 1999: 106-108).

G. Perspektif Islam, Tokoh Teologi Pembebasan & Pemikirannya

Setelah kita mendapat cuplikan latar belakang timbulnya teologi pembebasan kalangan Gereja Katolik. Bagaimana pula teologi pembebasan menurut pandangan Islam.Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri catatan sejarah. Sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan pelopor membebaskan orang-orang tertindas dan kaum dhu'afa. Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan orang-orang miskin dan tertindas. Begitu juga dengan para sahabat dan ulama-ulama yang sangat mencintai Islam mereka mempelopori memperjuangkan keadilan dan semangat membela kaum tak berdaya. Islam adalah agama social, menjunjung tinggi hak-hak orang lain, dan orang yang tidak memperdulikan kaum du'afa dikatakan pendusta Agama: Q.S. Al-ma'un. "1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin". Dari paparan ayat diatas, menunjukan bahwa adanya kewajiban memberikanmakan orang miskin, secara muradif berdosa bila tidak memperjuangan nasib-nasib orang tertindas dan terania. Terinspirasi inilah para ulama-ulama berkewajiban membela bahkan sampai-sampai melakukan perlawanan dalam rangka memperjuangkan pembebasan. Di bawah ini akan dibentangkan tokoh-tokoh dengan gigih memperjuangkan kebebasan, antara lain :

1. Asghar Ali Engineer

   Asghar Ali Engineer lahir di Bombay, India 1939. Beliau ini ahli teologi yang terdidik, disamping tekun membicarakan tentang pembebasan juga terlibat gerakan HAM dan usahauntuk meningkatan keselarasan antara

agama. Menurut Engineer sebagaimana dikutip Dayan lubis, bahwa tiga alasan upaya pembebasan: “Pertama: Islam, terutama teologi Islam selama ini berkembang tidak relevan lagi dengan konteks social yang ada. Kedua: Teologi itu pasti mengalami demistified dari apa yang sebenarnya dimaksudkan Islam Ketiga: Mengembalikan seperti semula komitmen Islam terhadap terciptanya keadilan socialekonomi dan tehadap golongan lemah.”

Asghar Ali mempertegaskan perjuangan membela dan menegakkan teologi pembebasan merupakan suatu perintah. Hal ini sesuai firman Allah sebagai dalil, (Q.S. An-Nisa’: 75 dan Q.S. Al-Qashos: 5). Akhirnya dengan dorongan yang kuat memperjuangkan nasib kaum tertindas serta menganggap teologi pembebasan suatu nilai yang suci dan tujuan ilahiyyah. Dan tahun 2004 beliau menerima pengahargaan Nobel Alternatif, The Right Livelihood Awards.Dan perlu dipahami upaya memperbaiki nasib merupakan titah yang harus dijujung tinggi.Hal ini sesuai dengan sinyal dalam Al-qur’an “Nasib suatu bangsa belum akan diperbaiki sebelum bangsa itu sendiri memperbaiki nasibnya”.

2. Muhammad Farid Essack

Maulana Farid Essack lahir 1959 di pinggiran Cape Town, Wymberg. Sejak kecil ia telah di tinggalkan oleh ayahnya. Hidup mereka sangatlah miskin.sekali, mereka hidup terlunta-lunta, ibunya harus bekerja keras untuk mendapat rezki, dan paling menyedihkan bagi Essack ibunya menjadi korban pemerkosaan. Sehingga untuk mengingat kembali teragedi itu ia menulis dengan karyanya, Qur’an Liberation and iPluralism, yang mengulas kembali tentang kisah sedih kehidupan yang dilalui sejak kecil.

Adapun pendapat Farid Essack, berteologi bukan berarti mengurusi urusan Tuhan semata, neraka, surga dan lain-lain.Tuhan adalah zat yang tidak perlu diurus, banyak mengurusi Tuhan itu adalah pekerjaaan sia-sia (mubazir).Teologi harus dipraksiskan, bukan digenggam erat-erat untuk tujuan kesalehan pribadi. Akan tetapi dengan mendekati dan mengasihi makhluknya, kita juga telah mengabdikan diri kepada Tuhan

Semangat Farid Essack di Afrika Utara mengembangkan teologi pembebasan dan pluralisme. Perjuangannya sesuai penafsiran atas ayat-ayat Alquran, Akhirnya Farid mampu membangkitkan semangat perlawanan orang dhu`afa dan petani miskin dari penindasan yang dilakukan para tengkulak dan tuan tanah sehingga perekonomian masyarakat miskin menjadi lebih baik.

3. Muhammad Yunus

Tokoh yang satu ini adalah Muhammad Yunus.Muhammad Yunus dengan aksi Grameent Bank-nya di Bangladesh, berhasil memberdayakan

kaum dhu`afa dan orangorang miskin, terutama wanita.Muhammad Yunus dengan melalui Grameent Bank memberikan pinjaman modal dengan pembayaran yang ringan dan terjun membimbing masyarakat miskin Bangladesh dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi mikro hingga mereka terlepas dari jeratan rentenir dan tengkulak seperti lintah darat.

Muhmamad Yunus ada kesaman dengan tokoh Asghar Ali yang terispirasi Surat AlMaun dan Al-Balad yang memerintahkan membebaskan perbudakan, menyantun anak yatim dan miskin. Akhirnya Muhammad Yunus pun terjun ke masyarakat mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan masyarakat miskin agar bekerja dan berwiraswasta secara mandiri dengan menciptakan produk-produk khas daerah dan industri rumah tangga.

4. Hasan Hanafi

Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo.Pendidikan di awali 1948. Sejak kecil ia mengetahui pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok dan aktivitas sosialnya. Adapun karya Hanafi, Kiri Islam (Al-Yasar Al-Islami) merupakan salah satu puncak sublimasi pemikirannya sejak revolusi 1952.Buku ini memuat tentang bagaimana sumbangan agama bagi kesejahteraan umat manusia. Adapun pokok pemikirannya antara lain:

Kritikan terhadap teologi tradisional, Umat Islam hendaknya orientasi perangkat konseptual system kepercayaan (teologi) sesuai dengan perubahan konteks politik terjadi. Umat Islam mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran sepanjang priode kolonialisasi karena mengikuti klasik, untuk itu perlu diubah berpola kepada kerangka koseptual baru yang berasal dari modern. Kegagalan para teologi tradisional disebabkan oleh sikap para penyusun teologi yang tidak mengaitkan dengan kesadaran murni dan nilainilai perbuatan manusia.

Teologi Islam klasik yang membicarakan ilmu ketuhanan tidak usah dipersoalkan akan tetapi hendaknya rekonstruksi, artinya membangun kembali sehingga terpungsi teologi itu menjadi ilmu-ilmu yang berguna bagi masa kini, menjadi solusi dari masalahah umat, bukan menjadi dogma-dogma keagamaan yang kosong, akan tetapi menjelma ilmu tentang pejuang sosial.

Hal ini senada yang dikatan oleh Zuhairi Misrawi, dokrin keagamaan mestinya dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada persoalan kemanusiaan, mengotekstualisasikan teologi dengan problem kemanusian. Adapun melatar belakangi diperlukan rekontruksi teologi menurut Hanafi adalah sebagai berikut: “Kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas ditengah-tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Pentingnya teologi baru ini bukan semata pada sisi teoritisnya, melainkan juga terletak

pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dalam sejarah. Salah satu kepentingan ini adalah memecahkan problem penduduk tanah di Negara-negara Muslim.Kepentingan teologi yang bersipat praktis (amaliyah fi'liyah) yaitu secara nyata diwujudkan dalam realita tauhid dalam dunia Islam.Hanafi menghendaki adanya teologi dunia yaitu teologi baru yang dapat mempersatukan umat Islam di bawah satu orde".

Selain tokoh-tokoh di atas masih banyak lagi yang lain, seperti: Maulana Sayyid A'la Maududi, tokoh yang kelahiran di India 25 November 1903 ini, sangat gentol memperjuangkan nasib kaum lemah, sehingga ia mendirikan Jama'at Al-Islami. Menurutnya, orang-orang yang mempunyai iman dalam hatinya tidak akan mau dikuasai oleh suatu sistem yang jahat dan tidak akan menggerutu memberikan harta kekayaannya dan mereka hidup dalam perjuangan menegakan Islam. Jihad yang pertama sebenarnya adalah perjuangan moral di masyarakat Islam yang bertujuan pembaharuan baik yang berpusat pada peribadi dan social agar tidak ditundukan kepada ketidak adilan.

Begitu juga Ali Shariati lahir 23 November 1933, di Mazinan, dekat Mashhad, Iran. Menurutnya: "Kebudayaan orang Muslim adalah campuran campuran iman, idealisme, dan kerohanian namun dan daya dengan semangat nya yan menonjol yaitu persamaan dan keadilan …tidak seperti agama lain yang membenarkan kemiskinan , Islam mengutuk kemiskinan …unsur-unsur didasar pada usaha gigih… Allah menghormati martabat manusia."

Shariati juga terkenal dengan sebuatan kaum mustadh'afin.Ia menyebutkan "Allah orangorang tertindas, orang berjuang untuk kebebasan mereka, orang-orang yang mati syahid demi kebenaran dan keadilan". Di samping itu ia terkenal juga "rausan fikr" atau orang-orang terserahkan. Seorang yang memperoleh pencerahan adalah orang yang menyadari pertentangan social yang ada dan sebab-sebabnya yang sesungguhnya dan mengetahui kebutuhan zamannya, memberikan pemecahan dan mengambil bagian menggerakan dan mendidik masyarakat yang statis dan bodoh. Orang mendapat pencerahan ia harus meneruskan jalan Nabi untuk membimbing, memecahkan masalah masyarakat.

Di Indonesia teologi pembebasan lingkungan seperti Facri Ali, Komaruddin, Rumadi dan Abdul Mukti Ro'uf baru pada level tulisan dan membukanya dalam kalangan Islam umpamanya, Rumadi menulis artikel di harian Kompas yang menceritakan pekerjaan yang besar yang harus dilakukan agamawan, untuk mengembalikan semangat revolusioner agama, yaitu menjadi agama sebagai proses liberalisasi dan itu suatu kepastian. Menurutnya ada tiga hal yang harus dihapus pada diri manusia yaitu: 1). Membebaskan diri

dari keterikatan teks agama secara berlebihan, ini berarti bukan teks agama tidak penting, tetapi teks agama perlu dilihat sebagai jalan untuk mencari inspirasi pembebasan. 2). Melepaskan diri dari kungkungan trdisional dalam pengertian luas, termasuk tradisi pemikiran keagamaan yang tidak memihak orang miskin. 3). Melepaskan diri dari kungkungan sejarah yang menjadikan kita sulit melakukan ekpresi secara liberal terhadap agama.

Dari beberapa paparan pemikiran-pemikiran tokoh di atas, seperti Asghar Ali Engineer, Maulana Farid essack, Muhammad Yunus, Hasan Hanafi, Maulana Sayyid A'la Maududi dan Ali Shariati di atas, menunjukkan bahwa teologi yang diinginkan dan sudah dilaksanakan adalah teologi yang dapat memecahkan problema/masalah umat manusia, sehingga masyarakat memperoleh kebebesan bukan tertindas. Manusia harus berjuang bukan berdiam diri atau cukup mengatakan bahwa orang miskin atau du'afa adalah takdir Tuhan, mengimbau mereka agar bertahan,sabar mengahadapi penderitaan.

Perlu dipahami keterbelakangan dan kemundurun umat Islam disebabkan salah dalam berteologi. Jauh sebelumnya tokoh-tokoh Timur Tengah (tokoh Modernis), Abdul Wahab (1703- 1787 M), M.Abduh, Rasyid Ridha (1865-1935 M), Sayid Amer Ali, Rasyid Pasha (1800-1858), Muhammad Ali Pasha (1769-1849) mereka ini bukankah sudah mengadakan gerakan yaitu kembali kepada teologi Islam sejati. Umat Islam harus merubah nasib, umat Islam hendaklah berteologi yang berwatak free-will, rasional dan mandiri.

Umat Islam jangan mau dibelenggu (fanatisme) aliran-aliran sehingga mengakibatkan orang tidak bisa menerima ide-ide baru yang datang dari luar golongannyalah yang benar.Inilah menghabat pembaharuan yang mensyaratkan dinamisme dan keterbukaan.Dan mengagap nasib seseorang ditentukan oleh Allah SWT, dari teologi yang salah ini sehingga umat tidak mau berusaha lalu menjadi fasif.Kefasifan tentu menjadi orang tidak maju dan berkembang.

MATERI MENEJEMEN AKSI

A. Pengertian Manajemen Aksi

1. Manajemen

Manajemen Secara umum memiliki pengertian pengelola potensi atau isi di dalam sebuah komunitas atau organisasi. Sedangkan ***Aksi*** berasal dari kata “Action” yang bermakna “ Gerak”, Gerakan adalah berpindahnya energi, volume, tempat dan waktu dari kondisi semula menuju kondisi kemudian.

Aksi di dalam dunia organisasi pergerakan dapat diterjemahkan sebagai segala pikiran dan perbuatan atau tindakan yang mengarah pada capaian-capaian terhadap tujuan perjuangan itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen aksi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu massa aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target awal hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Aksi umumnya dilatarbelakangi oleh ***matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog***. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil ‘jalan pintas’ dalam bentuk aksi. Aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan demikian isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi snowball.

Salah satu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah serta penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi massa. Dalam negara yang berdemokrasi, aksi menjadi cara yang dilegalkan, oleh karena itu lembaga pendidikan seperti universitas juga harus berperan sebagai guardian of value dari pemerintah serta masyarakat. Mengapa cara yang dipilih adalah aksi? karena aksi berdampak pada dua sisi, yakni sisi ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta penyadaran masyarakat atas sebuah isu. Sehingga aksi masih menjadi cara yang relevan untuk dilakukan.

B. Landasan Hukum Aksi.

UU. NO. 9 TAHUN 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Beberapa hal yang penting dalam undang-undang ini :

1. Penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh dilaksanakan ditempat tertentu, antara lain Istana Presiden (Radius 100m), tempat ibadah (Radius 150 m), Instalasi militer dan obyek vital nasional (Radius 500 m) dari pagar luar.
2. Dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum (Sajam, Molotov, dll)
3. Menyampaikan laporan atau pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat.

4. Surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktu dan acara, rute, jumlah massa, penanggung jawab aksi dimana dalam UU ini 100 massa 1 orang penanggung jawab.

C. Tahapan-tahapan aksi masa.

1. Persiapan

Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya lahir dari adanya syarat objektif bahwa institusi atau lembaga berwenang tidak tanggap terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu diperlukan adanya tekanan (pressure) massa untuk mendorong persoalan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di intra parlemen maupun dimuka pendapat umum (public opinion) di luar parlemen. Semua hal yang berkaitan dengan tekanan mengandalkan kekuatan massa harus dipersiapkan sehingga dapat berjalan optimal. Persiapan aksi massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran diskusi yang diorientasikan maupun memunculkan:

2. Isu/tuntutan

Isu atau tuntutan yang akan diangkat dalam aksi massa harus dibicarakan dan diberdebatkan. Penentuan isu sangat penting karena akan memberikan batasan gerak secara keseluruhan dari proses aksi massa di lapangan.

3. Prakondisi Aksi

Prakondisi aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi massa berlangsung. Pra kondisi tersebut biasanya dalam bentuk aksi penyebaran, selebaran, penempelan poster, grafiti action, dll. Tujuan pra kondisi aksi adalah untuk mensosialisasikan rencana aksi massa beserta isu/tuntutannya, serta memanaskan situasi pada sasaran kampanye atau sasaran aksi.

4. Perangkat aksi masa.

Perangkat aksi adalah pembagian kerja partisipan aksi massa. Perangkat aksi massa disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat sebagai berikut:

a. **Koodinator Umum**. Pimpinan umum dan penanggung jawab umum massa aksi. Kordum berfungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua panitia aksi harus tunduk pada keputusan kordum saat aksi berjalan.

b. **Koordinator lapangan.** Korlap bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak ataupun membubarkan/mengahakhiri aksi massa ditentukan oleh korlap. Korlap hendaknya orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan komunikatif.

c. **Orator.** Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi massa dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator (*orang yang melakukan/penghasut*). Yang membakar semanagat massa.

d. **Humas dan jaringan aksi.** Perangakat yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi massa kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.

e. **Negosiator.** berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung.

DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat kemanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.

f. **Mobilisator.** Bertugas memobilasisi massa, menyalurkan kepada masa untuk bergabung pada aksi massa yang akan digelar. Kerja mobilisasi massa berlangsung sebelum aksi dilaksanakan.

g. **Advokasi**. Perbenturan antara kedua massa dengan aparat keamanan perlu dihindari, akan tetapi jika hal itu terjadi dan berakhir dengan penangkapan terhadap aktivis massa diperlukan peran tim advokasi yang bertugas membela dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

h. **Asisten teritorial/ keamanan/ sweaper/ dinamisator lapangan.** Sering terjadi aksi masa radikal menjadi aksi massa anarkis karena emosi terpancing untuk melakukan tindakan destruktif. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam ini dilakukan dengan melengkapi aksi massa dengan perangkat asisten teritorial (aster). Aster atau disebut juga keamanan atau sweaper bertugas mencegah terjadinya penyusupan oleh pihak luar yang bertujuan memperkeruh suasana. Tugasnya mengamati kondisi massa. Selain itu juga aster berfungsi mengagitasi massa dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan agar aksi massa tetap tampil semangat.

i. **Logistic dan medical rescue.** Perangkat logistic bertugas menyediakan perlengkapan-perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. Sedangkan medical rescue bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantan p3k terhadap masa yang kesehatan fisiknya terganggu ketika aksi massa berlangsung.

j. **Dokumentasi.** Divisi ini bertugas mengabadikan penyelenggaraan aksi massa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan kronologi.

k. **Sentral informasi.** Sentral informasi adalah nomor telepon yang dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi masa, situasi lapangan, sampai dengan informasi-informasi lainya.

D. Kelengkapan Aksi Massa

Selain kelengkapan struktur berupa perangkat aksi massa, dibutuhkan pula kelengkapan material yang berupa instrumen aksi massa, antara lain sebagai berikut ini:

1. **Poster** adalah kertas ukuran lebar yang bertuliskan tuntutan aksi massa dipermukaanya. Poster berisi tuntutan aksi yang ditulis tebal dengan spidol atau cat agar jelas dibaca oleh massa ditulis dengan singkat dan jelas.
2. **Spanduk** adalah bentangan kain yang ditulis tuntutan-tuntutan atau nama komite aksi yang sedang menggelar aksi massa.
3. **Selebaran** adalah lembaran kertas yang memuat informasi agitasi dan propaganda kepada massa yang lebih luas agar memberikan dukungan terhadap aksi massa.
4. **Pengeras suara** adalah perangkat keras elektronika yang berfungsi memperbesa suara.
5. **Pernyataan sikap/ statemen** adalah pernyataan tertulis yang memberikan gambaran sikap massa terhadap satu kebijakan satu institusi/perorangan dibacakan dibagian akhir proses aksi massa. Penyusunannya dilakukan oleh humas atau dvisi logistik.
6. **Rute Aksi,** harus dipersiapkan dan dipahami semuruh massa aksi.

E. Langkah taktis selanjutnya

1. **Massa persiapan aksi.** Kehadiran massa dalam jumlah yang massif dalam aksi massa merupakan faktor yang menentukan keberhasilan aksi massa. Semakin besar kemampuan aksi suatu komite aksi dalam hal mobilitas massa untuk memberikan support akan semakin memberikan kontribusi positif terhadap aksi massa. Maka pada tahap persiapan aksi massa dipersiapkan perangkat aksi/devisi khusus bekerja memobilisasi seelum beraksi berlangsung.
2. **Target aksi.** Target aksi adalah tujuan-tujuan minimal dan maksimal yang akan diaraih dalam aksi massa tersebut. Misalnya aksi massa dengan target membangun persatuan dan solidaritas target mengkampanyekan isu/tuntutan target memenangkan tuntutan dll.
3. **Sasaran waktu.** Mobilisasi massa akan diarahkan kemana senantiasa dibicarakan dalam pra aksi massa. Instansi atau lokasi yang dituju disesuaikan dengan isu/tuntutan yang diangkat. Oleh karna itu, ditentukan pola metode aksi massa yang diterapkan: rally dari satu titik awal menuju sasaran atau massa langsung memobilisasi kesasaran tujuan.

F. Pasca Aksi

1. **Absensi,** sebagai pemastian terhadap jumlah peserta aksi yang terlibat selama
2. **pelaksanan aksi.** Evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari aksi
3. **Rekomendasi,** dari hasil-hasil yang telah dicapai melalui aksi dapat dikerangkakan menjadi sebuah masukan untuk gerakan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Peranan kelembagaan organisasi di lingkungan yang dihadapi menjadi mutlak untuk dipersiapkan. Pikiran tanpa praktek hanya akan melahirkan mimpi saja, sedangkan praktek tindakan tanpa pikiran hanya akan melahirkan ugal-ugalan atau anarki gerakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bung Karno bahwa gerakan harus Massa Aksi (Massa yang sadar akan pikiran dan perbuatannya) bukan Aksi Massa (Aksi yang gemerlap tampilannya saja atau hanya ikut-ikutan). Program perjuangan organisasi pergerakan yang dipraktekkan dalam Manajemen Aksi dan Propaganda harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

MATERI ANALISIS SOSIAL II

Sebelum dibahas lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya mengenai berbagai aliran ideologi dan keyakinan serta teori tentang perubahan sosial dan kritik pembangunan, maka terlebih dahulu dalam bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai apa latar belakang yang mempengaruhi terbentuknya teori-teori tersebut. Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk suatu teori adalah apa yang dikenal dengan istilah paradigma (*paradigm*). Pembahasan mengenai masalah paradigma ini perlu dilakukan mengingat pentingnya paradigma dalam membentuk dan mempengaruhi teori maupun analisis seseorang. Pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satunya bergantung pada paradigma yang dipergunakan. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut, uraian ini akan dimulai dengan menjawab pertanyaan dasar apa sesungguhnya yang dimaksud dengan paradigma itu?

Paradigma Sosial

Sebagaimana diuraikan Mansour Faqih, paradigma secara sederhana dapat diartikan bagai kacamata atau alat pandang. Namun, pengertian yang lebih akademis dapat dipahami dari beberapa pemikiran yang akan diuraikan berikut. Pada dasarnya, istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Khun menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Dalam buku itu Khun menjelaskan tentang model bagaimana suatu aliran teori ilmu lahir dan berkembang menurutnya disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang lain. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori.[78]

Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori tersebut.

Paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu realitas. Justru kekuatan sebuah paradigma terletak pada kemampuannya membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta apa metode yang kita gunakan dalam meneliti dan

[78] Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1., 2001), hlm. 43

berbuat. Paradigma, sebaliknya, mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin kita ketahui.

Pentingnya Teori Sosial

Teori dan fakta berjalan secara simultan, teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah di analisis melalui teori teori sosial. Teori sosial melibatkan isu isu, fenomena, dan kasus dari kajian filsafat dan ilmu sosial. Hal tersebut ada untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakekat aktifitas sosial dan perilaku manusia yang di tempatkan dalam realitas empiris. Charles lemert dalam *Sosial Theory: The Multicultural And Classic Readings* menyatakan bahwa "teori sosial memang merupakan basis dan pijakan teknis untuk bisa *survive*".

Teori sosial merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu yang berakar pada positivisme. Menurut Antony Giddens, secara filosofis terdapat dua macam analisis sosial. Pertama, analisis institusional, yaitu analisa yang menekan pada keterampilan dan kesetaraan aktor yang memperlakukan institusi sebagai sesuatu yang di produksi terus menerus. Kedua, analisis perilaku strategis, adalah analisa yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial. Analisis sosial memiliki bobot untuk mengubah (mendorong proses perubahan). Jika demikian, analisis sosial merupakan salah satu simpul dalam siklus kerja transformatif. Dalam studi ilmu sosial. Untuk menganalisis kondisi sosial maka kita harus berpijak dalam empat paradigma (cara pandang) yang di dasarkan pada perbedaan anggapan materi tentang sifat dasar ilmu sosial dan sifat dasar masyarakat.

Paradigma-Paradigma Sosiologi

Paradigma sebagai anggapan-anggapan meta-teoritis yang mendasar yang menentukan kerangka berfikir, asumsi dan cara kerjanya teori sosial. Empat paradigma tersebut yang dibangun atas pandangan pandangan yang berbeda mengenai dunia sosial satu dengan yang lain adalah humanis radikal, srukturalis radikal, fenomonologis/interpretatif dan fungsionalis.

1. **Humanis Radikal**

   Humanis radikal cenderung menekankan perlunya menghilangkan atau mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Namun demikian, pandangan dasar yang penting bagi humanis radikal adalah bahwa kesadaran manusia telah dikuasai atau dibelenggu oleh suprastruktur ideologis di luar dirinya yang menciptakan pemisah antara dirinya dengan kesadaran yang murni (alienasi). Atau membuatnya dalam kesadaran palsu (*false consciouness*) yang menghalanginya mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati.

Karena itu, agenda utamanya adalah memahami kesulitan manusia dalam membebaskan dirinya dari semua bentuk tatanan sosial yang menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia. Penganutnya mengecam kemapanan habis-habisan. Proses-proses sosial dilihat sebagai tidak manusiawi. Untuk itu mereka ingin memecahkan masalah bagaimana manusia bisa memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka dalam pola-pola sosial yang mapan untuk mencapai harkat kemanusiaannya. Meskipun demikian, masalah-masalah pertentangan struktural belum menjadi perhatian mereka. Paulo Freire misalnya dengan analisisnya mengenai tingkatan kesadaran manusia dan usaha untuk melakukan "konsientisasi", yang pada dasarnya membangkitkan kesadaran manusia akan sistem dan struktur penindasan, dapat dikategorikan dalam paradigma humanis radikal.

Peta kesadaran masyarakat Paulo Friere (1970)

Kesadaran Magis	**Kesadaran Naif**	**Kesadaran Kritis**
Magical Conciousness	***Naival Conciousness***	***Critical Conciusness***
Perubahan sosial ditentukan oleh: Natural Supernatural.	Perubahan sosial ditentukan oleh: Etika, Kreativitas, *Need For Achievement.*	Perubahan sosial ditentukan oleh: Sistem Politik & Budaya.
Berimplikasi pada: Kesadaran Fatalistik.	Berimplikasi pada: Kesadaran Reformatif.	Berimplikasi pada: Kesadaran Transformatif.

2. Strukturalis Radikal

Penganut paradigma ini seperti kaum humanis radikal memperjuangkan perubahan sosial secara radikal tetapi dari sudut pandang obyektivisme. Pendekatan ilmiah yang mereka anut memiliki beberapa persamaan dengan kaum fungsionalis, tetapi mempunyai tujuan akhir yang saling berlawanan. Analisisnya lebih menekankan pada konflik struktural, bentuk-bentuk penguasaan dan pemerosotan harkat kemanusiaan. Karenanya, pendekatannya cenderung realis, positivis, determinis, dan nomotetis.

Kesadaran manusia yang bagi kaum humanis radikal penting, justru oleh mereka dianggap tidak penting. Bagi kaum strukturalis radikal yang lebih penting justru hubungan-hubungan struktural yang terdapat dalam kenyataan sosial yang nyata. Mereka menekuni dasar-dasar hubungan sosial dalam rangka menciptakan tatanan sosial baru secara menyeluruh. Penganut paradigma strukturalis radikal terpecah dalam dua perhatian, pertama lebih tertarik pada menjelaskan bahwa kekuatan sosial merupakan kunci untuk menjelaskan perubahan sosial. Sebagian mereka lebih tertarik pada keadaan penuh pertentangan dalam suatu masyarakat.

Paradigma strukturalis radikal diilhami oleh pemikiran setelah terjadinya perpecahan epistemologi dalam sejarah pemikiran Marx, di samping pengaruh Weber. Paradigma inilah yang menjadi bibit lahirnya teori sosiologi radikal. Penganutnya antara lain Luis Althusser, Polantzas, Colletti, Randell Collins, J Turner, W Mills, dan G Simmel.

3. Paradigma Interpretatif (Fenomenologis)

Paradigma ini sesungguhnya menganut pendirian sosiologi keteraturan seperti hanya fungsionalisme, tetapi mereka menggunkan pendekatan subjektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan mereka di dasarkan pada pandangan bahwa manusia hidup serba tertib, terpadu, mapan, dan kesetiakawanan, pertentangan penguasa sama sekali tidak menjadi benturan meraka. Mereka ingin memahami kenyataan sosial menurut apa adanya, yakni mencari sifat yang paling dasar dari kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang mengamati.

Pendekatannya cenderung nominalis, antipositivis dan simbolik. Kenyataan sosial muncul karena dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang. Karenanya, mereka berusaha menyelami jauh ke dalam kesadaran dan subjektivitas pribadi manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada di balik kehidupan sosial. Sungguhpun demikian, anggapan-anggapan dasar mereka masih tetap didasarkan pada pandangan bahwa manusia hidup serba tertib, terpadu dan rapat, kemapanan, kesepakatan, kesetiakawan. Pertentangan, penguasan, benturan sama sekali tidak menjadi agenda kerja mereka. Mereka terpengaruh lansung oleh pemikiran sosial kaum idealis Jerman yang berasal dari pemikiran Kant yang lebih menekankan sifat hakikat rohaniah daripada kenyataan sosial. Tokoh dari paradigma ini antara lain Herbert Mead, Cooley, William James, Becker, Anselm Strauss, Norman Dezin, Aoron Cicourel, Jack Douglas, H Blummer, John Dewey, dan Alfred Schutz.

4. Paradigma Fungsionalis

Paradigma ini yang paling dianut, pandangan fungsionalis berakar pada tradisi sosiologi keteraturan, paradigma ini lebih berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa langkah-langkah praktis untuk pemecahan praktis juga. Mereka lebih mendasarkan pada filsafat rekayasa sosial sebagai dasar dalam perubahan sosial, serta menekankan cara-cara memelihara, mengendalikan atau mengontrol keteraturan harmonis serta kestabilan sosial.

Paradigma ini pada dasamya berusaha menerapkan metode pendekatan pengkajian masalah sosial dan kemanusiaan dengan cara yang digunakan ilmu alam dalam memperlakukan objeknya. Paradigma ini dimulai di Prancis pada dasawarsa pertama abad ke-19 karena pengaruh karya Comte, Spencer, Durkheim, dan Pareto. Aliran ini berasal dari asumsi bahwa realitas sosial terbentuk oleh sejumlah unsur

empirik nyata dan hubungan antar semua unsur tersebut dapat dikenali, dikaji, diukur dengan pendekatan dan menekankan alat seperti yang digunakan dalam ilmu alam. Menggunakan kias ilmu mekanika dan biologi untuk menjelaskan realitas sosial pada dasarnya adalah prinsip yang umumnya digunakan oleh aliran ini. Namun demikian, sejak awal abad ke-20, mulai terjadi pergeseran, terutama setelah dipengaruhi oleh tradisi pemikiran idealisme Jerman seperti Max Weber. Sejak saat itu banyak kaum fungsionalis mulai meninggalkan rumusan teoretis dari kaum objektivis dan mulai bersentuhan dengan paradigma interpretatif yang lebih subjektif. Kias mekanika dan biologi mulai bergeser melihat manusia atau masyarakat, suatu pergeseran pandangan menuju para pelaku langsung dalam proses kegiatan sosial. Tokoh dari paradigma ini yaitu Herbert Spencer, Emil Durkheim, Alfred R. Brown, Tallcot Parsons, dan Robert K. Merton.

Langkah Praxis Analisa Sosial.

Apakah Analisa Sosial Itu?

Suatu proses analisa sosial adalah usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis. Sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Suatu analisis pada

dasarnya "mirip" dengan sebuah "penelitian akademis" yang berusaha menyingkap suatu hal atau aspek tertentu.

Dalam proses ini yang dilakukan bukan sekedar mengumpulkan data, berita atau angka, melainkan berusaha membongkar apa yang terjadi sesungguhnya, bahkan menjawab mengapa demikian, dan menemukan pula faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh kepada kejadian tersebut. Lebih dari itu, analisis sosial, seyogyanya mampu memberikan prediksi ke depan: kemungkinan apa yang terjadi.

Analisa sosial merupakan upaya untuk mengurai logika, nalar, struktur, atau kepentingan dibalik sebuah fenomena sosial. Analisa sosial bukan semata deskripsi sosiologis dari sebuah fenomena sosial. Analisa sosial hendak menangkap logika struktural atau nalar dibalik sebuah gejala sosial. Analisa sosial dengan demikian material, empiris, dan bukan sebaliknya, mistis, atau spiritualistik. Analisa sosial menafsirkan gejala sosial sebagai gejala material. Kekuatan dan gagasan ideologis dibalik gejala sosial harus dianalisa.[79]

Wilayah Analisa Sosial

1. Sistem-sistem yang beroperasi dalam suatu masyarakat.

[79] Nur Sayyid Santoso Kristeva, *MANIFESTO WACANA KIRI Membentuk Solidaritas Organik*, (Cilacap: LKSD, 2012), hlm. 384.

2. Dimensi-dimensi obyektif masyarakat (organisasi sosial, lembaga-lembaga sosial, pola perilaku, kekuatan-kekuatan sosial masyarakat)
3. Dimensi-dimensi subyektif masyarakat (ideologi, nalar, kesadaran, logika berpikir, nilai, norma, yang hidup di masyarakat).

Pendekatan Dalam Analisa Sosial

1. **Historis**: Dengan mempertimbangkan konteks struktur yang saling berlainan dari periodeperiode berbeda, dan tugas strategis yang berbeda dalam tiap periode.
2. **Struktural**: Dengan menekankan pentingnya pengertian tentang bagaimana masyarakat dihasilkan dan dioperasikan, serta bagaimana pola lembaga-lembaga sosial saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada.

Bagaimana Hasil Analisa Sosial?

Apakah hasil kesimpulan dari analisa sosial bersifat final? tentu saja tidak. Karena hasil dari analisa tersebut dapat dikatakan hanya merupakan kebenaran tentatif, yang bisa berubah sesuatu dengan fakta atau data dan temuan-temuan yang baru. Dengan demikian, analisa ini bersifat dinamis, terus bergerak, memperbarui diri, dikaji ulang dan terus harus diperkuat dengan fakta-fakta pendukung. Hasil analisa bukan suatu dogma, atau sejenis kebenaran tunggal.

Batas Analisa Sosial

1. Analisa sosial bukanlah kegiatan monopoli intelektual, akademisi, atau peneliti. Siapapun dapat melakukan analisa sosial.
2. Analisa sosial tidaklah bebas nilai.
3. Analisa sosial memungkinkan kita bergulat dengan asumsi-asumsi kita, mengkritik, dan menghasilkan pandangan-pandangan baru.

Siapa Pelaku Analisa Sosial?

Semua pihak atau pelaku sosial yang menghendaki untuk mendekati dan terlibat langsung

dengan realitas sosial. Bicara tentang analisis sosial, pada umumnya selalu dikaitkan dengan dunia akademik, kaum cendikiawan, ilmuwan atau kalangan terpelajar lainnya. Ada kesan yang sangat kuat bahwa analisis sosial hanya milik “mereka”. Masyarakat awam tidak punya hak untuk melakukannya. Bahkan kalau melakukan, maka disediakan mekanisme sedemikian rupa, sehingga hasil analisis awam itu dimentahkan.

Pemahaman yang demikian, bukan saja keliru, melainkan mengandung maksud-maksud tertentu yang tidak sehat dan penuh dengan kepentingan. Pengembangan analisis sosial di sini, justru ingin membuka sekat atau dinding pemisah itu, dan memberikatmya kesempatan kepada siapapun untuk melakukannya. Terlebih mereka yang paling dekat

dengan suatu kejadian, tentu akan merupakan pihak yang paling kaya dengan data dan informasi. Justru analisis yang dilakukan oleh mereka yang dekat dan terlibat tersebut akan lebih berpeluang mendekati kebenaran.

Dengan demikian, tanpa memberikan kemampuan yang cukup kepada masyarakat luas untuk melakukan analisis terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka, atau apa yang mereka alami, maka mereka menjadi sangat mudah "dimanipulasi", "dibuat bergantung" dan pada gilirannya tidak bisa mengambil sikap yang tepat.

Mengapa Gerakan Sosial Membutuhkan Analisa Sosial?

Kalau kita pahami secara lebih mendalam, aktivitas sosial adalah sebuah proses penyadaran masyarakat dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lain yang lebih baik (baca: kesadaran kritis). Kalau kita menggunakan isti1ah yang lebih populer, aktivitas semacam itu bisa juga disebut sebagai aktivitas pemberdayaan (*Empowerment*) untuk suatu entitas atau komunitas masyarakat tertentu.

Dari statemen tersebut, maka akan termuat suatu makna bahwa sebenarnya kesadaran kritis atas realitas sosial ini pada dasarnya ada pada setiap diri manusia. Hanya saja tingkat kesadaran kritis pada masing-masing orang itu kadarnya berbeda-beda. Dan aktivitas sosial adalah alat untuk menyadarkan atau memotivasi bagi munculnya kesadaran tersebut.

Meskipun, sebagaimana kita ketahui, bahwa membangun kesadaran kritis atas realitas sosial itu tidaklah semudah membalik tangan, karena kesadaran itu dilingkupi oleh persoalan-persoalan (sosial dan sebagainya), yang senantiasa membelenggunya.

Peta Aktivitas Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)

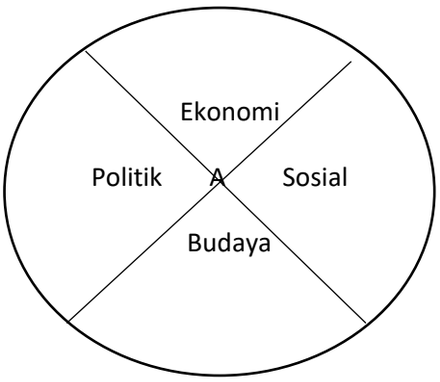

Aktivitas Sosial

aktivitas Non-Sosial

A: Kesadaran Kritis

Out-put: Aktivitas Gerakan Sosial yang Kritis Akan Realitas Sosial

Oleh karena itu, untuk masuk pada titik sentral kesadaran kritis atas realitas sosial sebagaimana dimaksud dalam gerakan sosial di atas, maka tidak mungkin untuk tidak membongkar, mengurai dan menganalisa persoalan-persoalan yang ada disekitarnya. Pada konteks inilah kompetensi analisis sosial dalam gerakan sosial.

Tahap-Tahap Analisa Sosial

1. Tahap menetapkan posisi, orientasi: pada intinya dalam tahap ini, pelaku analisa perIu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen (ideologis) dari tindakan analisa sosial.
2. Tahap pengumpulan dan penyusunan data: tujuan dan maksud dari tahap ini, agar analisa memiliki dasar rasionalitas yang dapat diterima akal sehat. Ujung dari pengumpulan data ini adalah suatu upaya untuk merangkai data, dan menyusunnya menjadi diskripsi tentang suatu persoalan.
3. Tahap analisa: pada tahap ini, data yang telah terkumpul diupayakan untuk dicari atau ditemukan hubungan diantaranya.

Peta Proses Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)

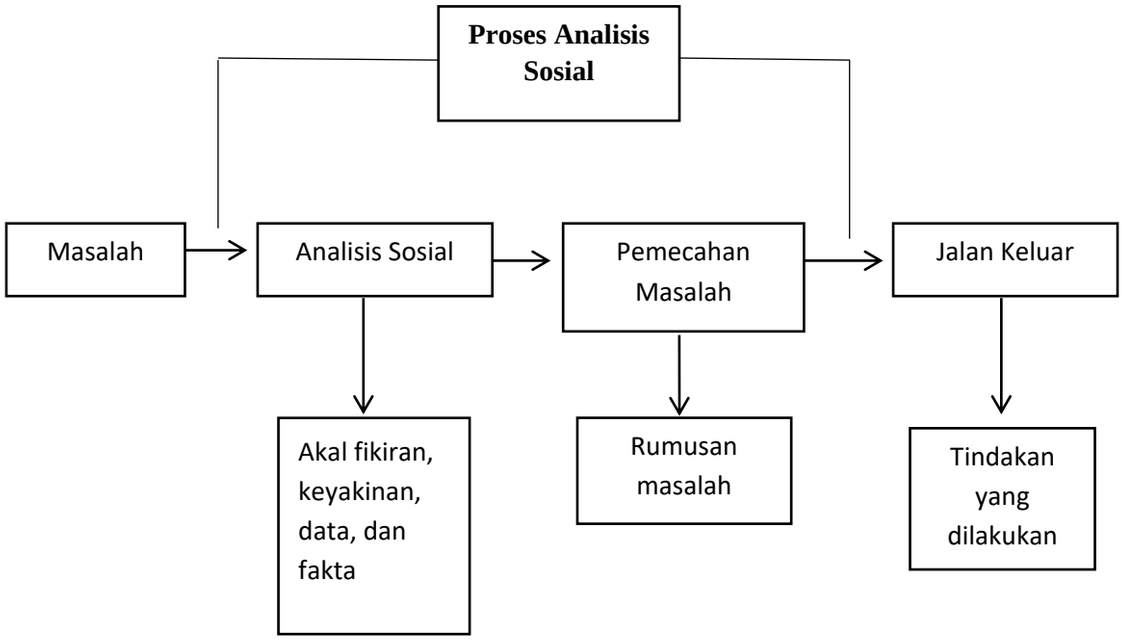

Model Analisis Sosial	
Analisis Statistika Sosial/Analisis Aktor/Analisis Stakeholder	Memetakan aktor dalam struktur sosial yang memiliki posisi dan peran serta kepentingannya.
Analisis Dinamika Sosial/Analisis Proses	Proses perubahan yang terjadi akan melalui tahapan baik linier maupun siklikal sebagai beriku: disorder, deviasi individual, deviasi situasional, deviasi sistemik, order.
Analisis Jalur/Analisis Pohon Masalah	Dalam masalah terdiri dari daun, ranting, batang, dan akar yang kesemuanya saling memengaruhi sebagai alur sebab-akibat.
Analisis SWOT	Analisis situasi diri sendiri yang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weak*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).
Analisis Obyektif/Analisis Pohon Visi	Mereformulasikan elemen pohon masalah menjadi kondisi positif yang diharapkan.
Analisis Opsi	Mereformulasi elemen pohon obyektif menjadi pilihan-pilihan yang diprioritaskan.

Model Telaah dalam Analisa Sosial

1. **Telaah Historis,** dimaksudkan untuk melihat ke belakang. Asumsi dasar dari telaah ini bahwa suatu peristiwa tidak dengan begitu saja hadir, melainkan melalui sebuah proses sejarah. Dengan ini, maka kejadian, atau peristiwa dapat diletakkan dalam kerangka masa lalu, masa kini dan masa depan.
2. **Telaah Struktur.** Biasanya orang enggan dan cemas melakukan telaah ini, terutama oleh stigmatisasi tertentu. Analisa ini sangat tajam dalam melihat apa yang ada, dan mempersoalkan apa yang mungkin tidak berarti digugat. Struktur yang akan dilihat adalah: ekonomi (distribusi sumberdaya); politik (bagaimana kekuasaan dijalankan); sosial (bagaimana masyarakat mengatur hubungan di luar politik dan ekonomi); dan budaya (bagaimana masyarakat mengatur nilai).
3. **Telaah Nilai.** Penting pula untuk diketahui tentang apa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Mengapa demikian. Dan siapa yang berkepetingan dengan pengembangan nilai-nilai tersebut.
4. **Telaah Reaksi.** Melihat reaksi yang berkembang berarti mempersoalkan mengenai siapa yang lebih merupakan atau pihak mana yang sudah bereaksi, mengapa reaksi muncul dan bagaimana bentuknya. Telaah ini penting untuk menuntun kepada pemahaman mengenai "peta" kekuatan yang bekerja.
5. **Telaah Masa Depan.** Tahap ini lebih merupakan usaha untuk memperkirakan atau meramalkan, apa yang terjadi selanjutnya. Kemampuan untuk memberikan prediksi (ramalan) akan dapat menjadi indikasi mengenai kualitas tahap-tahap sebelumnya.

Peta Kerangka Pikir Analisas Sosial

<table>
<tr><th colspan="2">Paradigma Konsensus</th><th>Paradigma Konflik</th></tr>
<tr><th>Konservatif</th><th>Liberal</th><th>Konflik/ Transformis</th></tr>
<tr><td colspan="2">Dalam masyarakat ada kelas kelas sosial, dan ada kerukunan kelas</td><td>Ada kelas sosial, ada konlik antar kelas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Struktur sosial merupakan hasil konsensus antar anggota

masyarakat, struktur sosial tidak pernah dipemasalahkan, bahkan dipertahankan.</td><td>Struktur sosial adalah hasil konstruksi kelas sosial tertentu, yang dipaksakan untuk ditaati oleh masyarakat. Struktur sosial selalu dipermasalahkan</td></tr>
</table>

Struktur sosial adalah hasil konstruksi kelas sosial tertentu, yang dipaksakan untuk ditaati oleh masyarakat. Struktur sosial selalu dipermasalahkan	Akar permasalahan terletak pada kesenjangan kesadaran, kurangnya kesempatan, kurangnya keterampilan, kesempatan, dan lainnya.	Akar permasalahan berakar pada struktur sosial yang tidak adil dan menindas.
Meringankan beban korbanMeringankan beban korban	Modernisasi sosial	Mentransformasikan struktur yang tidak adil ke struktur yang adil
Pembagian sembako, bakti sosial, pengobatan gratis, khotbah, bantuan untuk kelaparan, pelayanan kaum cacat, himbauan moral, dan lainnya	Pelatihan, kursus, pembangunan infrastruktur	Pengorganisiran masyarakat, pendidikan politik, gerakan sosial, advokasi kebijakan, gerakan massa, pemogokan, pemboikotan, gagasan-gagasan sosial dan struktur alternatif
Masyarakat itu sendiri	Kaum elite, pemerintah, agamawan, LSM, dan lainnya	Masyarakat dan kepemimpinan perubahan/gerakan
Kasinh sayang, menolong orang miskin, kepedulian, rasa kemanusiaan	Persamaan hak dan kesempatan	Kesadaran struktural
Karitatif	Reformatif	Transformatif

Model-Model Pembangunan dan Implikasinya

Implikasi	Model Ekonomi	Model Sosial	Model Politik
Ekonomi	Akumulasi kapital/kapitalisasi	(Re)Distribusi	Transformasi struktural
Politik	Stabilitas	Bantuan	Mobilitas/transformasi politik
Kebudayaan	Pertumbuhan	Kesamaan	Transformasi kultural/imajinasi
Transformasi	Pertumbuhan infrastruktur	Penguatan daya beli	Struktural
Missi	Panggilan kelas menengah	Bekerja dengan masyarakat marjinal	Mendorong transformasi struktural dalam semua level
Pendidikan	Peningkatan infrastruktur sekolah	Pemberian atau pencarian beasiswa	Akses struktural pendidikan

Model Perubahan Interpretatif

Variabel	Tradisional	Liberal	Radikal
Pandangan waktu	Siklis	Evolusioner	Transformatif
Pandangan ruang	Organis	Pluralis	Interindependen
Prinsip pengatur	Ototarian/ketertiban	Manajerial/keseimbangan	Partisipatif/masyarakat
Perubahan utama	Biologis/ Tubuh	Mekanistik	Transformasional
Sikap terhadap konflik	Menyerap atau menolak	Mengawasi	Mengelola konflik

Keterangan:

Tradisional

a. Siklis: kepingan-kepingan episode (masa lalu, kini, masa depan) dintegrasikan dalam keseluruhan sejaah
b. Organis: hanya ada susunan tunggal yang diatur sesuai kepentingan umum
c. Otoritarian: masyarakat dipandang seperti piramida yang dikendalikan dari puncak dengan sedikit partisipasi bawah
d. Biologis: masyarakat dipandang seperti organisme yang analog dengan tubuh manusia
e. Menyimpang: perubahan yang mengubah siklus sejarah dianggap menyimpang

Liberal

a. Evolusioner: perkembangan sejarah bersifat linear. Gerak sejarah bukan siklis, tapi kemajuan/progresif
b. Pluralis: ruang sosial disusun berdaasarkan berbagai macam bagian yang tidak terpisah dan tak berhubungan.
c. Manajerial: menjaga keseimbangan semua unsur atau bagian
d. Mekanistik: masyarakat dipandang sebagai mesin yang bekerja
e. Pengawasan: perubahan sosial merupakan kehendak sejarah, namun tidak mengubah struktur dasar yang mendasarinya. Perubahan selalu diawasi agar tidak menyimpang

Transformatif

a. Transformatif: setiap peristiwa sejaah dipandang secara fundamental menimbulkan tahapan baru, masa lalu, sekarang, dan masa depan, terkait secara dialektik.
b. Interdependen: masyarakat dianggap sebagai keseluruhan sistem yang kreatif, dialektik. Partisipasi: kepentingan umum merupakan input masyarakat, hasil definisi masyarakat Transformasi kultural: masyarakat terbentuk secara kreatif melalui dialog maupun cita-cita utopis anggotanya.
c. Kreatif: konflik merupakan penggerak sejarah, dan kemajuan.

Tahap Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial

Pada tahap ini, setelah berbagai aspek tersebut ditemukan, maka pada akhirnya suatu kesimpulan akan diambil; kesimpulan merupakan gambaran utuh dari suatu situasi, yang didasarkan kepada hasil analisa. Dengan demikian kualitas kesimpulan sangat bergantung dari proses tahap-tahap analisa, juga tergantung pada kompleksitas isu, kekayaan data dan akurasi data yang tersedia, ketepatan pertanyaan atau rumusan terhadap masalah, dan kriteria yang mempengaruhi penilaian-penilaian alas unsur-unsur akar masalah.

Syarat-Syarat Untuk Perencanaan Tindakan

1. Relevan

   Berubungan sekaligus dengan konteks realitas yang mau diperbaiki dengan perilaku tindakan. Peran ansos adalah untuk membongkar realitas melalui pembacaan kritis atas kenyataan yang ada di lapangan. Maka, dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan adalah menyesuaikan dengan fokus permasalahan.

2. Signifikan

   Memiliki prinsip yang bermakna dan penting untuk dilakukan. Hal ini bersifat mendasar bagi perubahan realitas yang akan diperbaiki. Pemahaman paradigma dan teori sosial berfungsi untuk memberikan konsistensi atas pembacaan realitas secara kritis. Tentu, dari hal tersebut akan memberikan signifikansi terhadap tindakan yang dilakukan.

3. Logis

   Tindakan atau gerakan yang direncanakan harus bisa disitematiskan dengan sebuah urutan atau tahapan kerja yang masuk akal. Perencaan dapat dikatakan matang ketika hal tersebut dilakukan dengan alur berfikir yang logis, artinya dari konteks permasalahan, proses analisis, sampai tindakan yang dilakukan harus dapat diterima dan dilakukan.

4. Realistis

   Tindakan yang direncakan harus bisa direalisasikan dengan sumber daya yang ada, tanpa ketergantungan dan intervensi dari pihak lain. Tindakan harus ditopang dengan paradigma yang jelas, dilandasi teori yang kuat, dan mempunyai orientasi yang berkelanjutan. Sehingga dalam perencanaan tindakan dapat membuahkan tujuan dan hasil yang maksimal.

Urgensi Ansos dalam Strategi Gerakan PMII

Ingat, Paradigma PMII adalah kritis transformatif, artinya PMII dituntut peka dan mampu membaca realitas sosial secara objektif (kritis) sekaligus terlibat aktif dalam aksi perubahan sosial (trasformatif). Transformasi sosial yang dilakukan PMII akan berjalan secara efektif jika kader PMII memiliki kesadran kritis dalam melihat realitas sosial. Kesadran kritis akan muncul apabila dilandasi dengan cara pandangan luas terhadap realitas sosial. Untuk dapat melakukan pembacaan sosial secar kritis, mutlak diperlakukan kemampuan analisis sosial secara baik. Artinya, strategi gerakan PMII dengan paradigma kritis transformatif akan dapat terlaksana secara efektif apabila ditopang dengan kematangan dalam analisis sosial (ANSOS).

PARADIGMA

Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi pergerakan organisasi dikarenakan paradigma merupakan suatu titik pijakan dalam membangun konstruk berpikir dan cara pandang suatu persoalan hal ini akan menjadi suatu manifestasi dari tingkah laku dan sikap orang dalam melihat suatu permasalahan.

Didalam organisasi paradigma merupakan unsur inti dalam arah gerak dan sikap yang akan diambilnya. Karena paradigma memiliki urgensi sebagai penentu dan pemilih nilai yang bersifat universal atau abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akan menjadi karakteristik sebuah organisasi dan model berpikir seseorang.

a. Pengertian Paradigma

Paradigma pertama kali diperkanalakan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teooritik dalam bukunya "*the structure of scientifik revolution"* yang dipopulerkan oleh Robert Friederichs 1970, Lodhal dan Cardon 1972, Effrat 1972, dan Philips 1973. Masterman menklasifikasikan menjadi 3 pengertian :

1. Paradigma Metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajian ilmuwan.
2. Paradigma sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat atau peemuan teori yag diterima secara umum.
3. Paradigma konstruk sebagai suatu yang mendasari bangunan konsep dala lingkup tertentu seperti paradigma pembangunan, paradigma pergerakan ataupun yang lainnya.

Paradigma menurut G. Ritzer yang mengartikan bahwa paradigma merupakan pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pook persoalan dalam ilmu.

Secara sederhana paradigma adalah "*how to see the world"* seperti kacamata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.

b. Jenis Utama Paradigma

William Perdue menyatakan dalam ilmu sosial dikenal adanya 3 jenis utama paradigma yaitu :

1. Order Paradigma (Paradigma Keteraturan)

Substansi Paradigma keteraturan adalah bahwa masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang teridiri dari bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan sistematis. Asumsi dasarnya bahwa "setiap struktur sosial adalah fungsional terhadap struktur lainnya. Kemiskinan, peperangan, perbudakan merupakan suatu hal yang wajar sebab fungsional terhadap masyarakat.

2. *Conflic Paradigm* (Paradigma Konflik)

Secara mendasar paradigma ini menyerang paradigma keteraturan yang mengabaikan kenyataan bahwa : setiap unsur-unsur sosial dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang menjadi prinsip penggerak perubahan. Perubahan tidak selalu gradual, namun juga revolusioner. Dala jangka panjang sistem sosial harus mengalami konflik sosial dalam lingkar setan (*vicious circle*) tak berujung pangkal, kritik itulah yang kemudian dikembangkan menjadi paradigma konflik. Hal ini dipandang inheren didalam setiap komunitas karena mungkin untuk dikebiri dan dihilangkan karena konflik menjadi variabel perubahan. Integrasi sosial terjadi karena adanya dominasi.

3. **Plural Paradigma (Paradigma Plural)**

   Didalam kedua paradigma awal yang telah dibahas, paadigma plural menjadi sintesis dari kedua kontras paradigma tersebut. Paradigma plural memandang manusia sebagi sosok yang independen, bebas dan memiliki otoritas sera otonomi dalam melakukan pemaknaan atau penafsira terhada realitas sosial. Struktur interna embentuk suatu kesadaran dalam manusia dan kontrak sosial menjadi mekanisme kontrol.

Organisasi PMII selama ini belum memiliki paradigma yang secaa definitif menjadi acuan gerakan. Cara pandang dan cara bersikap warga pergerakan selaa ini mengacu pada nilai dasar pergerakan (NDP). Karea tidak mengacu pada kerngka paradigma yang baku maka upaya dalam merumuskan dan membangun suatu kerangka memunculkan suatu banyak penafsiran atas nilai yang menjadi acuan. Dalam masa beberapa periode terkahir seperti

1. sahabat Muhaimin Iskandar pada tahun 1997 membuat kerangka paradigma arus balik masyarakat pinggiran (PABMP) yang dilatar belakangi oleh politik orde baru, hegemoni negara dan munculnya kapitalisme pinggiran.
2. Sahabat Saiful Bachri Anshari pada tahun 1997-2000 membuat kerangka paradigma kritis transformatif (PKT) dengan latar belakang kondisi masyarakat indonesia yang dibelenggu oleh kapitalisme, hilangnya ruang publik lantaran orde baru, dogmatisme gama yang konservatif dan masyarakat indonesia dengan tipe masyarakat majemuk. Sumber paradigma kritis transformatif ialah paradigma kritis mahzab Frankfurt dengan karakteristik :
   a. Berpikir dalam totalitas (dialektis).
   b. Berpikir empiris-historis
   c. Berpikir dalam kesatuan teori dan praksis
   d. Berpikir dalam realitas dan terus bekerja (*working reality*)

   Terbentuknya paradigma kritis berasal dari 3 paradigma dasar yaitu paradigma keteraturan, paradigma konflik, dan paradigma plural. Paradigma kritis adalah paradigma yang dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat yang bertumpu kepada :

a. Analisis struktural merupakan membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosial dalam membongkar pola dan relasi sosial hegemoni, dominasi dan ekploitasi.
b. Analisis ekonomi untuk menemukan variabel ekonomi politik baik dalam skala nasional maupun internasional.
c. Analisa kritis yang membongkar dominasi ideologi baik itu yang pada agama, nilai-nilai, adat, ilmu atau filsafat dan membongkar logika danmekanise formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana.
d. Psikoanalisis yang membongkar kesadaran palsu masyarakat.
e. Analisis kesejarahan dalam menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, aktor sejarah dalam level individu ataupun sosial dan kemajuan ataupun kemunduran pada masyarakat.

Namun paradigma kritis baru mampu menjawab periha struktur formasi sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja. Dalam hal ini untuk melengkapi paradigma kritis ini term transformatif menjadi perspektif pelengkap. Makna transformatif harus mampu mentransforasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tidakan praksis ke masyarakat seperti :

a. Transformasi dari elitisme menjadi ke populisme
b. Transformasi dari negara ke masyarakat
c. Transformasi dari struktur ke kultur
d. Transformasi dari individu ke massa

Paradigma kritis transformatif berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaandari belenggu melawan segala bentuk dominasi dan penindasan, membuka tabir dari selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Paradigma kritis transformatif juga dijadikan pisau analisi dalam menafsirkan realitas sosial.

3. Paradigma Menggiring Arus Realitas (PMAR) yang dicetuskan oleh sahabat Heri Herianto periode 2006-2008. Landasan dari paradigma ini bahwa sejarah adalah bahan baku yang menyusun paradigma bukan semata kisah masalalu, namun energi yang hidup dan membentuk masa kini karena dimasa kini lah kita bertaruh tentang masa depan. Medan juang dari paradigma menggiring arus realitas yaitu :
   a. Pembangunan global
   b. Persoalan globalisasi
   c. Ekonnomi global
   d. Politik praktis

   Posisi dari paradigma menggiring arus realitas ini adalah sebagai geo strategi, *single font* (tanpa koalisi) dan *free maret of ideas* (kebebasan aspirasi).

Materi Advokasi

Pengertian Advokasi

Dalam KBBI advokasi adalah pembelaan: penggagas berdirinya lembaga bantuan hukum ini kembali menekuni dunia.

Menurut Mansour Faqih: usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju (incremental).

Sheila Espine-Villaluz: aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Advokasi merupakan upaya-upaya dari, atau atas nama, individu-individu maupun kelompok yang diperlakukan secara tidak adil, untuk mempengaruhi keputusankeputusan dan perilaku masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan ketidakadilan tersebut yang secara luas mengacu pada hal-hal berikut ini:

Serangkaian tindakan Menempatkan suatu Bekerja bersama yang diarahkan masalah ke dalam dengan orang dan kepada perubahan agenda, memberikan organisasi lain untuk kebijakan, sikap, atau jalan keluar bagi membuat perubahan. program dari berbagai masalah tersebut, dan jenis lembaga ,membangun pemerintah, maupun dukungan bagi swasta. Tindakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Pijakan Advokasi

- Dalam literature sosial, advokasi secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar, untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka system yang ada.
    - Yang menjadi pusat pijakan advokasi adalah nilai-nilai keadilan, kebenaran, accountability, transparansi, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Jenis Advokasi

- Advokasi secara umum dibagi menjadi dua, pertama advokasi litigasi. Kedua, advokasi nonlitigasi.
- Yang dimaksud dengan advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi litigasi memiliki beberapa bentuk seperti class-action, judicial review, dan legal standing.
- Sedangkan advokasi nonlitigasi dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demosntrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk memperjuangkan haknya

Sistem Hukum Advokasi

- ***Pertama,* isi hukum (*content of law*)** yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk UU, PP, Keppres dan lain sebagainya atau karena adanya ‘kesepakatan umum’ (konvensi) tidak tertulis yang dititikberatkan pada naskah (teks) hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku.

- ***Kedua,* tata laksana hukum (*structure of law*)** yang merupakan seperangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi, partai politik dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen).
- ***Ketiga,* adalah budaya hukum (*culture of law*)** yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktekpraktek pelaksanaan, penafsiran, penafsiran terhadap dua aspek hukum diatas, isi dan tata- laksana hukum. Oleh karena itu idealnya suatu kegiatan atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan ketiga-tiganya. Dengan demikian, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis didesain untuk mendesakkan terjadinya perubahan, baik dalam isi, tata- laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Perubahan itu tidak harus selalu terjadi dalam waktu yang bersamaan, namun bisa saja bertahap atau berjenjang dari satu aspek hukum tersebut yang dianggap merupakan titik-tolak paling menentukan.

Kerangka Kerja Advokasi

- **Proses-proses legislasi dan juridiksi**, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya.
- **Proses-proses politik dan birokrasi**, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi, mulai dari lobi, negoisasi, mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya.
- **Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi**, yakni suatu kegiatan untuk membentuk pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam pengertian mampu menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai, keahlian dan ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan.

Aspek-Aspek Strategi Advokasi

- *Pertama*, bahwa dalam advokasi kita harus menentukan target yang jelas. Maksudnya kita harus menentukan kebijakan publik macam apa yang akan kita ubah. Apakah itu UU, Perda atau produk hukum lainnya.
- *Kedua*, kita juga harus menentukan prioritas mengingat tidak semua kebijakan bisa diubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kita harus menentukan prioritas mana dari masalah dan kebijakan yang akan diubah.
- *Ketiga*, realistis. Artinya bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah seluruh kebijakan public. Oleh karena itu kita harus menentukan pada sisi-sisi yang mana kebijakan itu harus dirubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan atau yang lainnya.
- *Keempat*, batas waktu yang jelas. Alokasi waktu yang jelas akan menuntun kita dalam melakukan tahap- tahap kegiatan advokasi, kapan dimulai dan kapan akan selesai.
- *Kelima*, dukungan logistik. Dukungan sumber daya manusia dan dana sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi.
- *Keenam*, analisa ancaman dan peluang.

Kebutuhan Sebelum Melakukan Advokasi

♣ Memiliki jumlah anggota aktif yang memadai

♣ Mampu menjangkau ke banyak kelompok massa

♣ Mampu membangun aliansi dengan kelompok lain yang kuat

♣ Memiliki kelompok inti yang terdiri dari orang-orang yang berpengaruh dan dikenal luas

♣ Memiliki kredibilitas

♣ Mempunyai legitimasi

♣ Memiliki informasi yang cukup dan memadai

♣ Mampu merumuskan issu

♣ Memiliki kemampuan dan kewenangan yang diakui dan dihormati

♣ Memiliki keteguhan moral

Keterangan	Riset Akademis	Riset Advokasi
Tujuan	▪ Pembuktian teori/ hipotesa ▪ Kebenaran ilmiah	▪ Pembuktian kasus/kejadian ▪ Kebenaran issu yang diadvokasi
Manfaat	▪ Pengakuan akademis ▪ Pengembangan teori	▪ Pengakuan hak atau pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat ▪ Umpan-balik perubahan kebijakan publik
Isi dan Objek	▪ Teori/hipotesa ilmiah ▪ Fakta/data berkaitan dengan teori atau hipotesa tersebut	▪ Kebijakan publik ▪ Fakta/data tentang pelaksanaan dan dampak kebijakan publik
Metodologi	▪ Nomotetik (harus objektif, netral, sistematika baku, umumnya kuantitatif	▪ Ideografis (subjektif, memihak, tidak ada kaidah baku, umumnya kualitatif
Pelaksana	▪ Pakar, professional	▪ Campuran dengan melibatkan rakyat
Penyajian hasil	▪ Sangat rinci, dingin, penuh data, pakai istilah teknis ▪ Sistematika baku; hipotesa, data pembuktian, baru kesimpulan ▪ Bentuk resmi/formal ▪ Harus disajikan oleh peneliti	▪ Singkat, padat, jelas, tegas ▪ Gaya bahasa populer ▪ Statistik seperlunya saja ▪ Sedikit istilah teknis ▪ Sistematika terbalik; kesimpulan, pernyataan sikap/tuntutan, baru data dan ilustrasi ▪ Bisa disajikan oleh orang lain

Tahapan Advokasi

- Membentuk lingkar inti: Langkah pertama dari proses advokasi adalah memebentuk lingkar inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas serta pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sedemikian pentingnya posisi ini, sehingga orang atau organisasi yang berada didalamnya haruslah memiliki kesamaan visi dan analisis (bahkan ideologi) yang jelas terhadap issu yang diadvokasi.
- Memilih issu strategis: Tugas pertama dari lingkar inti adalah merumuskan issu tertentu yang diadvokasi. Issu yang dirumuskan tersebut dapat dikatakan menjadi suatu issu strategis jika: Aktual, Penting dan mendesak, Sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Berdampak positif pada perubahan sosial yang lebih baik, Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar.
- Merancang sasaran dan strategi: Dalam merancang sasaran dan strategi dapat digunakan metode SMART, yaitu: Spesifik; dalam arti rumusan sasaran memang spesifik, kongkrit, dan jelas. Measurable; dalam arti hasilnya punya indikator yang jelas sehingga dapat

dipantau dan diketahui. Realistis; dalam arti apakah sasaran mungkin dapat dicapai. Time Bound; dalam arti punya batas waktu yang jelas.

- Mengolah data dan mengemas informasi: Salah satu cara yang dikenal dalam mengolah data dalam proses advokasi adalah dengan melakukan riset advokasi. Riset advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan, terutama dalam bentuk kajian kebijakan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya sebagai informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi; dalam rangka memilih dan merumuskan issu strategis, sebagai bahan proses legislasi, untuk keperluan lobby dan kampanye, dan sebagainya.

Ciri Dan Unsur Aliansi Yang Efektif

- Fokus pada tujuan dan sasaran advokasi yang disepakati bersama
- Tegas dalam menetapkan dan menggarap satu atau beberapa issu yang disepakati bersama
- Ada pembagian peran dan tugas yang jelas antara para pihak yang terlibat
- Terbentuk sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat
- Memanfaatkan konflik yang muncul sebagai upaya konstruktif dalam menjaga dinamika dan perimbangan (perlu fleksibilitas)
- Ada kemungkinan lahir bentuk-bentuk kerjasamabaru yang lebih berkembang di masa mendatang
- Ada mekanisme komunikasi yang baik dan lancar
- Dibentuk dengan jangka waktu yang jelas

Langkah Taktis Advokasi

1. MENGUPAYAKAN ADANYA KEPEMIMPINAN ORGANISASI YANG KUAT DAN KREDIBEL
2. MELAKUKAN INVESTIGASI ISU YANG MENDESAK
3. PEMBACAAN, ANALISIS DATA ATAU ISU/ PENCARIAN DAN PENELITIAN FAKTA
4. MERUMUSKAN STRATEGI DINAMIS: (1) Statement missi (Mission statement), (2) Tujuan dan sasaran advokasi, (3) Rancangan stragi dan tindakan, (4) Rencana aksi (plan of actions)
5. MENCARI DUKUNGAN YANG BESAR DARI KONSTITUEN ATAU KELOMPOK PENDUKUNG
6. MOBILISASI DAN AKSI YANG TERLIBAT: (1) Pertemuan para pembuat keputusan, (2) Pertemuan para pelanggar HAM, (3) Interview media massa, (4) Public Hearing, (5) Public Meeting, (6) Parlementary Hearing, (7) Kesaksian Pengadilan, (8) Pengajuan Petisi, (9) Boikot, Pawai Protes, Aksi Massa.

PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Proses membangun organisasi masyarakat disebut pngorganisasian masyarakat. Pengorganisasian dalam masyarakat mungkin bagi sebagian warga merupakan istilah yang baru, tetapi konsep ini sudah dikenal luas di kalangan organisasi umum yang lain. Pengorganisasian bisa menjadi kebutuhan ketika realitas kehidupan sosial masyarakat sudah berkembang sedemikian kompleksnya, sehingga sebuah usaha tidak bisa dilakukan secara individual lagi (warga-perwargaan) melainkan harus menjadi usaha bersama dalam bentuk kelompok. Dengan demikian, pada pengertian yang paling sederhana, Konsep serba bersama ini merupakan batas pembeda antara upaya pengorganisasian masyarakat

dengan upaya perwargaan maupun strategi menyerahkan segala sesuatunya pada pemimpin yang sudah pasti dilakukan secara individual. Dalam membangun organisasi masyarakat ada beberapa penekanan dan pemisahan secara manajemen pengorganisasiannya. Pemisahan manajemen pengorganisasian ditujukan untuk mengahadapi permasalahanpermasalahan yang muncul di tingkatan masyarakat . Permasalahan yang muncul bisa dibedakan dalam dua hal, secara internal dan eksternal. Begitu pula cara membangun organisasi masyarakat dengan internal dan eksternal dengan harapan organisasi mampu mengatasi dua persoalan ini secara baik.

Landasan & Tujuan pengorganisasian

Landasan Pengorganisasian

Landasan filosofis dari kebutuhan untuk membangun organisasi adalah membangun kepentigan secara bersama–sama pada seluruh masyarakat, karena masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam konteks masyarakat, perubahan sosial juga menyangkut multidemensional. Dalam demensi ekonomi seringkali ‘dimimpikan’ terbentuknya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat . Dalam segi politik selalu diinginkan keleluasaan dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berkompetisi serta diakui hak-hak sipil dan politiknya. Sedangkan dalam sisi budaya, dirasakan ada keinginan untuk mengekspresikan kearifan kebudayaan lokal. Landasan filosofis pengorganisasian lainnya adalah melakukan adalah pemberdayaan. Karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Pengorganisasian masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama sekaligus penentu dan pengendali kegiatan-kegiatan perubahan sosial yang ada dalam organisasi masyarakat .

Tujuan Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi masyarakat ditujukan untuk membangun dan mengembangkan organisasi. Pengorganisasian mempunyai peranan yang luar biasa bagi organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal tujuan pengorganisasian adalah membangun organisasi masyarakat. Secara eksternal tujuan pengorganisasian adalah membangun jaringan antar organisasi masyarakat untuk menghadapi masalah–masalah bersama atau lebih ditujukan untuk membangun kekuatan bersama yang lebih besar lagi. Selain itu, tujuan pengorganisasian adalah mnyelesaikan konflik–konflik atau masalah masalah yang terjadi di tengah warga masyarakat yang setiap saat muncul dan harus segera diselesaikan untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik.

Manfaat Melakukan Pengorganisasian

Mengorganisir diri punya manfaat dalam jangka pendek, mengorganisir diri adalah suatu alat effektif untuk membuat sesuatu terlaksana; memperbaiki pelayanan pada masyarakat, termasuk pelayanan dalam bidang ekonomi (modalteknologi), menurunkan beban pajak, memastika jaminan lapangan kerja, perubahan kebijakan di tingkat masyarakat atau di luar, memperbaiki pelayanan angkutan umum dan kesehatan, melindungi lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta sebagainya. Intinya, banyak diantara masalah keseharian yang kita hadapi saat ini dapat dipecahkan dan dirubah dengan cara mengorganisir diri.

Mengorgansir diri juga punya manfaat jangka panjang yang mungkin jauh lebih penting. Melalui proses-proses pengorganisasian, masyarakat bisa belajar sesuatu yang baru

tentang diri sendiri. Masyarakat akan menemukan bahwa harga diri dan martabat mereka selama ini selalu diabaikan dan diperdayakan. Dengan pengorganisasian, masyarakat, warga dapat menemukan bahwa kehormatan dan kedaulatan mereka selama ini justru tidak dihargai karena ketiadaan kepercayaan diri di antara warga masyarakat sendiri. Warga masyarakat dengan demikian akan mulai belajar bagaimana caranya mendayagunakan semua potensi, kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki dalam proses-proses pengorganisasian; bagiamana bekerja bersama dengan warga lain, menyatakan pendapat dan sikap mereka secara terbuka, mempengaruhi kebijakan resmi, menghadapi lawan atau musuh bersama. Akhirnya, melalui pengorganisasian, masyarakat mulai mengenal dan menemukan diri mereka sendiri. Warga masyarakat akan bisa menemukan siapa mereka sebenarnya selama ini, berasal dari mana, seperti apa latar belakang mereka, sejarah mereka, cikal-bakal mereka, akar budaya mereka serta kepentingan bersama mereka. Warga masyarakat akan menemukan kembali sesuatu yang bermakna dalam lingkungan keluarga mereka, kelompok suku atau bahasa asal mereka yang memberi mereka kembali martabat dan kekuatan baru.

Kerja Pengorganisasian (Pengorganisiran)

Salah satu kerja penting dari pengorganisasian adalah pengorganisiran. Hal menakjubkan dalam keseluruhan proses mengorganisir adalah tenyata hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengorganisiran seringkali dikesankan sulit atau bahkan musykil. Tetapi dalam kenyataannnya, mengorganisir adalah suatu proses yang sebenarnya tidak ruwet. Itu tergantungan pada ketrampilan dasar yang sebagian besarnya sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dalam kadar yang sama dan memadai. Salah stau contoh yang cukup relevan dengan hal ini adalah ketrampilan sehari-hari untuk hidup bersama yang sudah dimiliki oleh masyarakat . Pelembagaan kerja bersama sudah terwujudkan ke dalam berbagai macam kerja organisasi asli seperti “upacara “, “gotong–royong”, dan sebagian. Memang tidak ada resep serba jadi dalam proses pengorganisiran, ada beberapa langkah tertentu yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu pula. Tetapi semua langkah itu sebenarnya sederhana dan mudah dipelajari oleh warga sekalipun. Dengan demikian, semua warga dapat mengorganisir. Semua warga dapat belajar tentang asas-asas pengorganisasian. Tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain.

Mengapa Warga Mengorganisir Diri atau Menolak untuk itu?

Warga-warga masyarakat mengorganisir diri karena beberapa alasan yang mungkin berbeda. Adakalanya diperlukan pendekatan agar alasan yang beragam itu bisa dijadikan satu landasan untuk menghimpun diri bersama-sama. Dengan demikian salah satu landasan awal dari upaya mengorganisir diri adalah tersedianya landasan bersama (common platform), baik berupa nilai, institusi dan mekanisme bersama. Misalnya, pengorganisasian harus jelas visi dan misi yang ingin dicapai dari upaya pengorganisasian itu. Visi dan Misi itulah kemudian diturunkan ke dalam strategi dan program yang bisa menjawab kebutuhan anggota secara lebih jelas. Mengapa sebagian warga tidak mengorganisir diri? Tidak semua warga yang mempunyai masalah lantas mengorganisir diri. Beberapa warga akan tetap berkutat mencoba menyelesaikannya sendirian, meskipun sudah terbukti berkali-kali gagal atau kurang berhasil. Ada banyak alasan mengapa warga menolak berhimpun dengan warga lain: ada sebagin warga pengorganisasian merupakan hal baru, merasa cemas karena akan dimintai sesuatu atau melakukan sesuatu yang mereka yakini belum pasti, takut dimintai pertanggungjawaban atau menyatakan pendapatnya di depan umum. Alasan lain adalah takut pada apa yang bakal terjadi jika pengorganisasi itu nanti sudah berjalan, mereka akan mendapatkan tantangan, rintangan ataupun akibat-akibat lain yang dirasakan memberatkan. Karena alasanalasan tersebut di

atas menyebabkan banyak warga lebih memilih untuk menggunakan cara-cara pemecahan persoalan secara perwargaan, terhadap banyak persoalan yang sebnarnya dirasakan oleh banyak warga.

Dimana melakukan Kerja–Kerja Pengorganisasian

Tempat terbaik untuk memulai suatu pengorganisasian adalah suatu pengorganisasian adalah berada, dengan warga-warga yang ada di sekitar anda, tentang masalah yang memang oleh warga diprihatinkan bersama, tentang sesuatu yang oleh warga masyarakat menginginkan terjadi perubahan atasnya. Mulailah dengan bekerja dan hidup bersama warga, warga masyarakat seperti anda juga, mereka yang membagi minat dan perhatian yang sama dengan anda dan yang lainnya. Pengorganisasian tidak perlu merupakan sesuatu yang serba besar pada awal mulanya, jika ingin berhasil. Pengorganisasian bisa dimulai dari sebuah kelompok yang kecil.

Apa yang harus Kita Kerjakan dalam Pengorganisasian?

Langkah Pertama, salah satu yang bisa dilakukan adalah mempelajari situasi sosial kemasyarakatan di masing-masing. sebagai entitas politik, ekonomi bisa dipilah berdasarkan kategori; region (dusun), profesi (petani-pengrajin-pengusaha), ataupun kekerabatan (trah). Di sebuah masyarakat yang meletakkan konteks kewilayahan sebagai sesuatu yang penting, maka pengorganisasian bisa menggunakan pemilihan regional yang berbasisikan dusun. Demikianpula apabila, basis pengorganisasian lebih tepat menggunakan kreteri profesi maka strategi yang dipilih bisa menyesuaikan dengan keadaan sosial tersebut.

Langkah Kedua, pengorganisasian juga seharusnya memperhatikan titik masuk institusional (kelembagaan). Pertanyaan yang relevan adalah apakah upaya pengorganisasian dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti kelompok masyarakat , assosiasi lembaga ekonomi atau lembaga lain resmi yang seringkali dalam pembentukannya ‘dibidani’ oleh pemerintah. Atau upaya pengorganisasian dilakukan dengan membentuk wadah baru sama sekali. Tentu saja kedua jalan itu mempunyai sejumlah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan lembaga yang sudah ada adalah relatif tersedianya prasarana dan sarana bagi kerja-kerja pengorganisasian. Kelamahan jalan ini adalah bentuknya yang sangat kaku karena diin dari atas. Sedangkan jalan pembentukan wadah baru mempunyai kelebihan karena relatif lebih mandiri dan partispatif namun mempunyai kelemahan yang bersumber dari belum terlembaganya mekanisme organisasi sehingga bersifat trial and error.

"Pada Dasarnya, Semua Orang punya potensi menjadi Intelektual, sesuai dengan Kecerdasan yang dimilikinya, dan dalam cara Menggunakannya. tetapi tidak Semua Orang adalah Intelektual dalam Fungsi Sosial."

- Antonio Gramsci-